

RCE Quarterly Report: **KAJIAN FISKAL REGIONAL** PROVINSI LAMPUNG

Triwulan II Tahun 2025

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



RCE Quarterly Report:
KAJIAN FISKAL REGIONAL
PROVINSI LAMPUNG

Triwulan II Tahun 2025

Kanwil DJPb Provinsi Lampung



Kajian Fiskal Regional (KFR) Lampung
Triwulan II 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Lampung

Penyusun:

Tim Kanwil DJPb Provinsi Lampung



<http://bit.ly/KFRLampung>

Tim Penyusun

Pengarah

Purwadhi Adhiputranto

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Penanggung Jawab

Farhan Fatnanto

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Ketua Tim

Gwen Adhitya Amalkhan

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Tim Penyusun

Syifa` Abdurohman

Silvi Yuniar

Romadhona Puspita Sari

Yossi Yulita

Lily Radhiya Ulfa

Panji Muhammad Harahap

Yudo Prayogi Irsad



Unduh Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung Triwulan II 2025 Secara Online



SCAN ME



Atau

Unduh Pada Tautan Berikut:

<https://bit.ly/KFRLampung>

Ekonomi Regional
Lampung

Fiskal Regional
Lampung

Outline of Sections

Ketahanan
Energi

Policy
Responses



KORESPONDENSI

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Email: Kanwildjpb.lampung@kemenkeu.go.id



Kata Pengantar



Tabik pun, Salam sejahtera bagi kita semua.

Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2025 merupakan analisis mendalam yang disusun oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kondisi makroekonomi dan fiskal di wilayah Lampung. Dalam era ketidakpastian ekonomi saat ini, laporan ini diharapkan berfungsi sebagai panduan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, mengawal implementasi pembangunan, dan mendukung kemajuan ekonomi Lampung.

Penyusunan KFR ini terwujud berkat kolaborasi erat dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, serta *Local Experts*.

Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang kuat dari unit Kemenkeu Satu Regional Lampung, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.

KFR Triwulan II 2025 diharapkan dapat menjadi alat strategis bagi seluruh pihak terkait untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Lampung dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang sejahtera. Laporan ini merupakan hasil kerja kolektif dan kami mengundang masukan konstruktif dari semua pemangku kepentingan untuk perbaikan di masa mendatang.

Salam sejahtera untuk kita semua.



Bandar Lampung, 29 Agustus 2025
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung



Ditandatangani secara elektronik
Purwadhi Adhiputranto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
EXECUTIVE SUMMARY.....	x
DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL.....	xvi
SUPLEMEN 1- PETA LAMPUNG.....	1
BAB 1 ANALISIS EKONOMI REGIONAL	2
1.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI.....	2
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha	2
1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	2
1.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran	3
1.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	4
1.1.1.4 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB	5
1.1.2 Suku Bunga	6
1.1.3 Inflasi.....	6
1.1.3.1 Pergerakan Inflasi di Lampung.....	6
1.1.3.2 Pengendalian Inflasi	8
1.1.4 Nilai Tukar	9
1.1.5 Risiko Ketidakpastian Global Terhadap Provinsi Lampung	10
1.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN.....	11
1.2.1 Tingkat Kemiskinan	11
1.2.2 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini).....	13
1.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)	15
1.2.4 Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	17
SUPLEMEN 2- ANALISIS PELUANG INVESTASI REGIONAL LAMPUNG: INDUSTRI EKSIPIEN AMILUM.....	19
BAB 2 ANALISIS FISKAL REGIONAL.....	20
2.1 PELAKSANAAN APBN	20
2.1.1 Pendapatan Negara.....	21
2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan	21
2.1.1.2 Analisis <i>Tax Ratio</i>	23
2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	23
2.1.1.4 Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan Negara	24
2.1.2 Belanja Negara	24
2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	25
2.1.2.2 Transfer ke Daerah	28
2.1.2.3 Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Negara	32
2.1.3 Surplus/Defisit APBN.....	33
2.1.4 Capaian Output Sektoral.....	33
2.1.5 Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah	34
2.1.5.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	34
2.1.5.2 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	34
2.1.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah	35
SUPLEMEN 3- SUCCESS STORY DANA DESA: SUCCESS STORY RAWA SELAPAN	36
2.2 PELAKSANAAN APBD.....	37
2.2.1 Pendapatan Daerah.....	37
2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38
2.2.1.2 Rasio Pajak Daerah (<i>Local Tax Ratio</i>)	38
2.2.1.3 Pendapatan Transfer	39
2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah	39
2.2.1.6 Prognosis/ <i>Outlook</i> Pendapatan	40

2.2.1.7 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan.....	41
2.2.2 Belanja Daerah	42
2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja.....	42
2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi	44
2.2.2.3 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB	45
2.2.2.4 Prognosis/ <i>Outlook</i> Belanja Daerah.....	45
2.2.2.5 Rekomendasi Kebijakan Belanja	45
2.2.3 Perkembangan Surplus/Defisit APBD	46
2.2.4 Pembiayaan Daerah	47
SUPLEMEN 4 - ANALISIS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)	48
2.3 PROGRES IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG).....	49
2.3.1 Pendahuluan	49
2.3.1.1 <i>Overview</i> Proses Pelaksanaan MBG	49
2.3.2 Progres Pelaksanaan MBG di Regional Lampung	50
2.3.2.1 Progres Implementasi	50
2.3.3 Analisis Indikasi Awal Dampak Program MBG Terhadap <i>Outcome</i> Jangka Pendek	50
2.3.3.1 Tinjauan Literatur Dampak Program Makan Bergizi	50
2.3.3.2 Asumsi dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Interpretasi Analisis Dampak Awal	51
2.3.3.3 Dampak Awal MBG terhadap Pertanian	52
2.3.3.4 Dampak Awal MBG terhadap Peternakan	53
2.3.3.5 Dampak Awal Program MBG terhadap Perikanan	54
2.3.3.6 Dampak Awal Program MBG terhadap Inflasi/ Kenaikan Harga	54
2.3.3.7 <i>Overview</i> Keseluruhan Dampak MBG Terhadap Permintaan dan Penawaran Agregat	55
2.3.4 Isu Strategis Pelaksanaan MBG di Lampung	56
2.3.5 Simpulan dan Rekomendasi	57
SUPLEMEN 5-KETAHANAN ENERGI UNTUK MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN	60
BAB 3 ANALISIS KETAHANAN ENERGI: POTENSI KERJA SAMA PEMBIAYAAN BPD LH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI LAMPUNG	61
3.1 PENDAHULUAN	61
3.2 METODOLOGI DAN KERANGKA ANALISIS	61
3.3 POTENSI EBT DI REGIONAL LAMPUNG.....	61
3.3.1 Panas Bumi	61
3.3.2 Energi Surya.....	62
3.3.3 Bioenergi.....	62
3.3.4 Hidro dan Mikro Hidro	62
3.3.5 <i>Waste to Energi</i> (WtE).....	62
3.4 PROFIL DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN BPD LH	63
3.5 KESESUAIAN INSTRUMEN BPD LH DENGAN PROYEK EBT LAMPUNG	65
3.6 OPSI PEMBIAYAAN TAMBAHAN	66
3.7 ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI	68
3.7.1 Risiko Finansial	68
3.7.2 Risiko Teknis & Operasional	68
3.7.3 Risiko Kebijakan dan Regulasi	68
3.7.4 Risiko Sosial	68
3.7.5 Risiko Kelembagaan dan Tata Kelola	69
3.8 SIMPULAN DAN REKOMENDASI	69
BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
4.1 KESIMPULAN	72
4.1.1 <i>Outlook</i> Makroekonomi Regional Lampung	72
4.1.2 Kinerja Fiskal Regional Lampung	73
4.1.2.1 Kinerja APBN.....	73
4.1.2.2 Kinerja APBD.....	74
4.1.3 Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	75
4.1.4 Analisis Ketahanan Energi: Potensi Kerja Sama Pembiayaan BPD LH Untuk Mendukung EBT Di Lampung.....	76
4.2 REKOMENDASI	77
4.2.1 Rekomendasi terkait Makroekonomi dan Fiskal.....	77



4.2.2	Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis.....	78
4.2.3	Terkait Ketahanan Energi dan Potensi Kerja Sama Pembiayaan EBT Lampung.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
DAFTAR ISTILAH.....		83





DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan <i>C-to-C</i>	2
Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025 (% <i>yoy</i>)	2
Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025 (% <i>qtq</i>).....	3
Grafik 1.4. Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Lampung.....	3
Grafik 1.5. <i>Share</i> dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2025 (%)	4
Grafik 1.6. <i>Share</i> dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha.....	5
Grafik 1.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung s.d. Triwulan II Periode 2023 – 2025 (Rp Miliar)	5
Grafik 1.8. Perkembangan <i>BI 7-Day Repo Rate</i> dan Inflasi Lampung.....	6
Grafik 1.9. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan II 2025 (% <i>yoy</i>).....	7
Grafik 1.10. Pergerakan Laju Inflasi	7
Grafik 1.11. Perkembangan Inflasi Lampung 2023 – Triwulan II 2025 (% <i>mtm</i>)	8
Grafik 1.12. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan.....	9
Grafik 1.13. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan II 2025	9
Grafik 1.14. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2025 (persen)	11
Grafik 1.15. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 – 2025 (persen).....	11
Grafik 1.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2025	12
Grafik 1.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2025.....	12
Grafik 1.18. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2020 – 2025	12
Grafik 1.19. Perkembangan Gini Ratio Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2025.....	13
Grafik 1.20. Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2025.....	14
Grafik 1.21. Perkembangan Gini Ratio Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 – 2025	14
Grafik 1.22. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun.....	14
Grafik 1.23. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2025	15
Grafik 1.24. Rata-rata NTP Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 – 2025	15
Grafik 1.25. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2025	17
Grafik 1.26. Rata-Rata NTN Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 – 2025	18
Grafik 1.27. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2021 – 2025	18





Grafik 2.1. Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan s.d. 30 Juni Tahun 2024-2025 (miliar rupiah).....	21
Grafik 2.2 Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. Triwulan II 2025 (miliar rupiah, persen).....	22
Grafik 2.3 Pertumbuhan Kumulatif PNBPN s.d. Triwulan II 2025	24
Grafik 2.4 Komposisi PNBPN s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025.....	24
Grafik 2.5. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan II 2023 – 2025 (miliar rupiah)	25
Grafik 2.6. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja	25
Grafik 2.7. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah).....	25
Grafik 2.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2025 (miliar Rp, persen).....	26
Grafik 2.9. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar (persen).....	26
Grafik 2.10. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2025.....	27
Grafik 2.11. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023-2025 (miliar rupiah)	27
Grafik 2.12. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan II 2025.....	28
Grafik 2.13. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB	28
Grafik 2.14. Distribusi Penyaluran TKD s.d. Triwulan II 2023 – 2025	28
Grafik 2.15. Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Penyaluran TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa	29
Grafik 2.16. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD s.d. Triwulan II 2025 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen)	29
Grafik 2.17. Komponen Penyaluran DTU s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen)	29
Grafik 2.18. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTU s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen).....	30
Grafik 2.19. Pagu DAU Per Jenis Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)	30
Grafik 2.20. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH	30
Grafik 2.21. Pagu dan Realisasi Penyaluran DTK s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp).....	30
Grafik 2.22. Realisasi DAK Fisik Per Bidang s.d. Triwulan II-2024 dan 2025 (miliar, Rp)	31
Grafik 2.23. Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2025	31
Grafik 2.24. Distribusi Pagu Dana Desa <i>Earmarked</i> dan <i>Non-Earmarked</i> Tahun 2025 (miliar Rp)	32
Grafik 2.25. Clustering Penyerapan Dana Desa s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)	32
Grafik 2.26. Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2025 (miliar, Rp).....	32
Grafik 2.27. Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2024-2025 (miliar, Rp)	33
Grafik 2.28 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung s.d. Triwulan II Tahun 2023-2025 (miliar rupiah, debitor)	34
Grafik 2.29 Penyaluran UMi di Lampung s.d. Triwulan II Tahun 2023-2025	34
Grafik 2.30. Perbandingan Pagu-Realisasi Pendapatan Daerah (miliar Rp) dan Pertumbuhannya (persen) Triwulan I 2024 dan 2025	37





Grafik 2.31. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan II 2024 dan 2025 (miliar Rp)	38
Grafik 2.32. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)	39
Grafik 2.33. Perbandingan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)	39
Grafik 2.34. Perbandingan Realisasi PAD (miliar Rp) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025	39
Grafik 2.35. Rasio Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2025 ..	40
Grafik 2.36. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar Rp) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025	42
Grafik 2.37. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar Rp)	42
Grafik 2.38. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)	43
Grafik 2.39. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)	44
Grafik 2.40. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi	44
Grafik 2.41. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2025	45
Grafik 2.42. Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan II-2024 dan 2025 (miliar Rp)	47





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Andil Inflasi Bulan Juni 2025 per Komoditas (% yoy)	7
Tabel 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Menurut Subsektor per Triwulan periode 2021 – 2025	16
Tabel 1.3. Perkembangan NTUP Lampung Menurut Subsektor per Triwulan Periode 2021 – 2025.....	17
Tabel 2.1 <i>I-Account</i> APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. Triwulan II 2025 (dalam miliar Rp).....	20
Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. 30 Juni 2025	21
Tabel 2.3. Realisasi dan Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 Juni 2025 (miliar rupiah, persen)	22
Tabel 2.4 <i>Tax Ratio</i> Penerimaan Pajak s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 di Lampung (miliar rupiah).....	23
Tabel 2.5. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2025 Provinsi Lampung (miliar rupiah)	24
Tabel 2.6. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2025 (miliar, Rp)	31
Tabel 2.7. Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)	33
Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan.....	33
Tabel 2.9. Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur	34
Tabel 2.10. <i>I-Account</i> Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)	37
Tabel 2.11. Perbandingan <i>Local Tax Ratio</i> Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025	38
Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal.....	40
Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2025	40
Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2024 dan 2025	45
Tabel 2.15. Perkembangan Rasio Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 ..	46
Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025	47
Tabel 2.17. Asumsi dan Estimasi Analisis MBG.....	51
Tabel 2.18. Keterangan Variabel Penelitian	52
Tabel 2.19. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Petani Semester I-2025.....	52
Tabel 2.20. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Peternak Semester I-2025	53
Tabel 2.21. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Nelayan Semester I-2025.....	54
Tabel 2.22. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Indeks Harga Konsumen dan Harga Komoditas Semester I-2025	54
Tabel 3.1. Potensi EBT di Lampung.....	63





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II Tahun 2025...	3
Gambar 2.1. Progress Implementasi Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung Semester I 2025	50



EXECUTIVE SUMMARY

Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2025 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung

Outlook Ekonomi Regional Lampung

Perekonomian Lampung pada Triwulan II 2025 mencatat kinerja pertumbuhan yang solid, terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan dan peningkatan nilai ekspor. Namun, dinamika ketidakpastian global masih menjadi faktor risiko yang berpotensi menimbulkan gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas.

Ekonomi Provinsi Lampung mempertahankan kinerja yang baik pada triwulan II 2025 dengan pertumbuhan 5,09% (yoy). Nilai tersebut merupakan capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir dan lebih tinggi dari Sumatera (4,96%), meskipun sedikit di bawah capaian nasional (5,12%). Kinerja tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan industri pengolahan serta peningkatan ekspor barang dan jasa, yang mencerminkan penguatan sektor hulu sekaligus daya saing produk Lampung di pasar global. Nilai PDRB tercatat sebesar Rp134,40 triliun (ADHB) dan Rp76,06 triliun (ADHK), mengindikasikan pertumbuhan riil yang solid. Secara triwulanan (qtq), ekonomi Lampung triwulan II 2025 tumbuh 9,33%, rebound dibanding kontraksi 1,11% pada triwulan sebelumnya. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi di Pulau Sumatera dan kedua secara nasional.

Tekanan inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan II 2025 menunjukkan tren terkendali pada level $2,5 \pm 1\%$, dengan inflasi tahunan per Juni 2025 sebesar 2,27% (yoy), atau sedikit di atas rata-rata nasional. Inflasi bulanan rata-rata berada pada level moderat 0,22% (mtm). Pola inflasi bersifat musiman, meningkat saat momen libur keagamaan dan awal tahun ajaran

baru, terutama pada kelompok makanan dan pendidikan. Pasca Idulfitri, tekanan harga mereda seiring normalisasi konsumsi. Tekanan utama pada triwulan II 2025 berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, khususnya bawang merah, akibat terbatasnya pasokan dari sentra produksi seperti Brebes yang terdampak panen rendah, cuaca buruk, dan tingginya biaya produksi.

Tingkat kemiskinan Lampung pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,00%, masih lebih tinggi dari rata-rata Sumatera (8,05%) dan nasional (8,47%). Kemiskinan di perdesaan mencapai 11,32%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 7,49%, menunjukkan kesenjangan spasial yang cukup besar. Faktor utamanya adalah keterbatasan akses infrastruktur dan minimnya diversifikasi sumber penghidupan. Rasio Gini Lampung berada di angka 0,292, lebih baik dari nasional (0,375), tetapi masih menunjukkan kesenjangan pendapatan terutama di sektor informal.

Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung menunjukkan tren positif, mencapai 130,57 atau tumbuh 6,54% (yoy), lebih tinggi dari nasional namun masih di bawah rata-rata Sumatera pada triwulan II 2025. Dukungan sektor pertanian di Lampung diarahkan pada penguatan NTP dan posisi sebagai lumbung pangan nasional melalui integrasi dengan industri pengolahan, perluasan akses pasar, dan efisiensi rantai pasok. Strategi utama mencakup perbaikan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan peran penyuluh, serta pengembangan bibit padi unggul tahan hama.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Lampung mencatat capaian cukup baik, mencapai 112,98, lebih tinggi dibandingkan nasional (103,35) dan



regional Sumatera (107,08) pada triwulan II 2025. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur (SPBN), perlindungan sosial lewat Asuransi Nelayan, serta akses pembiayaan melalui KUR. Kebijakan ini mendorong produktivitas, memperkuat ketahanan sektor perikanan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Analisis Fiskal Regional: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kinerja APBN Regional Lampung hingga 30 Juni 2025 melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Pendapatan Negara didorong oleh pertumbuhan akseleratif Bea Keluar, sementara Belanja Negara dikelola secara lebih prudent. Di sisi lain, Belanja Pegawai, Belanja Sosial, DBH, serta DAK Non Fisik mengalami percepatan realisasi.

Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp5.083,69 miliar, tercapai 45,71% dari target dan meneruskan pertumbuhan positif 21,34% (yoy). Akselerasi ini selaras dengan pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (24,55%, yoy) yang meningkat pada Pajak Perdagangan Internasional khususnya komponen Bea Keluar akibat perubahan harga komoditas. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan (5,02%, yoy) didukung oleh Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Realisasi Belanja Negara sebesar Rp14.839,06 miliar, tercapai 46,20% dari pagu, tumbuh negatif 8,45% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang berdampak pada kontraksi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 24,16% (yoy) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 2,01% (yoy). Namun demikian, percepatan realisasi ditunjukkan oleh Belanja Pegawai dan Belanja Sosial, sementara TKD didorong oleh percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Defisit anggaran regional Lampung hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp9.755,36 miliar, menyempit sebesar 18,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini merupakan dampak atas kinerja positif penerimaan serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Strategi defisit menggambarkan peran APBN yang masih menjadi instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus berfungsi sebagai *shock absorber* guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi.

Hingga 30 Juni 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung mencapai Rp4.987,27 miliar kepada 92.350 debitur, tumbuh 0,15% (yoy). Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp201,29 miliar kepada 34.681 debitur. Peran APBN melalui kredit bersubsidi kian memberi manfaat melalui perluasan akses keuangan yang inklusif serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian di provinsi Lampung.

Analisis Fiskal Regional: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja APBD Regional Lampung Triwulan II 2025 menunjukkan tekanan di sisi pendapatan akibat kontraksi dana transfer, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif. Dari sisi belanja, serapan relatif rendah dan masih didominasi oleh belanja rutin, utamanya belanja pegawai.

Realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp10.631,04 miliar atau 33,50% dari pagu, turun 2,74% (yoy). Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp8.276,79 miliar atau 77,85% dari total realisasi. Belanja Pegawai menyerap 51,32% dari total belanja daerah, jauh di atas batas maksimal 30% sebagaimana amanat UU HKPD, sehingga memerlukan strategi pengelolaan bertahap agar tidak mengganggu pelayanan publik. Belanja Barang dan Jasa mampu tumbuh

9,04% (yoy), sementara Belanja Hibah terkoreksi tajam 63,39% (yoy) seiring berakhirnya alokasi hibah Pilkada. Belanja Modal tercatat Rp774,51miliar atau 21,79% dari pagu, naik 13,26% (yoy), didominasi oleh infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang menyerap 70,35% dari total belanja modal.

Realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp12.520,86 miliar atau 39,54% dari target, mengalami kontraksi 3,97% (yoy). Penurunan terutama disebabkan oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berkontraksi 5,78% (yoy) dan Transfer Antar Daerah yang turun tajam 77,89% (yoy) akibat penerapan opsen. Meski demikian, PAD tumbuh solid 19,37% (yoy) menjadi Rp3.040,21 miliar, dengan kinerja terbaik pada Retribusi Daerah (54,00% yoy) dan Lain-lain PAD yang Sah (170,56% yoy). *Local Tax Ratio* meningkat tipis menjadi 0,98%, namun masih jauh di bawah ambang ideal 3%.

Pendapatan Transfer masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp9.318,87 miliar atau 74,43% dari total pendapatan, meski porsinya turun dari 75,85% pada 2024. Kenaikan kontribusi PAD mendorong perbaikan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dari 0,20 pada 2024 menjadi 0,24 pada 2025, namun masih masuk dalam ke kategori *Belum Mandiri*. Kemudian, rasio ketergantungan fiskal masih tinggi di angka 0,73, dengan disparitas antar daerah yang mencolok di mana Provinsi Lampung relatif lebih mandiri (rasio 0,57) dibandingkan kabupaten lain.

Keseimbangan umum dan primer APBD tetap mencatat surplus, masing-masing Rp1.889,82 miliar dan Rp1.901,41 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Surplus ini mencerminkan *stance* fiskal kontraktif dengan ruang *buffer* yang makin terbatas akibat penurunan pendapatan transfer. Sementara itu, pembiayaan netto turun signifikan 50,23% (yoy), dipengaruhi oleh berkurangnya penggunaan SiLPA TAYL dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan. Struktur pembiayaan perlu

diarahkan lebih strategis melalui penyertaan modal BUMD dan diversifikasi sumber pembiayaan, guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung pada Triwulan II 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendorong perekonomian lokal melalui stimulus pada sisi permintaan. Namun, upaya tersebut masih perlu diimbangi dengan dukungan pada sisi penawaran, khususnya mendorong produksi bahan pangan lokal terintegrasi pemenuhan MBG.

Hingga akhir Juni 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung telah menjangkau **371.814** penerima manfaat. Angka tersebut sekitar 18% dari total target 2.021.981 orang. Penerima manfaat tersebut tersebar pada 3.079 kelompok penerima (sekolah) dengan dukungan 293 *supplier*. Program ini telah hadir di 13 kabupaten/kota, kecuali Lampung Barat dan Pesisir Barat, serta didukung oleh 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencapai 4% dari target 957 unit. Capaian ini mencerminkan langkah awal yang positif, meskipun masih diperlukan perluasan jangkauan agar manfaat program merata di seluruh wilayah Lampung.

Dampak awal implementasi MBG terhadap ekonomi Lampung menunjukkan dinamika beragam terhadap sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perubahan harga. Pada subsektor pertanian dan peternakan, keterbatasan data dan baru 6 bulan berjalannya realisasi program belum dapat menunjukkan dampaknya terhadap nilai tukar petani (NTP). Perubahan NTP dalam 6 bulan ini masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti panen gabah, peningkatan konsumsi Idulfitri, serta kebutuhan hewan kurban saat Iduladha sehingga belum dapat mencerminkan dampak

realisasi program MBG. Di sektor perikanan, efek program juga relatif lemah, sedangkan pada inflasi umum belum terlihat terpengaruh signifikan, kecuali pada harga komoditas tertentu yang sangat relevan seperti beras dan minyak goreng. Temuan ini menegaskan bahwa program MBG dalam jangka pendek ini masih pada tahap sebagai stimulan konsumsi, belum menjadi stimulan produksi bahan pangan.

Optimalisasi peran MBG terhadap perekonomian Lampung membutuhkan strategi kebijakan yang lebih terintegrasi dengan rantai pasok lokal. Perlu adanya mekanisme yang menghubungkan antara peningkatan sisi konsumsi oleh dapur MBG dengan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal agar program tidak hanya menjadi stimulus permintaan, tetapi juga motor penguatan ekonomi daerah. Pendekatan kemitraan dengan koperasi desa merah putih, gabungan kelompok tani, dan BUMDes disertai kebijakan stabilisasi harga dan efisiensi distribusi akan memperluas manfaat program baik untuk meningkatkan gizi maupun memperkuat kesejahteraan produsen lokal.

Secara keseluruhan, MBG memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendorong ekonomi daerah, namun masih menghadapi tantangan sisi operasional. Hambatan yang masih ditemukan meliputi cakupan program yang belum merata, koordinasi lintas sektor yang masih cukup terbatas, hingga kendala logistik dan distribusi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain itu, risiko penggunaan pangan olahan dan *hygiene* masih perlu terus diantisipasi, masih lemahnya rantai pasok lokal, serta keterbatasan kapasitas fiskal perlu dikelola dengan hati-hati. Dengan penguatan strategi implementasi, sinergi antar pemangku kepentingan, dan fokus pada keberlanjutan, diharapkan MBG dapat menjadi instrumen strategis yang tidak hanya meningkatkan ketahanan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi Lampung.

Potensi Kerja Sama Pembiayaan BDLH Untuk Mendukung Pengembangan EBT Di Lampung

Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar dan beragam—mulai dari panas bumi, surya, biomassa, hingga hidro dan mikrohidro—namun realisasi pemanfaatannya masih jauh di bawah kapasitas teknis yang tersedia. Peluang kerja sama pembiayaan dengan BPDH dapat menjadi opsi untuk menutup kesenjangan tersebut melalui instrumen hibah, dana bergulir, blended finance, dan pembiayaan karbon yang dapat memperkuat kelayakan proyek serta mendorong percepatan transisi energi di Lampung.

Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar dan beragam, mencakup panas bumi, surya, biomassa, serta hidro dan mikrohidro. Potensi ini berpeluang menjadikan Lampung sebagai pusat energi bersih Sumatera sekaligus mendukung bauran energi nasional 31% pada 2050 dan visi Lampung 2045. Namun, realisasi pemanfaatan masih terbatas dengan kapasitas terpasang jauh di bawah potensi teknis, sehingga menimbulkan kesenjangan antara peluang dan implementasi.

Hambatan utama terletak pada aspek pembiayaan. Proyek EBT membutuhkan modal besar, berisiko tinggi, dan berorientasi jangka panjang, sehingga kurang menarik bagi lembaga keuangan komersial. Dalam konteks ini, BPDH berperan strategis menyediakan instrumen seperti hibah, dana bergulir, *blended finance*, *carbon financing*, serta skema inovatif lain untuk menutup gap pendanaan dan meningkatkan kelayakan finansial proyek.

Kerja sama potensial antara BPDH dan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi pembentukan kerangka PKS, optimalisasi pemanfaatan dana hijau untuk UMKM energi dan proyek percontohan, serta integrasi program EBT dalam RKPD, APBD, dan RPJMD.

Dukungan insentif fiskal daerah, seperti pembebasan pajak, subsidi bunga pinjaman, dan *top-up feed-in tariff*, juga dapat memperkuat daya tarik investasi. Selain itu, Lampung dapat menyusun *Roadmap* Keuangan Hijau bersama OJK dan Kemenkeu serta membentuk forum investor hijau untuk mendorong partisipasi swasta.

Policy Responses

Berdasarkan kondisi makroekonomi dan fiskal di Lampung Triwulan II 2025, terdapat beberapa *policy responses* berikut:

1) Rekomendasi Terkait Makroekonomi dan Fiskal

- a) Untuk memitigasi risiko dampak penerapan Tarif AS sebesar 19% terhadap Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Perdagangan Luar Negeri, serta Pemerintah Daerah Lampung perlu secara aktif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan tarif AS yang lebih tinggi, misalnya Brasil dan Vietnam. Upaya ini menjadi penting bagi komoditas unggulan ekspor Lampung seperti crude palm oil (CPO) dan turunannya, kopi, teh, kakao, serta olahan nanas. Strategi yang dapat ditempuh meliputi fasilitasi perjanjian dagang, promosi produk unggulan daerah, serta penguatan diplomasi ekonomi.
- b) Untuk mitigasi penurunan Bea Keluar akibat melemahnya permintaan global terhadap batubara, Kementerian ESDM dan DJBC agar memperbaharui aturan pengenaan Bea Keluar bagi komoditas batu bara, dengan mitigasi risiko berupa *selective adjustment* saat harga batubara acuan menyentuh level tertentu.
- c) Memitigasi penurunan Bea Impor akibat pembatasan impor jagung pakan ternak serta beras dan gula konsumsi, DJBC

bersama dengan Badan Pangan Nasional dapat mengkaji kembali alternatif lain dari pembatasan yaitu melalui penerapan skema tarif terhadap komoditas strategis tersebut, dengan tetap memprioritaskan stabilitas harga dan menjaga perlindungan bagi petani.

- d) Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi Pajak Asli Daerah (PAD) perlu diawali dengan peningkatan kualitas layanan dan pengendalian kebocoran penerimaan sebelum penyesuaian tarif. Publik cenderung menolak kenaikan mendadak, namun menerima inovasi digital yang meningkatkan transparansi dan standar pelayanan minimum yang terpenuhi dengan baik.

2) Rekomendasi Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis

- a) Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap kriteria dan prioritas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang penting untuk memastikan penyaluran semakin proporsional dan tepat sasaran, terutama dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang memiliki kebutuhan gizi paling kritis.
- b) BGN, Kementerian Sosial, serta Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota diharapkan memperkuat koordinasi dan integrasi MBG dengan berbagai program kesehatan dan jaring pengaman sosial yang telah berjalan, seperti Program Percepatan Stunting (PPS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sinergi ini akan mendorong terciptanya efek berganda yang lebih kuat dalam meningkatkan status gizi masyarakat



sekaligus memperbaiki kesejahteraan keluarga prasejahtera.

- c) Pemerintah Desa, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM berperan strategis dalam mendorong keterlibatan BUMDes, koperasi desa Merah Putih, serta UMKM lokal agar dapat menjadi mitra utama penyedia bahan pangan bagi MBG.

3) **Rekomendasi Terkait Potensi Kerja sama Pembiayaan Program EBT Lampung**

- a) Sinergi antara BPD LH dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat melalui kerangka kerja sama resmi, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), disertai forum koordinasi rutin untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program hijau di Lampung.
- b) Pemanfaatan dana bergulir dan hibah BPD LH harus dioptimalkan, misalnya melalui program kredit energi bagi UMKM atau hibah untuk proyek

percontohan PLTS desa, dengan target serapan dana yang jelas setiap tahun.

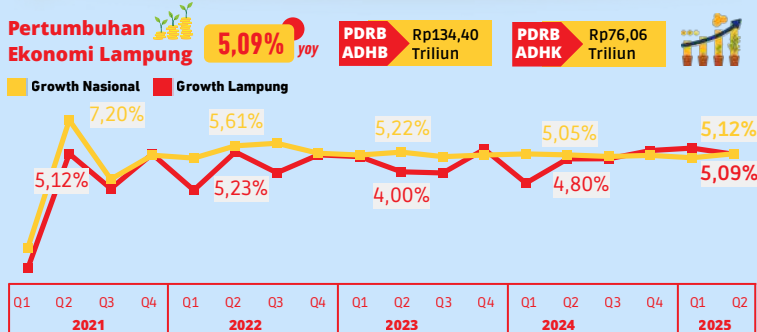
- c) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pembebasan BPHTB, subsidi bunga pinjaman, atau tambahan *feed-in tariff* dari APBD, untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor EBT.
- d) Untuk memastikan efektivitas kebijakan, diperlukan monitoring dan evaluasi berbasis indikator hijau yang lebih komprehensif, seperti kapasitas EBT terpasang, penurunan emisi, jumlah rumah tangga pengguna PLTS, dan tenaga kerja sektor EBT, yang dilaporkan secara berkala melalui KFR dan/atau laporan daerah atas capaian RPJMD tahunan.

Terdapat rekomendasi lainnya yang dapat diakses pada bab IV kesimpulan dan rekomendasi.



Indikator Makro Ekonomi
dan Kesejahteraan

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (yoy)



Ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II 2025 tumbuh 5,09% (yoy), capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir setelah periode lonjakan *rebound* pada 2021 dan 2022 akibat pandemi Covid-19. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi ke-3 di Pulau Sumatera.



Kontribusi **18,52%**
**INDUSTRI
PENGOLAHAN**
9,97% (yoy) ↑



Kontribusi **54,09%**
**EKSPOR BARANG DAN
JASA**
7,50% (yoy) ↑



Distribusi PDRB Lampung
di REGIONAL SUMATERA

10,30%

Pada Triwulan II 2025, Industri Pengolahan dan Ekspor Barang-Jasa mencatat pertumbuhan tertinggi, mencerminkan dinamika positif sektor hulu dan daya saing produk Lampung di pasar global. Industri Pengolahan didorong oleh stabilitas kinerja makanan-minuman seiring tingginya permintaan domestik, sementara ekspor menguat berkat komoditas unggulan seperti kopi robusta, *Crude Palm Oil* (CPO), dan rempah-rempah.

Struktur PDRB Triwulan II 2025 (yoy)

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi Produksi



Kontribusi **28,51%**
PERTANIAN
1,88% (yoy) ↑

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi tumbuh seiring peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan baik perkebunan, peternakan, dan perikanan.



Kontribusi **18,52%**
**INDUSTRI
PENGOLAHAN**
9,97% (yoy) ↑

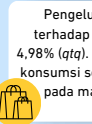
Kinerja LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan ditopang oleh aktivitas industri makanan dan minuman dan meningkatnya permintaan, khususnya dari pasar domestik



Kontribusi **14,25%**
PERDAGANGAN
7,34% (yoy) ↑

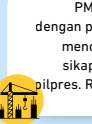
Kinerja Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan tumbuh seiring meningkatnya aktivitas perdagangan eceran pada momentum libur nasional, serta didukung oleh penguatan ekspor

Penopang Perekonomian Lampung dari sisi pengeluaran



Pengeluaran Konsumsi RT berkontribusi 62,41% terhadap PDRB Lampung, tumbuh 4,67% (yoy) dan 4,98% (qta). Pertumbuhan ditopang oleh peningkatan konsumsi selama libur panjang nasional, khususnya pada makanan-minuman, rekreasi, transportasi, serta akomodasi dan restoran.

Kontribusi **62,41%**
KONSUMSI RT
4,67% (yoy) ↑

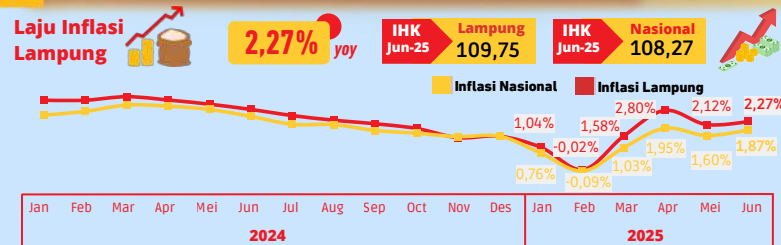


PMTB berkontribusi 29,22% terhadap PDRB dengan pertumbuhan 5,31% (yoy) dan 5,54% (qta), mencerminkan pulihnya iklim investasi pasca sikap *wait and see* investor akibat pilkada dan pilpres. Realisasi PMDN dan PMA Triwulan II 2025 tercatat tumbuh 84,73% (yoy)

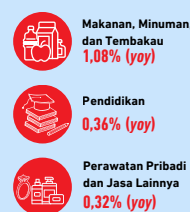
Kontribusi **29,22%**
PMTB
5,31% (yoy) ↑



Perkembangan Inflasi Lampung (yoy)



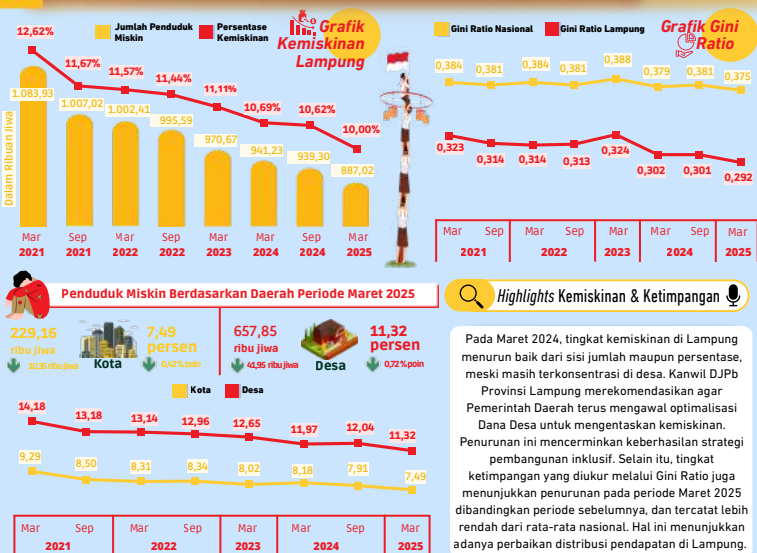
Kelompok dengan Andil Terbesar terhadap Inflasi



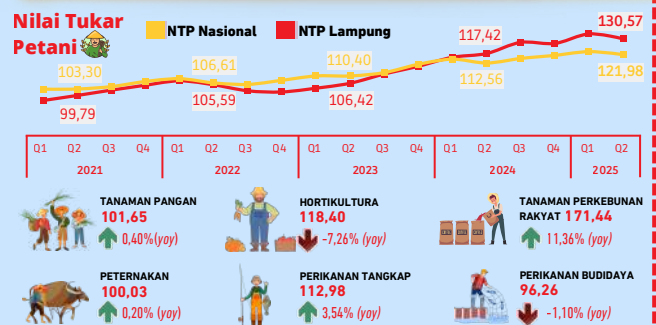
Highlights Inflasi Lampung Triwulan II 2025

Inflasi di Lampung triwulan II 2025 tetap terkendali dan menunjukkan kenaikan dibandingkan Triwulan II 2025, dengan inflasi tahunan Juni 2025 sebesar 2,27% (yoy), di atas rata-rata nasional sebesar 1,87% (yoy). Tekanan inflasi bersifat musiman dan umumnya meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta awal tahun ajaran baru, dengan kelompok makanan dan pendidikan menjadi kontributor utama. Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Lampung menerapkan strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Kemiskinan dan Ketimpangan

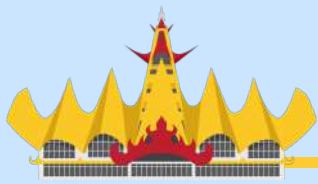


Nilai Tukar Petani (NTP)



Highlights Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung Triwulan II 2025

Pada triwulan II 2025, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung mencapai 130,57, tumbuh 6,54% (yoy), lebih tinggi dari nasional namun masih di bawah rata-rata Sumatera. Dukungan terhadap sektor pertanian di Lampung diarahkan untuk memperkuat NTP dan mewujudkan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Fokus utama mencakup integrasi pertanian dengan industri pengolahan, penguatan akses pasar, serta efisiensi rantai pasok agar produk pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari efisiensi distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, hingga pengembangan bibit unggul padi tahan hama.



Kinerja Fiskal Provinsi Lampung

DASHBOARD MAKRO-FISKAL PROVINSI LAMPUNG



Realisasi Pendapatan Negara



Realisasi Pendapatan Negara di Lampung

Pada Triwulan II 2025, Pendapatan Negara tumbuh 21,34% (yoy) dengan realisasi Rp5.083,69 miliar atau 45,71% dari target. Kinerja ini terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor unggulan Lampung yang meningkatkan penerimaan Bea Keluar hingga 658,94% (yoy)

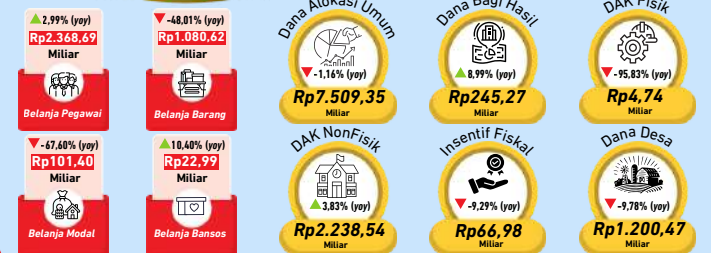


Realisasi Belanja Negara

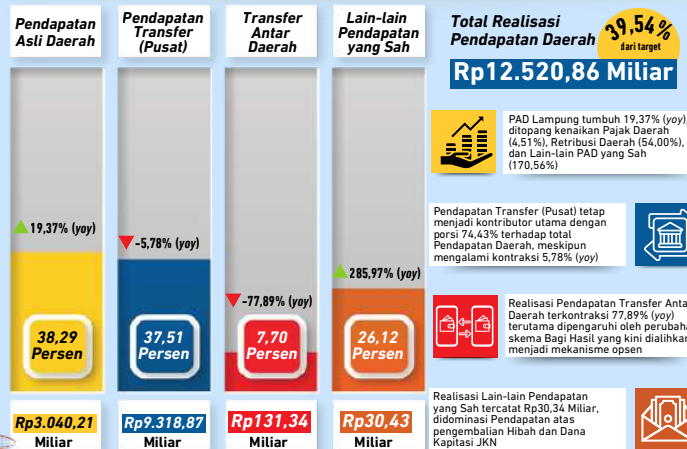


Realisasi Belanja Negara di Lampung

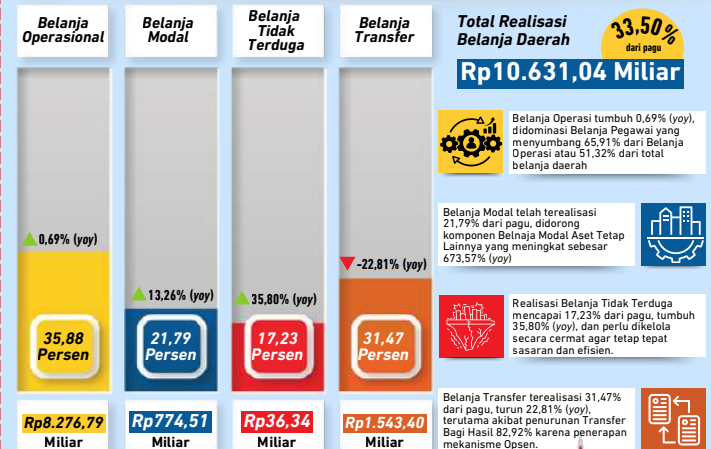
Pada Triwulan II 2025, Belanja Negara di Lampung terkonsentrasi 8,45% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang turun 24,16% (yoy) sejalan dengan efisiensi anggaran pada belanja barang dan modal, serta kontraksi Transfer ke Daerah sebesar 2,01% (yoy)



Realisasi Pendapatan Daerah

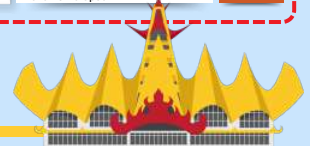


Realisasi Belanja Daerah



Sumber data: Kementerian Keuangan

Snapshot Analisis Tematik



Energi Baru Terbarukan (EBT) di Lampung

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Lampung



Highlights Pengembangan EBT di Lampung

Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar dan beragam mulai dari panas bumi, surya, biomassa, hingga hidro dan mikrohidro namun realisasi pemanfaatannya masih jauh di bawah kapasitas teknis yang tersedia. Peluang kerja sama pembiayaan dengan BPDLH menjadi katalis untuk menutup kesenjangan tersebut melalui instrumen hibah, dana bergulir, blended finance, dan pembiayaan karbon yang dapat memperkuat kelayakan proyek serta mendorong percepatan transisi energi di Lampung

Tantangan



Proyek EBT membutuhkan modal besar, berisiko tinggi, dan berorientasi jangka panjang, sehingga kurang menarik bagi lembaga keuangan komersial

Peran BPDLH



BPDLH berperan strategis menghimpun dan menyalurkan dana publik maupun bantuan internasional untuk mendukung proyek hijau, termasuk EBT di Lampung, serta menjadi katalis pendanaan transisi energi daerah.

Instrumen Pembiayaan BPDLH



Analisis Makan Bergizi Gratis (MBG)

Implementasi Program MBG di Provinsi Lampung



Highlights Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG di Lampung semester I 2025 berhasil menjangkau 371.814 penerima manfaat. Meski masih terdapat tantangan terkait cakupan, distribusi, dan integrasi dengan produsen lokal, program ini tetap menunjukkan potensi besar. Dengan penguatan sinergi pusat dan daerah, kemitraan dengan UMKM/koperasi, serta strategi stabilisasi harga dan distribusi pangan lokal, MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendorong kesejahteraan produsen daerah secara berkelanjutan

Analisis Dampak Program MBG

Secara statistik, hasil regresi awal menunjukkan subsektor pertanian dan peternakan signifikan dengan R-squared tinggi namun berkoefisien negatif, sementara peternakan dan inflasi umum tidak signifikan. Hal ini memberi sinyal adanya keterkaitan MBG dengan harga dari kegiatan produksi, meski pola hubungan masih bias faktor musiman. Karena itu, kesimpulan kausalitas memerlukan validasi lebih lanjut dengan data jangka panjang dan variabel kontrol tambahan.



Halaman ini sengaja dikosongkan

SUPLEMEN 1

A Glimpse of Lampung



Provinsi Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dikenal sebagai gerbang Sumatera dengan posisi strategis yang menghubungkan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni.

Secara administratif, Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota, dengan Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi. Luas wilayah Lampung mencapai 33.575,41 km², sebagian besar terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan kawasan pesisir.

Secara ekonomi, Lampung merupakan salah satu penghasil utama komoditas pertanian, seperti kopi dan singkong, yang menjadi bagian penting dari ekspor Indonesia.

BAB 1

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

“ Melalui #UangKita untuk berbagai stimulus ekonomi, setiap keluarga mendapat kesempatan yang lebih adil untuk kesejahteraan ”
-@ditjenperbendaharaan-



BAB 1 ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI

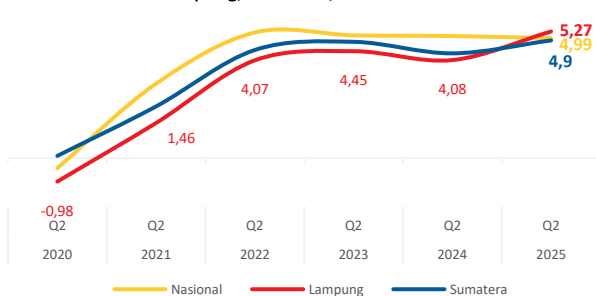
Indikator makroekonomi membantu melihat arah dan kondisi ekonomi daerah. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa indikator makro ekonomi, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Suku Bunga; Inflasi; dan Nilai Tukar.

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, data yang digunakan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) guna memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan C-to-C Lampung, Sumatera, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

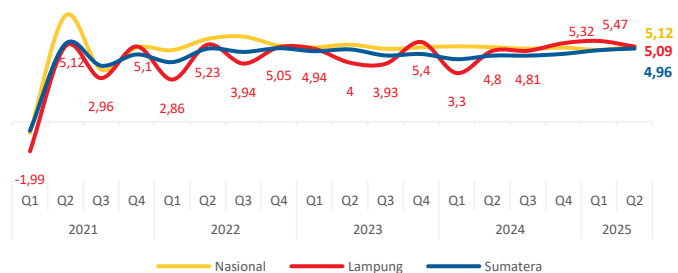
Secara *Cumulative-to-Cumulative* (ctc), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,27%, meningkat 1,19 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tumbuh 4,08%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,99% (ctc) dan Sumatera 4,90% (ctc). Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Lampung kini berada di atas rata-rata nasional dan Sumatera, setelah pada periode sebelumnya cenderung berada di bawah keduanya, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.1.

Pertumbuhan ekonomi Lampung didorong oleh sektor Jasa Lainnya yang tumbuh 9,41% (ctc) seiring meningkatnya kunjungan wisata nusantara dengan tujuan Lampung. Sektor industri pengolahan

mencatat pertumbuhan 9,37% (ctc) didukung kinerja industri makanan dan minuman, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 7,85% (ctc) sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya pada momen libur panjang nasional seperti Idulfitri, Hari Buruh, Kenaikan Isa Almasih, Waisak, dan Iduladha. Namun demikian, pertumbuhan ini tertahan oleh kontraksi pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar -0,24% (ctc) serta sektor administrasi pemerintahan -0,18% (ctc) yang dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung terutama ditopang oleh ekspor yang tumbuh 10,06% (ctc) seiring meningkatnya volume dan nilai ekspor, khususnya komoditas lemak dan minyak hewan dan kopi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) juga tumbuh solid sebesar 4,86% (ctc), didorong peningkatan belanja selama momen libur panjang nasional. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi -1,88% (ctc) akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025 (% yoy)



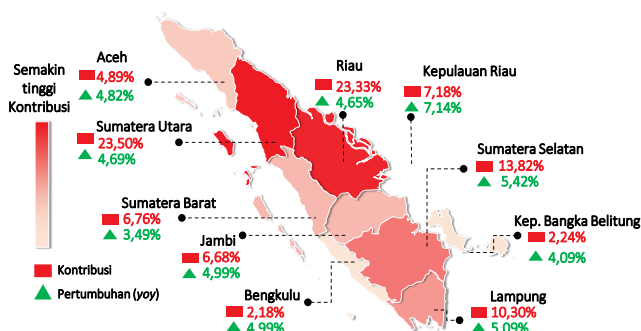
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara *year-on-year* (yoy), pada triwulan II 2025 perekonomian Lampung tumbuh 5,09%, yang merupakan capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir setelah periode lonjakan *rebound* pada 2021 dan 2022 akibat pandemi Covid-19. Kinerja ini melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,96%, meskipun masih sedikit di bawah capaian nasional yang mencapai 5,12%, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.2.



Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II 2025 ditopang oleh kinerja sejumlah lapangan usaha, terutama industri pengolahan yang tumbuh 9,97% (yoy) seiring meningkatnya produksi makanan dan minuman, disusul sektor jasa lainnya (9,18% yoy) serta penyediaan akomodasi dan makan-minum (8,06% yoy). Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 7,50% (yoy), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat 5,31% (yoy).

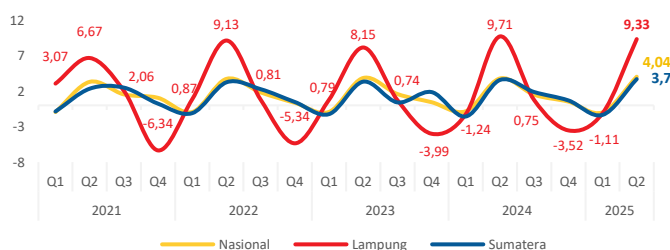
Gambar 1.1. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II Tahun 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) tertinggi ketiga di Sumatera dengan kontribusi 10,30%, mencerminkan resiliensi dan momentum pemulihan yang kuat. Ke depan, pola musiman perlu diantisipasi, terutama di tengah ketidakpastian global akibat perang dagang yang berpotensi menekan kinerja ekspor.

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung, Sumatera, dan Nasional Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025 (% qdq)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

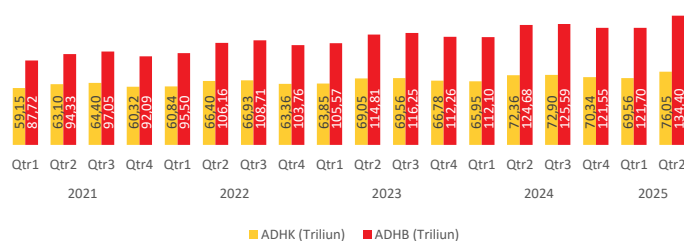
Secara *quarter-to-quarter (qdq)*, ekonomi Lampung tumbuh 9,33%, melampaui capaian Sumatera (3,70%) maupun nasional (4,04%), serta menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di nasional setelah Papua Tengah (14,15%). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan yang meningkat 29,26% berkat naiknya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya, sektor Jasa Lainnya tumbuh 9,95%, sedangkan Konstruksi naik 7,38%, mencerminkan penguatan daya dorong ekonomi Lampung. Namun, tidak semua sektor bergerak positif, ada yang berkontraksi, yakni Real Estat (-2,52%) akibat penurunan aktivitas penjualan dan penyewaan properti, diikuti Informasi dan Komunikasi (-1,97%), Jasa Pendidikan (-0,21%), serta Pengadaan Listrik dan Gas (-0,09%). Sementara itu, dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mencatat pertumbuhan positif, dengan kontribusi tertinggi berasal dari Konsumsi Pemerintah yang naik 16,65%, seiring meningkatnya realisasi belanja barang dan modal setelah pada triwulan sebelumnya belum terserap optimal.

1.1.1.2 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Pada Triwulan II 2025, PDRB Lampung tercatat sebesar Rp134,40 triliun (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) dan Rp76,06 triliun (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK), meningkat signifikan dari Rp59,15 triliun pada Triwulan I 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga, tetapi juga didorong oleh peningkatan volume output. Artinya, pertumbuhan ekonomi Lampung berlangsung secara lebih berkualitas dan berkelanjutan, tidak sekadar nominal.

Grafik 1.4. Perkembangan Nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB Lampung Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

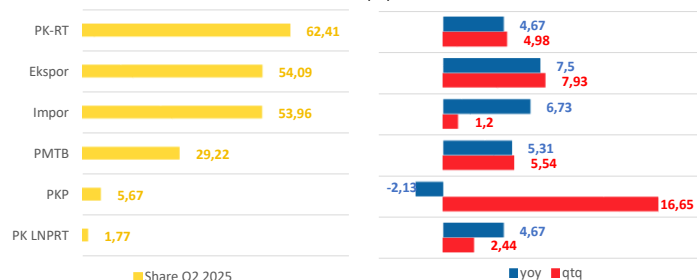
PDRB berdasarkan pengeluaran mengukur aktivitas ekonomi dari penjumlahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengguna akhir. Pada triwulan II 2025, struktur PDRB Lampung dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Konsumsi





Rumah Tangga dengan kontribusi terbesar sebesar 62,41%. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan, namun juga menunjukkan potensi risiko apabila daya beli masyarakat mengalami tekanan.

Grafik 1.5. *Share dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran Triwulan II 2025 (%)*



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pada Triwulan II 2025, PK-RT berkontribusi sebesar 62,41% terhadap PDRB Lampung, dengan pertumbuhan 4,67% (yoy) dan 4,98% (qtq). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja rumah tangga selama momen libur panjang nasional yang mendorong peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, rekreasi, transportasi serta akomodasi dan restoran.

b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Pada Triwulan II 2025, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) berkontribusi sebesar 1,77% terhadap PDRB Lampung dan tumbuh 4,67% (yoy) dan 2,44% (qtq). Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi listrik kategori sosial serta aktivitas keagamaan pada hari besar.

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi sebesar 2,13% (yoy) akibat kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Di sisi lain, PKP justru tumbuh 16,65% (qtq), didorong oleh percepatan realisasi belanja APBN dan APBD setelah pada triwulan sebelumnya penyerapannya belum optimal. PKP memberikan kontribusi 5,67% terhadap perekonomian

Lampung, sehingga peran pemerintah masih signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi di tengah pengetatan anggaran.

d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 29,22% terhadap PDRB, mencerminkan peran investasi yang cukup signifikan dalam struktur ekonomi daerah. PMTB tumbuh 5,31% (yoy) dan 5,54% (qtq), menunjukkan iklim investasi yang mulai pulih setelah sebelumnya sempat tertekan akibat sikap *wait and see* investor pada masa pilkada dan pilpres. Bahkan, realisasi PMDN dan PMA Triwulan II 2025 tercatat meningkat tajam, yakni tumbuh 84,73% (yoy).

e. Ekspor / Impor Barang dan Jasa

Pada Triwulan II 2025, Lampung mencatatkan net ekspor dengan kontribusi ekspor sebesar 54,09% dan impor 53,96%. Kinerja ekspor tumbuh 7,50% (yoy) dan 7,93% (qtq), terutama ditopang oleh peningkatan ekspor komoditas lemak dan minyak hewan serta kopi. Sementara itu, impor meningkat 6,73% (yoy) dan 1,20% (qtq), dengan komoditas utama berasal dari migas, pupuk, serta ampas atau sisa industri makanan.

1.1.1.3 Nominal dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

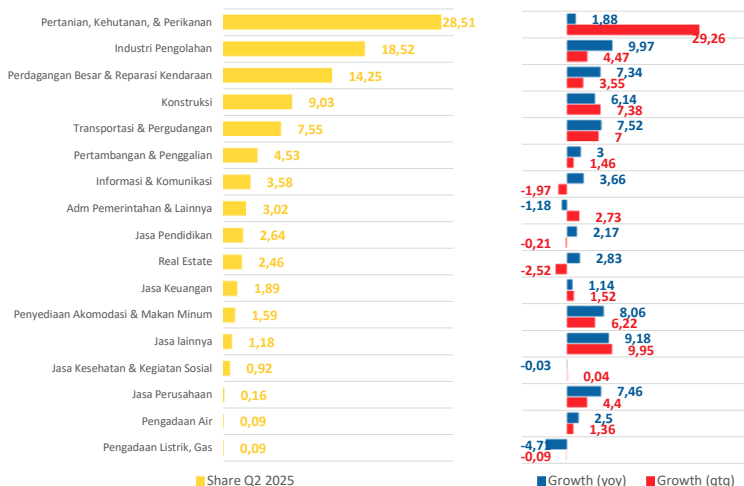
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha (LU) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dari kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Nilai tambah ini mencerminkan kontribusi masing-masing LU terhadap perekonomian daerah. Pada Triwulan II 2025, sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan konsisten menjadi *leading sector* Lapangan Usaha (LU) dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Lampung, yaitu sebesar 28,51% pada Triwulan II 2025. Komponen LU lain dengan *share* kontribusi terbesar selanjutnya adalah Industri Pengolahan (18,52%), Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan (14,25%), serta Konstruksi (9,27%).





Grafik 1.6. Share dan Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan II 2025 (%)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung pada Triwulan II 2025 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan kontribusi mencapai 28,51%. Sektor ini tumbuh 1,88% (yoy) dan 29,26% (qtq), seiring dengan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan baik perkebunan semusim maupun tahunan, peternakan, dan perikanan.

b. Industri Pengolahan

Pada Triwulan II 2025, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 18,52% terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung dan mencatat pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 9,97% (yoy) dan tumbuh 4,47% (qtq) secara triwulanan. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh aktivitas industri makanan dan minuman yang tetap stabil dan meningkat seiring tingginya permintaan, khususnya dari pasar domestik.

c. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan

Pada Triwulan II 2025, sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan berkontribusi sebesar 14,25% terhadap total PDRB Lampung, dengan pertumbuhan 7,34% (yoy) dan 3,55% (qtq). Peningkatan kinerja sektor ini terutama didorong oleh menguatnya aktivitas perdagangan eceran seiring momentum libur

panjang nasional, serta meningkatnya ekspor barang ke luar negeri.

d. Konstruksi

Lapangan Usaha Konstruksi menyumbang 9,03% terhadap PDRB Lampung pada Triwulan II 2025, tumbuh 6,14% (yoy) dan 7,38% (qtq) seiring meningkatnya realisasi pengadaan semen serta pembangunan dan rehabilitasi jalan sebagai bagian dari Program Terbaik Hasil Cepat (PTHC) Pemerintah Lampung.

1.1.1.4 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

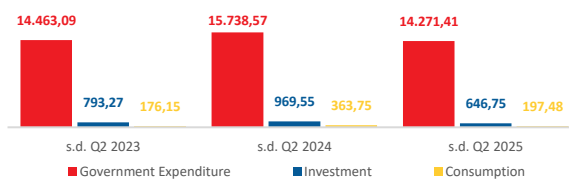
Pengeluaran pemerintah memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengaruhnya terhadap sektor-sektor produktif. Dalam teori Keynesian, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (NX), sebagaimana dirumuskan dalam persamaan:

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana Y mewakili pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan NX (X-M) adalah net ekspor.

Di Provinsi Lampung, realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD menunjukkan tren penurunan. Hingga Triwulan II 2025, total belanja konsolidasian tercatat sebesar Rp15.115,64 miliar atau sekitar 5,90% dari PDRB Lampung (Rp256.097,35 miliar), turun 11,46% dibandingkan Triwulan II 2024 (Rp17.071,86 miliar) dan lebih rendah 2,05% dibandingkan Triwulan II 2023 (Rp15.432,51 miliar). Penurunan ini mencerminkan melemahnya peran fiskal dalam menopang aktivitas ekonomi daerah secara langsung.

Grafik 1.7. Kontribusi Fiskal terhadap sektor riil ekonomi Lampung s.d. Triwulan II Periode 2023 – 2025 (Rp Miliar)



Sumber: ALCo Regional Lampung, 2025 (diolah)





Konsolidasi belanja pemerintah di Lampung mencerminkan kontribusi nyata terhadap berbagai komponen dalam pendekatan pengeluaran. Pada komponen pengeluaran pemerintah (G), belanja pegawai, barang dan jasa, bantuan sosial, belanja lain-lain, serta transfer ke daerah menjadi porsi dominan dengan realisasi mencapai Rp14.271,41 miliar atau 94,41% dari total belanja konsolidasi, yang menunjukkan peran strategis pemerintah dalam menjaga operasional sektor publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pada komponen investasi (I), belanja modal berkontribusi sebesar Rp646,75 miliar atau 4,28% dari total belanja, yang meskipun porsinya relatif kecil, tetap krusial dalam memperkuat sektor produktif dan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, pada komponen konsumsi pemerintah (C), belanja hibah dan bantuan sosial mencapai Rp197,48 miliar atau 1,31% dari total belanja konsolidasi, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung daya tahan masyarakat melalui berbagai program sosial.

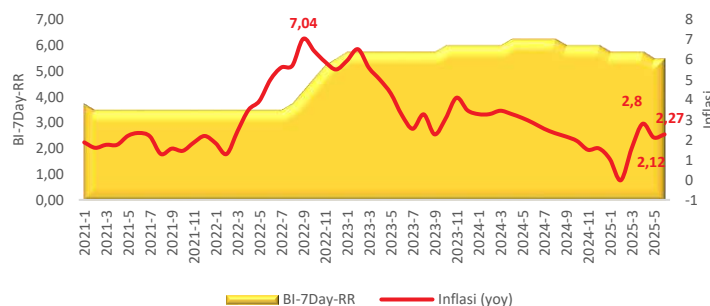
1.1.2 Suku Bunga

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) adalah instrumen operasi pasar terbuka Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memperkuat transmisi kebijakan moneter, dan mengatur jumlah uang beredar. Kenaikan suku bunga menekan permintaan kredit dan konsumsi, sementara penurunannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski suku bunga meningkat, Bank Indonesia tetap menjaga penyaluran kredit melalui kebijakan makroprudensial dengan insentif bagi sektor prioritas, yang penetapannya dilakukan bersama pemerintah guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sepanjang periode 2021–2024, BI-Rate bergerak mengikuti dinamika inflasi dan tekanan eksternal. Pada awalnya, suku bunga dipertahankan rendah (sekitar 3,50%) guna mendukung pemulihan pasca pandemi. Namun, lonjakan inflasi pada paruh kedua 2022 hingga awal 2023 mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan BI-Rate secara bertahap hingga

mencapai 5,75% pada awal 2023. Sepanjang 2024, BI-Rate relatif stabil di kisaran 6,00 – 6,25% sebagai bagian dari strategi kebijakan moneter yang berhati-hati di tengah tren penurunan inflasi.

Grafik 1.8. Perkembangan BI 7-Day Repo Rate dan Inflasi Lampung Triwulan I 2021 – Triwulan II 2025



Sumber: Bank Indonesia dan BPS, 2025 (diolah)

Memasuki tahun 2025, fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada pengendalian inflasi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di tengah gejolak perang dagang dan geopolitik global. Pada awal tahun, BI-Rate berada di level 5,75%, kemudian diturunkan menjadi 5,50% pada Mei dan Juni 2025. Penurunan suku bunga ini dilakukan secara terukur sejalan dengan inflasi yang sempat berada di bawah 1% pada awal tahun. Namun demikian, pada triwulan II 2025 inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat kembali, mencapai 2,27% pada Juni setelah sebelumnya sempat berada di 2,12% pada April 2025.

Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan pada level relatif tinggi mencerminkan komitmen Bank Indonesia dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran target $2,5\% \pm 1\%$. Dengan demikian, langkah moneter pada 2025 bersifat *dual-track*, yaitu di satu sisi memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi melalui penurunan bertahap suku bunga, dan di sisi lain tetap menjaga kehati-hatian agar risiko kenaikan inflasi tidak mengganggu stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

1.1.3 Inflasi

1.1.3.1 Pergerakan Inflasi di Lampung

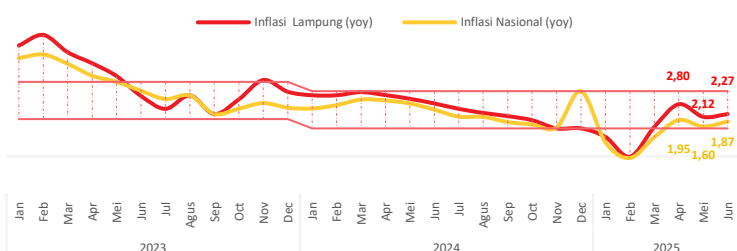
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang berdampak pada turunnya nilai uang serta daya beli masyarakat (The





Fed). Pada awal Triwulan II 2025, inflasi tahunan (yoy) di Lampung menunjukkan tren kenaikan dibandingkan Triwulan I 2025. Pola inflasi tahunan di Lampung relatif sejalan dengan tren nasional, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan akibat berbagai faktor serta komoditas yang diatur pemerintah.

Grafik 1.9. Perkembangan Inflasi Lampung Tahun 2023 – Triwulan II 2025 (% yoy)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Juni 2025, Provinsi Lampung mencatat inflasi tahunan sebesar 2,27% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,75. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Mesuji sebesar 2,52% (yoy) dengan IHK 113,54, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Metro sebesar 1,81% (yoy) dengan IHK 107,43. Di Kota Bandar Lampung, inflasi mencapai 2,21% (yoy) dengan IHK 108,45, sementara Kabupaten Lampung Timur mencatat inflasi sebesar 2,48% (yoy) dengan IHK 112,29.

Tabel 1.1. Rincian Andil Inflasi Bulan Juni 2025 per Komoditas (% yoy)

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi Jun 2025 (%yoy)	Inflasi Jun 2025 (%yoy)
Umum	2,27	2,27
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,08	3,28
Pakaian dan Alas Kaki	0,01	0,18
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,23	1,79
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	-0,02	-0,35
Kesehatan	0,05	2,17
Transportasi	0,06	0,57
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,05	-0,94
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,13	7,29
Pendidikan	0,36	5,59
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	1,29
Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya	0,32	5,10

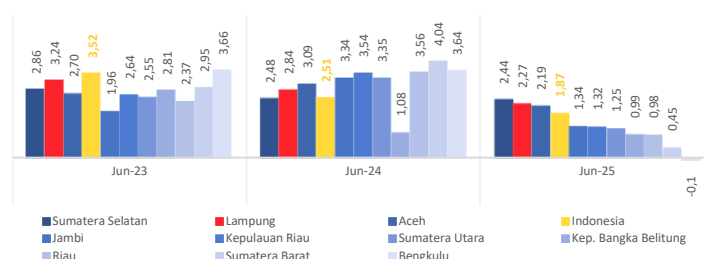
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Secara rinci, inflasi di Provinsi Lampung pada Juni 2025 dipicu oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran dalam Indeks Harga Konsumen (IHK). Tiga kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tersebut adalah: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,08%; kelompok pendidikan sebesar 0,36%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32%. Sementara itu, terdapat

kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan IHK yaitu Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,35% dan Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,94%.

Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi (yoy) pada Juni 2025 antara lain beras sebesar 0,36%, emas perhiasan sebesar 0,32%, biaya akademi/ perguruan tinggi 0,26%, bawang merah sebesar 0,25%, kopi bubuk 0,16%, minyak goreng sebesar 0,12%, dan sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,12%.

Grafik 1.10. Pergerakan Laju Inflasi Lampung, Provinsi di Regional Sumatera, dan Nasional (% yoy)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

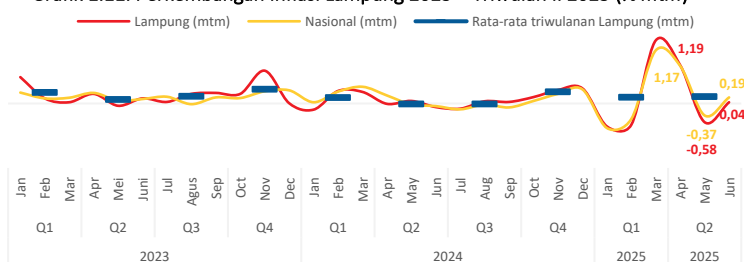
Pada Juni 2025, inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,27%, tertinggi kedua di Sumatera. Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan dalam batas aman, tekanan inflasi Lampung masih tergolong tinggi secara regional.

Rata-rata inflasi bulanan Lampung pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 0,22% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 0,20% (mtm). Inflasi tertinggi periode triwulan II 2025 pada bulan April sebesar 1,19% (mtm). Inflasi bulan April terutama disebabkan oleh berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pascabayar yang diberlakukan secara nasional pada triwulan I. Andil komoditas tarif listrik terhadap inflasi bulan April (mtm) sebesar 0,87%. Pola inflasi di Indonesia, termasuk Lampung, cenderung bersifat musiman, di mana momen-momen tertentu seperti Ramadan dan Idulfitri, libur Natal dan Tahun Baru, serta awal tahun ajaran baru sering mendorong kenaikan harga, khususnya pada kelompok makanan dan pendidikan. Setelah periode Idulfitri, tren inflasi bulanan (mtm) umumnya menunjukkan kecenderungan menurun seiring normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat.





Grafik 1.11. Perkembangan Inflasi Lampung 2023 – Triwulan II 2025 (% mtm)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Di triwulan II 2025, Provinsi Lampung mengalami deflasi pada bulan Mei sebesar 0,58% (*mtm*), yang didominasi oleh penurunan harga komoditas Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menyumbang andil 0,54%. Deflasi pada kelompok ini didominasi oleh bawang merah sebesar 0,25%, bawang putih sebesar 0,13%, cabai merah sebesar 0,11%, dan cabai rawit sebesar 0,08%. Deflasi pada bulan Mei disebabkan karena normalisasi harga pangan pasca Idulfitri oleh pemerintah terhadap komoditas *volatile foods*.

1.1.3.2 Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas harga mempermudah rumah tangga dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan keuangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap lonjakan harga.

Karakteristik inflasi di Indonesia dan Lampung cenderung dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan (*volatile food*) serta komoditas yang diatur pemerintah (*administered prices*). Oleh karena itu, menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali tidak cukup hanya dengan instrumen moneter. Diperlukan sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal, serta koordinasi lintas sektor yang mencakup aspek pasokan, distribusi, infrastruktur, struktur pasar, hingga pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Urgensi pengendalian inflasi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial dan politik. Inflasi yang tidak terkendali dapat meningkatkan angka kemiskinan,

memperburuk distribusi pendapatan, menurunkan kepercayaan dunia usaha, hingga mengganggu stabilitas politik. Dalam konteks ini, pengendalian inflasi menjadi komoditas politik yang mencerminkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan kebutuhan akan sinergi lintas sektor dan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bersama *counterparts* Kemenkeu Satu regional Lampung, BI, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

- Keterjangkauan Harga:** Upaya stabilisasi harga dilakukan melalui SPHP Bulog, operasi pasar, serta 10 kali pasar murah di berbagai kabupaten/kota di Lampung. Kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Peternakan Provinsi Lampung, Halaman Apel Kantor Pemerintah Provinsi, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, dan Polda Lampung. Pemerintah juga menyalurkan bansos dan subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga, diperkuat alokasi fiskal K/L dengan realisasi belanja hingga Triwulan II 2025 sebesar Rp60 juta (24,06% dari pagu), yang mendukung konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok rentan;
- Ketersediaan Pasokan:** Ketersediaan pangan dijaga melalui pemantauan stok dari gudang Bulog hingga pasar, perluasan Kartu Petani Berjaya (KPB), serta adopsi teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung UMKM. Dukungan fiskal terealisasi Rp65,80 miliar (15,68% dari pagu) hingga Triwulan II 2025, menunjukkan ruang penguatan ketahanan pangan masih luas;
- Kelancaran Distribusi:** Distribusi barang didukung pengaturan lalu lintas, peningkatan frekuensi penerbangan, serta optimalisasi Pelabuhan Panjang sebagai alternatif untuk





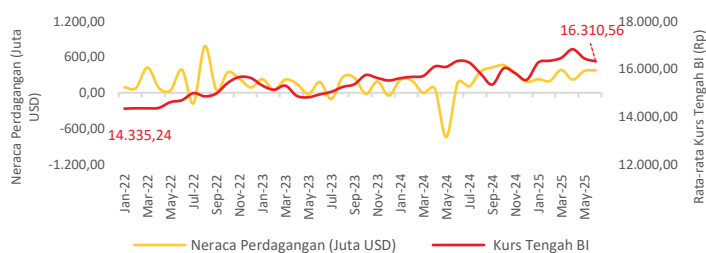
mendistribusikan kepadatan arus di Pelabuhan Bakauheni secara lebih merata dan efisien. Realisasi belanja K/L sebesar Rp980,18 juta (27,09% dari pagu) pada Triwulan II 2025 mencerminkan komitmen memperkuat konektivitas wilayah dan kelancaran arus barang;

- d. Komunikasi yang efektif: Stabilitas harga diperkuat melalui koordinasi TPID, rapat rutin pengendalian inflasi, serta penyampaian informasi pasokan dan harga melalui media resmi pemerintah dan saluran publik seperti Lampung Post, Antara, dan TVRI. Dukungan fiskal dengan realisasi Rp1,83 miliar (25,30% dari pagu) hingga Triwulan II 2025 menegaskan pentingnya komunikasi transparan dalam strategi pengendalian inflasi.

1.1.4 Nilai Tukar

Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan unit mata uang negara lain. Analisis nilai tukar penting untuk menilai dampaknya terhadap indikator makroekonomi, termasuk kinerja Neraca Perdagangan Luar Negeri di Provinsi Lampung.

Grafik 1.12. Tren Pergerakan rata-rata Kurs Tengah Rupiah terhadap US\$1 dan Neraca Perdagangan Luar Negeri Lampung (juta USD) per bulan Tahun 2022 – Triwulan II 2025

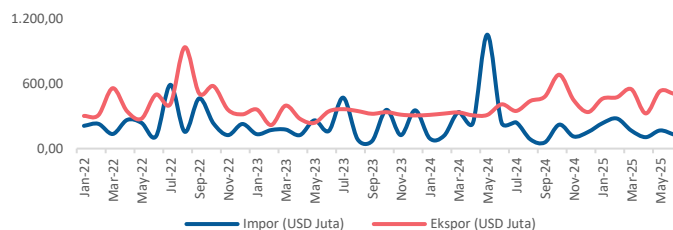


Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Pada periode Januari 2022 hingga Juni 2025, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mengalami tren depresiasi secara umum, bergerak dari Rp14.335,24 pada Januari 2022 hingga mencapai Rp16.310,56 pada Juni 2025. Kenaikan rata-rata nilai tukar menunjukkan pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS. Kondisi nilai tukar ini berpotensi meningkatkan daya saing ekspor, karena pelemahan Rupiah menjadikan harga produk domestik relatif lebih murah di pasar internasional. Namun, volatilitas nilai tukar juga dapat

menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama dalam hal pembiayaan impor dan fluktuasi biaya produksi.

Grafik 1.13. Tren Ekspor, Impor (juta USD) Lampung Tahun 2022 – Triwulan II 2025



Sumber: Bank Indonesia dan Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Kinerja ekspor Lampung pada Triwulan II 2025 berkontraksi 8,33% (*qta*), berlawanan dengan tren sebelumnya, namun secara tahunan masih tumbuh 32,41% (*yoy*) didukung capaian kumulatif semester I yang naik 42,46% (*yoy*). Meskipun tekanan terjadi akibat dominasi CPO (Crude Palm Oil) yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan permintaan pasar utama, capaian positif ini menunjukkan adanya peluang penguatan kinerja ekspor. Ke depan, diversifikasi produk dan hilirisasi CPO menjadi kunci agar ekspor Lampung lebih tahan terhadap gejolak eksternal serta mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Impor Lampung pada Triwulan II 2025 berkontraksi tajam sebesar 40,93% (*qta*) dan menurun 73,70% (*yoy*), seiring dengan penurunan di hampir seluruh kelompok komoditas. Impor bahan baku penolong turun 32,08% (*qta*) dan 29,64% (*yoy*), mencerminkan pelemahan aktivitas industri pengolahan. Penurunan paling dalam dari impor bahan bakar mineral dan produk turunannya, yang selama ini menjadi penopang utama kebutuhan energi dan industri, sehingga memperdalam kontraksi secara keseluruhan. Selain itu, impor bawang konsumsi merosot sangat tajam hingga 93,27% (*qta*) dan 99,32% (*yoy*). Impor barang modal juga melemah 35,56% (*qta*) dan 25,57% (*yoy*), menunjukkan tertahannya investasi baru maupun ekspansi kapasitas produksi. Secara keseluruhan, tren ini memberi sinyal perlambatan aktivitas ekonomi, meskipun di sisi lain turut menekan tekanan impor sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan daerah.





Pelemahan Rupiah pada Triwulan II 2025 membuat produk ekspor Lampung lebih kompetitif di pasar global, namun di sisi lain menyebabkan impor menjadi semakin mahal. Secara keseluruhan, depresiasi Rupiah memberikan dampak ganda bagi perekonomian Lampung, yakni membuka peluang penguatan ekspor sekaligus menimbulkan risiko pelemahan impor dan tekanan pada aktivitas produksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi ekspor dan penguatan industri dalam negeri untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan daerah. Meski demikian, faktor fluktuasi harga komoditas dan dinamika permintaan global tetap harus dicermati karena berpotensi memengaruhi stabilitas kinerja perdagangan.

1.1.5 Risiko Ketidakpastian Global Terhadap Provinsi Lampung

Perkembangan ketidakpastian global pada 2025 menghadirkan tantangan yang cukup nyata bagi perekonomian di Provinsi Lampung. Kebijakan perdagangan internasional, perubahan tren energi global, serta dinamika pasar komoditas memengaruhi kinerja sektor unggulan daerah seperti perkebunan, pertanian, dan logistik. Risiko ini, jika tidak diantisipasi, berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi regional Lampung sekaligus mengurangi ketahanan fiskal melalui penurunan potensi pajak dan bea terkait.

Salah satu tekanan utama datang dari kebijakan tarif resiprokal AS sebesar 19% terhadap komoditas ekspor unggulan provinsi Lampung, antara lain komoditas Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya, kopi, teh, serta olahan nanas. Tarif ini memang lebih rendah dari ancaman awal 32%, tetapi tetap tinggi dibandingkan negara pesaing ASEAN (Reuters, 2025a). Hal ini berpotensi menurunkan daya saing produk Lampung tersebut di pasar AS, terutama karena margin eksportir tergerus dan risiko penurunan permintaan global meningkat. Pada tahun 2024, porsi ekspor Lampung ke AS cukup signifikan, yaitu sebesar 14,09% dari total ekspor (Data DJBC, 2025 diolah).

Produktivitas ekspor CPO patut dijaga karena merupakan komoditas ekspor andalan Lampung,

salah satunya digunakan untuk industri pangan seperti margarin, serta produk kosmetik, deterjen, dan biofuel di AS (HaiSawit, 2025). Pada semester I-2025, tren harga global CPO juga menunjukkan kenaikan signifikan, terutama didorong oleh pemulihan permintaan global dan peningkatan ekspor Indonesia yang kuat, meskipun ada prediksi penurunan di awal tahun, sentimen pasar berbalik positif di paruh pertama 2025 karena penurunan stok, permintaan tinggi dari India dan Tiongkok, serta daya saing CPO dibandingkan minyak nabati lainnya (CNBC, 2025).

Selain itu, tren energi global memberikan tekanan tambahan terhadap Lampung sebagai salah satu *hub* logistik batu bara di Sumatera Bagian Selatan. Penurunan permintaan dari Tiongkok dan India, akibat peningkatan produksi domestiknya dan peralihan ke energi baru terbarukan, membuat jumlah ekspor batu bara yang melewati pelabuhan Lampung mengalami kontraksi. Data menunjukkan ekspor ke Tiongkok turun 12–14%, ke India 14,3%, dan secara keseluruhan ekspor nasional melemah 12% pada Semester I-2025 dibanding periode yang sama tahun lalu (Reuters, 2025b). Laporan Internasional Energi Agency (IEA) memperkirakan ekspor batu bara Indonesia bisa 35 juta ton lebih rendah dari proyeksi 2025 (IEA, 2025). Bagi Lampung, penurunan ini berpotensi pada berkurangnya Bea Keluar atas ekspor, menurunnya pendapatan sektor transportasi dan logistik, serta terpengkasnya basis pajak dari perusahaan terkait.

Di sisi lain, muncul peluang dari kebijakan tarif AS terhadap Brasil (50%) dan Vietnam (20%) sebagai produsen kopi terbesar dunia. Kebijakan ini membuka ruang ekspor lebih besar bagi Kopi Lampung di pasar AS. Namun, potensi tersebut kemungkinan belum dapat dimanfaatkan optimal karena produktivitas perkebunan kopi Lampung masih terbatas, baik dari sisi hulu maupun pascapanen. Tanpa peningkatan produktivitas, Lampung berisiko kesulitan mengambil peluang tersebut.

Ketidakpastian global tidak hanya membawa risiko penurunan ekspor dan pendapatan negara, tetapi





juga peluang yang hanya bisa diraih jika terdapat intervensi kebijakan yang tepat, seperti peningkatan produktivitas sektor komoditas unggulan, diversifikasi pasar ekspor, serta opsi baru insentif fiskal usaha terkait agar Lampung tetap tangguh menghadapi guncangan eksternal.

1.2 ANALISIS INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Bagian ini akan menjelaskan beberapa indikator kesejahteraan, antara lain Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini), Nilai Tukar Petani (NTP), serta Nilai Tukar Nelayan (NTN). Informasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kondisi Ketenagakerjaan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) telah dijelaskan dalam Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung pada seri sebelumnya dan dapat diakses melalui tautan berikut <https://bit.ly/KFRLampung>.

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan rendahnya taraf hidup, yang mencerminkan kondisi di mana penduduk mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan *Basic Needs Approach* yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada bagian ini, pembahasan akan difokuskan pada tingkat kemiskinan berdasarkan data terbaru yang tersedia, yaitu hingga Maret 2025. Perhitungan tingkat kemiskinan untuk tahun 2023 hanya dilakukan pada periode Maret 2023, sehingga data tingkat kemiskinan untuk periode September 2023 tidak tersedia.

Pada Maret 2025, Garis Kemiskinan di Lampung mengalami kenaikan, menunjukkan tekanan ekonomi yang lebih besar pada masyarakat. Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp612.451 per kapita per bulan, meningkat 2,24% dibandingkan September 2024 dan meningkat 4,42%

dibandingkan Maret 2024. Dari jumlah tersebut, 74,76% merupakan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan 25,24% merupakan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), yang berarti bahwa komoditas makanan memiliki dampak besar terhadap kenaikan garis kemiskinan. Beras tetap menjadi komoditas utama yang berkontribusi, memberikan sumbangan sebesar 19,22% di perkotaan dan 23,09% di pedesaan.

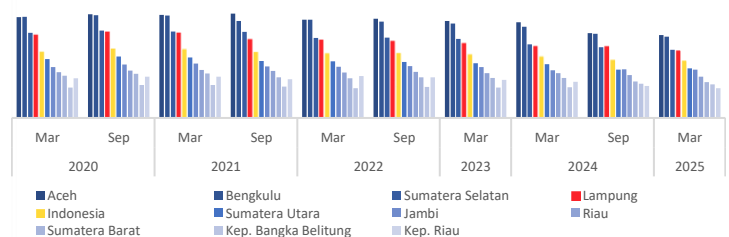
Grafik 1.14. Persentase Penduduk Miskin di Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2025 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 887,02 ribu orang atau 10,00 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional 8,47 persen dan rata-rata tingkat kemiskinan regional Sumatera 8,05 persen, sedikit di bawah nasional. Meski mengalami penurunan, persentase penduduk miskin di Lampung masih berada di atas tingkat regional Sumatera dan Nasional sebagaimana tampak pada grafik 1.14.

Grafik 1.15. Tingkat Kemiskinan Regional Sumatera Tahun 2020 – 2025 (persen)



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

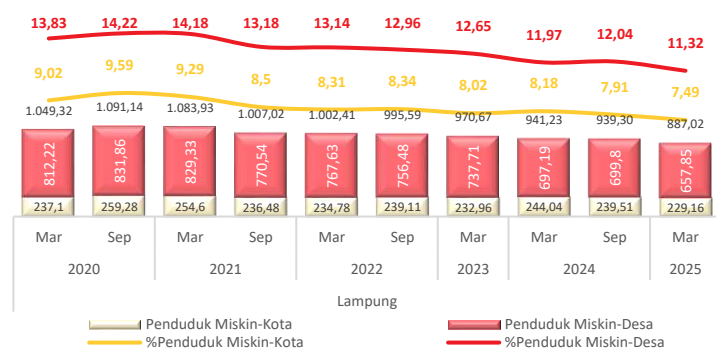
Berdasarkan tingkat kemiskinan masing-masing Provinsi di Regional Sumatera sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.15, Lampung menempati posisi keempat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera pada periode Maret 2025, turun dari peringkat ketiga pada periode sebelumnya. Kondisi





ini mencerminkan capaian yang cukup baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Grafik 1.16. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Lampung Menurut Tempat Tinggal 2020 – 2025

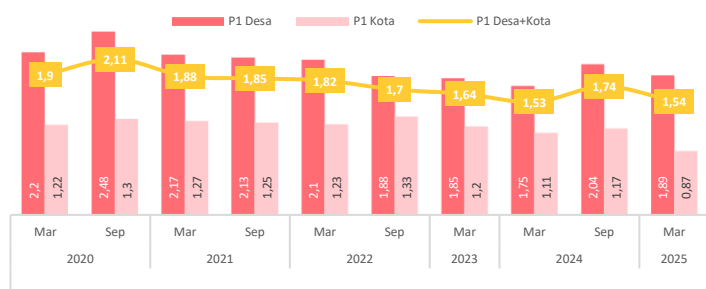


Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Tingkat kemiskinan di Lampung turun, baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 adalah 887,02 ribu orang, menurun sebesar 52,28 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2024 yang mencapai 939,30 ribu orang sebagaimana tampak pada grafik 1.16. Dari periode Maret 2020 hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Lampung telah mengalami penurunan sebesar 162,3 ribu orang.

Ketimpangan dalam distribusi kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Lampung menjadi cerminan nyata dari perbedaan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Di kawasan pedesaan, jumlah penduduk miskin tercatat lebih tinggi, mencapai 657,85 ribu orang atau 11,32 persen dari total penduduk pedesaan. Angka ini jauh melampaui jumlah penduduk miskin di perkotaan, yang berada pada angka 229,16 ribu

Grafik 1.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2020 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

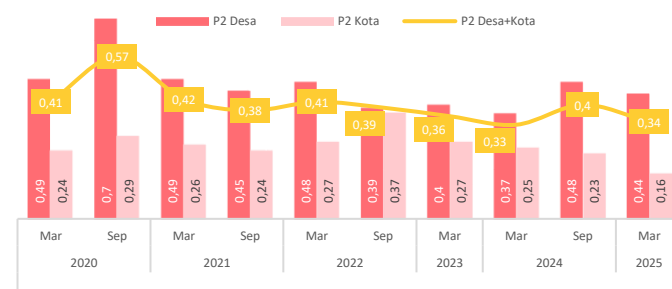
orang atau 7,49 persen dari total penduduk perkotaan.

Namun, jumlah penduduk miskin di pedesaan menunjukkan penurunan sebesar 41,95 ribu orang, dari 699,80 ribu pada September 2024 menjadi 657,85 ribu pada Maret 2025. Persentase kemiskinan di pedesaan juga mengalami penurunan sebesar 0,72 persen dalam periode yang sama.

Kondisi ini mencerminkan perbedaan tantangan yang dihadapi perkotaan dan pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terbatas pada jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga mencakup aspek yang lebih mendalam, seperti tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan, sebagaimana ditampilkan pada grafik 1.17. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang dapat dilihat pada grafik 1.18.

Grafik 1.18. Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) 2020 – 2025





Semakin tinggi nilai P1, semakin besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan, sehingga semakin besar pula upaya yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka keluar dari kondisi tersebut. Sementara itu, semakin tinggi nilai P2, semakin parah tingkat kemiskinan yang terjadi, sehingga intervensi kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran menjadi semakin krusial, terutama dalam menentukan alokasi dana yang dibutuhkan bagi setiap daerah untuk mengatasi kemiskinan.

Dengan memahami tidak hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga nilai P1 dan P2 di setiap wilayah, pemerintah dapat merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Data ini menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara lebih efisien, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

Pada Maret 2025, P1 di wilayah perdesaan meningkat menjadi 1,893 dan wilayah perkotaan juga terjadi penurunan menjadi 0,867 sehingga secara keseluruhan P1 Lampung turun menjadi 1,539. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat dari garis kemiskinan, mencerminkan perbaikan kesenjangan ekonomi yang semakin kecil di kalangan masyarakat miskin.

Sementara itu, P2 di wilayah perdesaan turun sebesar 0,045 menjadi 0,439 yang menandakan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin merata, dengan kelompok termiskin mengalami beban yang lebih ringan dari periode sebelumnya (September 2024). P2 di wilayah perkotaan juga mengalami penurunan sebesar 0,063 menjadi 0,164 yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin perkotaan.

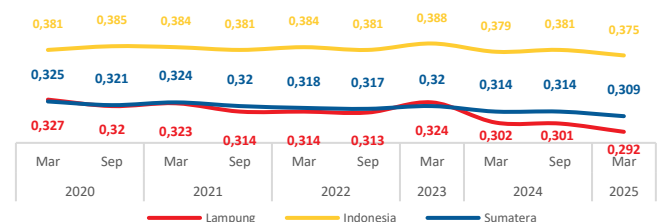
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan

Kemiskinan) untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas intervensi. Tantangan utama masih terletak pada kesenjangan perkotaan dan pedesaan, sehingga diperlukan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur dan optimalisasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, UMKM lokal, maupun desa wisata. Sektor unggulan pertanian, kehutanan, dan perikanan juga didorong melalui hilirisasi guna meningkatkan daya beli petani serta menekan angka kemiskinan. Mengingat penyebab kemiskinan yang kompleks, intervensi lintas sektor menjadi krusial, dengan peran strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam memetakan sumber masalah dan potensi wilayah sebagai dasar percepatan pengentasan kemiskinan.

1.2.2 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Rasio Gini adalah indikator ketimpangan pendapatan atau pengeluaran dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan ekstrem). Semakin rendah nilainya, semakin baik tingkat pemerataan ekonomi, yang mencerminkan distribusi pendapatan lebih adil serta meningkatnya kesempatan setara bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial.

Grafik 1.19. Perkembangan Gini Ratio Lampung, Regional Sumatera, dan Nasional 2020 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada 2025, Rasio Gini di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Regional Sumatera dan nasional sebagaimana tampak pada grafik 1.19. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan yang baik dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi.

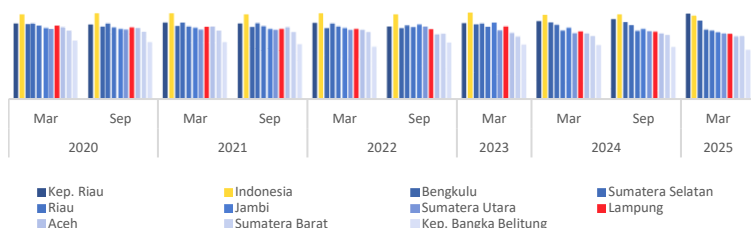
Secara lebih luas, sebagian besar Rasio Gini di seluruh Provinsi di Regional Sumatera berada di bawah rata-rata nasional, kecuali Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ditunjukkan dalam





grafik 1.20. Pada Maret 2025, Lampung bahkan berhasil masuk dalam jajaran empat provinsi dengan *Gini Ratio* terendah di Sumatera, bersama Bangka Belitung (0,222), Sumatera Barat (0,282), dan Aceh (0,282). Capaian ini semakin menguatkan indikasi bahwa Lampung terus menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

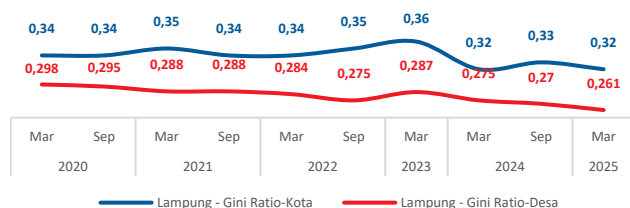
Grafik 1.20. Gini Ratio Regional Sumatera Tahun 2020 s.d. 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Penurunan capaian Rasio Gini Provinsi Lampung pada Maret 2025 memperlihatkan progres nyata dalam kebijakan pengentasan ketimpangan. Pada Maret 2025, Rasio Gini tercatat sebesar 0,292, turun 2,99 persen atau 0,009 poin dibandingkan September 2024 yang berada di angka 0,301. Penurunan ini konsisten dengan tren penurunan tahunan sejak 2020, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,21% per tahun. Ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam menekan ketimpangan mulai memberikan hasil yang lebih nyata dan berkelanjutan.

Grafik 1.21. Perkembangan Gini Ratio Lampung Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

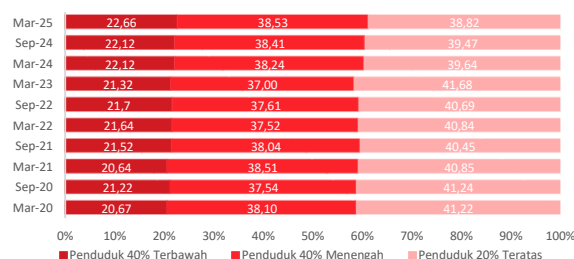
Distribusi ketimpangan di Lampung menunjukkan perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan sebagaimana tampak pada grafik 1.21. Namun, terjadi dengan tren penurunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada Maret 2025, *Gini Ratio* di perkotaan tercatat sebesar 0,319, turun 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, di daerah perdesaan,

Gini Ratio mencapai 0,261, turun 0,009 poin dari September 2024. Ini menandakan adanya penurunan kesenjangan pendapatan di wilayah perdesaan dan perkotaan, di mana distribusi pendapatan di wilayah perdesaan lebih merata dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Penurunan indikator Rasio Gini di wilayah perdesaan yang diiringi dengan turunnya P0 (persentase penduduk miskin), P1 (kedalaman kemiskinan), dan P2 (keparahan kemiskinan) mengindikasikan membaiknya pemerataan pendapatan sekaligus perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin, baik dari sisi jumlah, tingkat kekurangan, maupun tingkat keparahan kemiskinan.

Indikator lain yang relevan untuk mengukur ketimpangan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, yang menunjukkan distribusi pendapatan secara lebih spesifik. Berdasarkan indikator ini, ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori: tinggi (di bawah 12%), sedang (12-17%), dan rendah (di atas 17%). Pada Maret 2025 Provinsi Lampung mencatat persentase sebesar 22,66% pada kelompok 40% terbawah, masuk dalam kategori ketimpangan rendah sebagaimana tampak pada grafik 1.22. Capaian ini memperkuat bukti bahwa pemerataan pendapatan di Lampung semakin baik, dengan akses ekonomi yang lebih inklusif bagi lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

Grafik 1.22. Distribusi Pengeluaran Penduduk Lampung Tahun 2020 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Distribusi pengeluaran kelompok 20% teratas tercatat menurun dari 39,47% pada September 2024 menjadi 38,82% pada Maret 2025. Penurunan ini mencerminkan membaiknya pemerataan pendapatan, karena kelompok berpendapatan tinggi tidak lagi terlalu mendominasi pengeluaran,





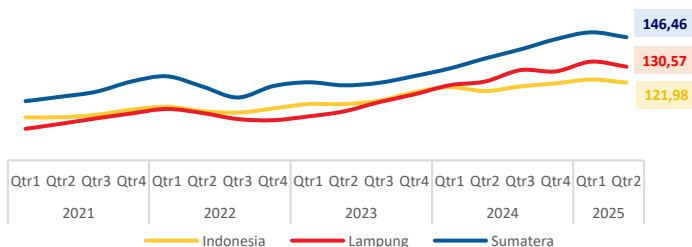
sementara kelompok menengah-bawah memperoleh porsi yang lebih besar dari kue ekonomi. Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa tren positif ini berkelanjutan dan bukan sekadar dipengaruhi oleh melemahnya konsumsi kelompok menengah-atas.

Meskipun menunjukkan perbaikan, ketimpangan di Lampung masih dipengaruhi faktor struktural seperti perbedaan sumber daya alam antar kabupaten, kondisi demografis yang tidak merata, keterbatasan mobilitas di daerah terpencil, konsentrasi kegiatan ekonomi di kota besar, serta ketidakseimbangan alokasi dana pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya mengoptimalkan program bantuan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan pengawasan ketat atas penggunaan anggaran agar pembangunan infrastruktur memberikan *multiplier effect* yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

1.2.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator daya beli petani yang dihitung dari rasio Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). NTP mencerminkan daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian. Semakin tinggi NTP, semakin kuat daya beli petani karena pendapatan yang diterima relatif lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Grafik 1.23. Perkembangan Rata-rata NTP Lampung, Regional Sumatera, dan Indonesia per triwulan Tahun 2020 – 2025



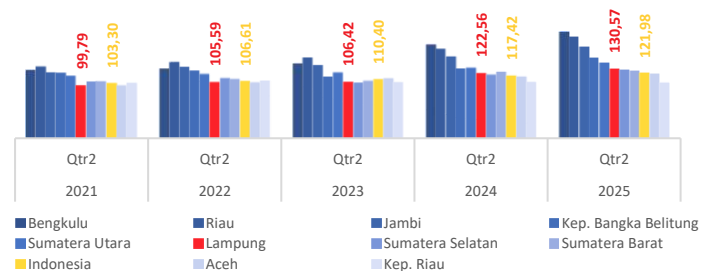
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Rata-rata NTP di Provinsi Lampung triwulan II 2025 tercatat sebesar 130,57, meningkat 6,54% (yoy). Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun masih di bawah rata-rata NTP regional Sumatera sebagaimana ditunjukkan pada grafik 1.23 yang

menggambarkan perkembangan rata-rata NTP Lampung, regional Sumatera, dan Indonesia selama lima tahun terakhir.

Pada triwulan II 2025, seluruh provinsi di Sumatera mencatatkan NTP di atas 100 dengan pertumbuhan positif (yoy), kecuali Kepulauan Riau yang berkontraksi -1,01% (yoy). Lampung mencatat NTP sebesar 130,57, menempati posisi ke-6 tertinggi di Sumatera. Namun, dari sisi pertumbuhan, NTP Lampung hanya naik 6,54% (yoy), sehingga berada di peringkat ke-7, di bawah rata-rata regional 7,47% (yoy) dan jauh tertinggal dari Bangka Belitung (15,01% yoy) serta Riau (13,20% yoy). Hal ini menunjukkan bahwa meski daya beli petani Lampung terus membaik, laju pertumbuhannya masih relatif lebih lambat dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Sumatera.

Grafik 1.24. Rata-rata NTP Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Data terkait perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menurut subsektor di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 1.2, yang menyajikan tren triwulanan selama periode 2021 hingga triwulan II 2025. Berdasarkan data tersebut, peningkatan NTP Lampung pada triwulan II 2025 tidak terlepas dari kinerja subsektor-sektor penyusunnya.

Pada triwulan II 2025, perkembangan NTP Lampung antar subsektor menunjukkan dinamika yang bervariasi. **Secara triwulanan**, kenaikan NTP hanya ditopang subsektor hortikultura (3,76% *qtq*), sementara subsektor lain berkontraksi. **Secara tahunan**, peningkatan terutama didorong oleh Tanaman Perkebunan Rakyat (11,36% yoy), disusul Perikanan Tangkap (3,54% yoy), Tanaman Pangan (0,40% yoy), dan Peternakan (0,20% yoy). Sebaliknya, Hortikultura dan Perikanan Budidaya justru mengalami kontraksi masing-masing -7,26%





(yoy) dan -1,10% (yoy). Dari sisi triwulanan, peningkatan NTP Lampung masih ditopang terutama oleh subsektor hortikultura, menunjukkan potensi penguatan pada sektor ini meski subsektor lain masih mengalami koreksi. Sementara itu, dari sisi tahunan, kinerja terlihat lebih solid dengan

subsektor perkebunan rakyat sebagai motor utama, didukung kontribusi positif dari perikanan tangkap, tanaman pangan, dan peternakan, meski beberapa subsektor lain masih menghadapi tantangan untuk tumbuh optimal.

Tabel 1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Menurut Subsektor per Triwulan periode 2021 – 2025

Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	2021				2022				2023				2024				2025		Tren	Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	21-25	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Petani																					
Tanaman Pangan	90,90	90,54	93,43	94,44	96,79	94,31	93,10	94,47	97,81	98,33	103,42	109,18	112,68	101,25	106,43	105,38	105,17	101,65		↓ -3,34%	↑ 0,40%
Hortikultura	99,92	95,45	94,81	96,70	97,96	105,67	118,99	107,16	105,68	105,87	112,65	126,82	130,49	127,66	117,04	107,36	114,11	118,40		↑ 3,76%	↓ -7,26%
Tanaman Perkebunan Rakyat	102,85	110,21	114,03	119,70	123,12	119,00	110,38	109,56	111,99	117,92	124,21	127,15	136,29	153,95	165,73	166,55	179,34	171,44		↓ -4,41%	↑ 11,36%
Peternakan	99,01	102,10	104,25	104,24	104,37	104,58	102,61	100,48	98,46	100,06	100,36	98,53	96,28	99,83	100,49	99,98	100,54	100,03		↓ -0,51%	↑ 0,20%
Perikanan Tangkap	103,57	104,95	106,22	108,14	109,23	110,04	108,26	106,28	108,25	110,85	111,61	111,74	110,24	109,11	109,51	111,08	113,56	112,98		↓ -0,51%	↑ 3,54%
Perikanan Budidaya	100,57	101,68	101,40	101,28	100,98	100,02	98,98	99,65	96,88	97,17	98,86	99,42	97,35	97,33	96,93	97,50	96,63	96,26		↓ -0,38%	↓ -1,10%
Gabungan																					
Nilai Tukar Petani	97,05	99,79	102,69	105,36	107,77	105,59	102,32	101,70	103,74	106,42	111,45	115,66	120,58	122,56	128,71	128,04	133,28	130,57		↓ -2,03%	↑ 6,54%
Indeks Harga yang diterima Petani (%)	104,58	107,74	111,00	114,16	118,74	119,11	117,43	117,17	120,99	124,77	131,31	137,85	145,45	149,53	156,31	155,90	163,24	161,06		↓ -1,34%	↑ 7,71%
Indeks Harga yang dibayar Petani (%)	107,75	107,97	108,10	108,34	110,17	112,82	114,78	115,20	116,63	117,24	117,82	119,18	120,62	122,01	121,44	121,76	122,49	121,31		↓ -0,96%	↓ -0,57%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Triwulan II 2025, subsektor tanaman pangan mencatat penurunan NTP menjadi 101,65 seiring turunnya harga gabah setelah berlalunya masa panen raya di triwulan I. Meski demikian, secara tahunan subsektor ini masih tumbuh tipis 0,40% (yoy). Hortikultura naik 3,76% (qtq), namun secara tahunan terkoreksi -7,26% (yoy) akibat fluktuasi harga cabai merah dan tomat yang dipengaruhi ketersediaan stok. Tanaman perkebunan rakyat tumbuh 11,36% (yoy), meski secara triwulanan tertekan -4,41% (qtq) karena pelemahan harga kopi global dan penurunan harga karet. Peternakan turun -0,51% (qtq), dipicu volatilitas harga sapi potong, namun secara tahunan masih tumbuh tipis 0,20% (yoy). Perikanan tangkap berkontraksi -0,51% (qtq) akibat melimpahnya hasil tangkapan ikan teri dan kembung seiring kondisi cuaca yang mendukung, sehingga mendorong penurunan harga, tetapi secara tahunan meningkat 3,54% (yoy). Sementara itu, perikanan budidaya masih tertekan baik triwulanan (-0,38% qtq) maupun tahunan (-1,10% yoy), terutama karena fluktuasi harga udang payau yang sangat bergantung pada musim.

Variasi kinerja antar subsektor pada Triwulan II 2025 menunjukkan bahwa daya beli petani Lampung

masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan fluktuasi harga komoditas utama. Tanaman pangan dan hortikultura rentan terhadap siklus panen serta harga sayuran yang bergejolak, sementara perkebunan rakyat menjadi penopang utama berkat kontribusi komoditas kopi meski tertekan tren harga global. Subsektor peternakan dan perikanan menghadapi dinamika serupa, dipengaruhi oleh harga sapi potong serta kondisi cuaca dan musim. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi stabilisasi harga pangan, penguatan rantai pasok hortikultura, serta mitigasi risiko harga komoditas untuk memastikan pertumbuhan NTP yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh subsektor.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat terkait keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran usaha pertanian. Berbeda dengan NTP yang mencakup seluruh pengeluaran rumah tangga petani, termasuk biaya produksi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. NTUP hanya memperhitungkan biaya produksi serta penambahan barang modal (BPPBM). Oleh karena itu, NTUP dianggap lebih relevan dalam mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan usaha pertanian.





Tabel 1.3. Perkembangan NTUP Lampung Menurut Subsektor per Triwulan Periode 2021 – 2025

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	2021				2022				2023				2024				2025		Tren	Perubahan	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	21-25	%qtq	%yoy
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	98,55	101,10	103,67	104,63	108,53	107,26	104,03	101,40	103,96	107,01	112,31	117,65	123,19	125,77	131,00	130,50	135,56	132,76		↓ -2,06%	↑ 5,56%
Tanaman Pangan	92,61	92,22	94,68	95,31	97,89	96,31	95,54	95,09	98,74	99,57	104,91	111,55	115,08	104,25	108,74	107,70	107,44	105,28		↓ -2,01%	↑ 0,99%
Hortikultura	102,75	98,10	97,31	104,06	100,70	109,87	123,64	110,25	109,04	109,68	117,19	133,28	137,12	134,59	122,57	112,63	119,94	125,92		↑ 4,99%	↓ -6,44%
Tanaman Perkebunan Rakyat	103,99	110,90	114,48	115,70	123,09	120,12	111,16	107,46	110,68	117,03	123,62	128,06	138,57	156,90	166,99	168,12	180,03	174,55		↓ -3,04%	↑ 11,25%
Peternakan	100,05	102,83	104,70	103,24	104,71	104,96	102,70	100,16	98,81	100,57	101,02	100,08	98,56	101,87	102,49	102,36	103,16	102,68		↓ -0,47%	↑ 0,79%
Perikanan Tangkap	104,82	105,99	107,22	108,68	110,60	111,91	76,48	106,03	108,44	111,29	112,32	113,09	112,32	111,57	111,77	113,50	115,99	116,25		↑ 0,22%	↑ 4,20%
Perikanan Budidaya	102,76	103,86	103,39	102,57	102,83	102,76	102,06	101,94	99,58	100,17	102,10	103,09	101,16	102,09	101,25	101,91	100,66	100,88		↑ 0,22%	↓ -1,19%

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 1.3, NTUP Provinsi Lampung pada triwulan II tahun 2025 tercatat sebesar 132,76. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,56% (yoy), namun berkontraksi -2,06% (qtq), mencerminkan adanya penguatan daya beli petani secara tahunan, meski dalam jangka pendek masih menghadapi tekanan dari fluktuasi harga dan biaya produksi. Secara umum, pola perkembangan NTUP di masing-masing subsektor relatif sejalan dengan dinamika pada indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan NTUP secara agregat mencerminkan adanya perbaikan efisiensi dalam usaha pertanian, terutama di subsektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan. Meskipun demikian, masih terdapat subsektor yang mengalami tekanan, sehingga dibutuhkan strategi penguatan dan intervensi kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dan meningkatkan daya saing petani secara merata di seluruh subsektor pertanian.

Dukungan terhadap sektor pertanian di Lampung diarahkan untuk memperkuat NTP dan mewujudkan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Fokus utama mencakup integrasi pertanian dengan industri pengolahan, penguatan akses pasar, serta efisiensi rantai pasok agar produk pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

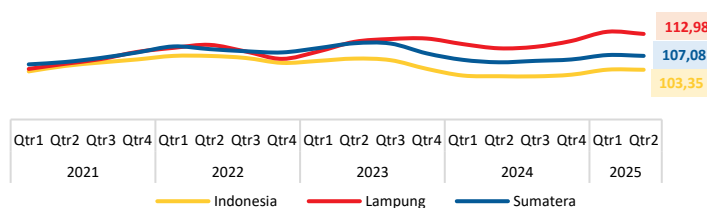
Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari efisiensi distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, hingga pengembangan bibit unggul padi tahan hama. Dengan dukungan penuh dari pusat dan daerah, serta pemanfaatan riset dan teknologi, Lampung diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan

nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan daya beli.

1.2.4 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator daya beli nelayan terhadap barang dan jasa, baik untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. NTN mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dari hasil tangkapan ikan dengan biaya produksi dan kebutuhan sehari-hari, sehingga menjadi parameter penting dalam menilai kesejahteraan nelayan dan ketahanan ekonomi sektor perikanan.

Grafik 1.25. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2020 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

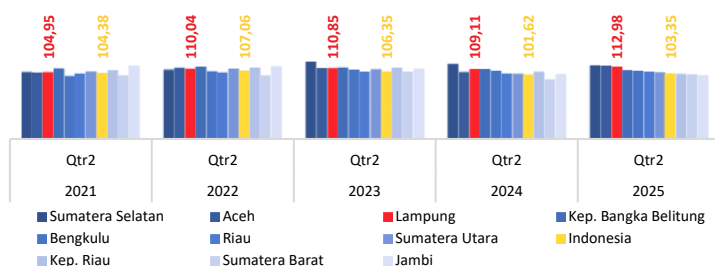
Pada triwulan II 2025, rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Lampung tercatat sebesar 112,98, lebih tinggi dibandingkan Sumatera (107,08) dan nasional sebesar (103,35). Dibandingkan triwulan sebelumnya, NTN mengalami kontraksi, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya masih menunjukkan pertumbuhan positif. Secara tahunan, NTN nasional tumbuh 1,71% (yoy), Lampung 3,54% (yoy), dan Sumatera 1,63% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan NTN mengalami kontraksi masing-masing sebesar -0,03% (nasional), -0,51% (Lampung), dan -0,21% (Sumatera). Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun kesejahteraan nelayan secara tahunan masih meningkat, pada triwulan berjalan nelayan menghadapi tekanan.





Pada triwulan II 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Provinsi Lampung berada pada posisi ketiga tertinggi di regional Sumatera dari 10 provinsi, setelah Sumatera Selatan yang mencatatkan nilai 115,05 dan Aceh 114,54. Sementara itu, rata-rata nasional hanya sebesar 103,35, sebagaimana ditampilkan pada grafik 1.26. Hal ini mencerminkan daya beli nelayan Lampung yang relatif kuat, sekaligus menegaskan posisi strategis Lampung dalam mendukung sektor perikanan regional.

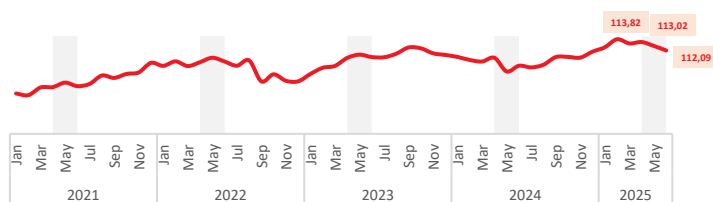
Grafik 1.26. Rata-Rata NTN Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Pada Triwulan II 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan tren menurun dari 113,82 pada Maret menjadi 113,02 pada April dan kembali turun ke 112,09 pada Mei. Meskipun masih berada di atas angka 100 yang menandakan kondisi nelayan relatif surplus, penurunan ini mencerminkan adanya tekanan pada kesejahteraan nelayan, baik akibat kenaikan biaya produksi maupun melemahnya harga hasil tangkapan, yang kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor musiman dan kondisi pasar.

Grafik 1.27. Perkembangan Rata-Rata NTN Lampung, Regional Sumatera dan Indonesia per Triwulan 2021 – 2025



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Salah satu faktor utama yang memengaruhi fluktuasi NTN adalah perubahan harga komoditas perikanan, khususnya ikan teri dan ikan kembung, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi musim dan

cuaca. Ketergantungan terhadap faktor musiman ini menyebabkan volatilitas pendapatan bagi nelayan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan, seperti diversifikasi usaha nelayan dan penguatan sistem logistik perikanan.

Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan strategis yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Salah satu langkah nyata adalah peningkatan akses bahan bakar dengan membangun empat SPBN di Lempasing, Kalianda, Labuan Maringgai, dan Kota Agung. Saat ini, pembangunan SPBN tambahan juga sedang berlangsung di beberapa lokasi. Pembangunan fasilitas ini sepenuhnya dibiayai melalui investasi pihak swasta, tanpa menggunakan dana dari APBN maupun APBD. Namun demikian, proses perizinan dan pengelolaan penyaluran bahan bakar bersubsidi tetap berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung. Pola ini mencerminkan sinergi positif antara pemerintah dan swasta dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan perikanan tangkap.

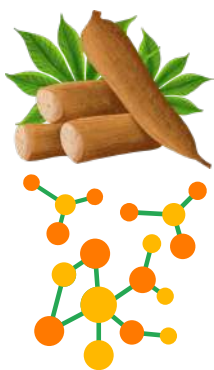
Selain membangun infrastruktur energi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan perlindungan sosial bagi nelayan melalui program Asuransi Nelayan yang telah berjalan sejak 2020 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini melindungi nelayan dari risiko kerja saat melaut. Di bidang permodalan, pemerintah mendorong akses nelayan terhadap pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas. Kombinasi kebijakan infrastruktur, perlindungan sosial, dan akses permodalan ini mencerminkan pembangunan ekosistem perikanan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.



SUPLEMEN 2

Peluang Investasi Regional Lampung

Industri Eksipien Amilum



Latar Belakang

Industri farmasi merupakan sektor padat pengetahuan dengan biaya R&D tinggi, namun di Indonesia anggaran R&D masih rendah (0,2% PDB). Lebih dari 90% bahan baku obat, termasuk eksipien seperti amilum, masih diimpor. Padahal, amilum memiliki permintaan tinggi, bahan baku melimpah (jagung dan singkong), serta potensi keuntungan besar.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki posisi strategis, bahan baku singkong yang melimpah, dekat dengan pelabuhan, bandara, dan jalur tol, sehingga berpotensi menjadi lokasi pengembangan industri eksipien amilum. Pengembangan ini diharapkan dapat mensubstitusi impor, meningkatkan TKDN, dan mendukung industri farmasi



Tujuan Pembangunan

- ✓ Mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat, khususnya eksipien amilum;
- ✓ Memanfaatkan potensi lokal singkong sebagai bahan baku utama untuk meningkatkan nilai tambah pertanian;
- ✓ Meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi;
- ✓ Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat;
- ✓ Menciptakan pasar yang kompetitif bagi petani singkong dan memperbaiki kesejahteraan mereka.



Perkiraan Nilai Investasi
Rp48,05 Miliar



Manfaat Sosial

Rencana pengembangan pabrik eksipien amilum di Kabupaten Lampung Tengah diproyeksikan akan **menyerap tenaga kerja lokal hingga 60% dari total kebutuhan karyawan**. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus menjadi **salah satu upaya pengurangan tingkat pengangguran** di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, menjadi aspek penting untuk menunjang keberhasilan investasi ini. Diharapkan investasi ini tidak hanya memperkuat industri farmasi nasional, tetapi juga **menggerakkan roda perekonomian Lampung Tengah** secara berkelanjutan.



Kendala dan Tantangan

- ✓ Investasi awal dibutuhkan 1 hektar lahan dengan pasokan 20 ton per hari. Meskipun bahan baku melimpah, lokasi final investasi belum bersifat *clean and clear*. Pemanfaatan lahan aset Pemda masih terkendala peruntukan lain;
- ✓ Lokasi potensial di Terbanggi Besar dan Bandar Mataram masih dikaji, masih ada potensi risiko kepemilikan lahan;
- ✓ Masih perlu dukungan asosiasi industri dan koordinasi antarwilayah;

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah



BAB 2

ANALISIS FISKAL REGIONAL

“Sinergi antara APBN dan APBD sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional”

-Sri Mulyani Indrawati -



BAB 2 ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 PELAKSANAAN APBN

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal hadir sebagai *shock absorber* atas dampak tersebut bagi ekonomi domestik dan masyarakat.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lampung pada Semester I Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif yang konsisten dan resilient guna mendukung penguatan ekonomi regional secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Tabel 2.1 I-Account APBN di Provinsi Lampung Realisasi s.d. Triwulan II 2025 (dalam miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	T.A. 2024			T.A. 2025			% Growth 2024-2025	
	Pagu-P	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	11.813,41	4.189,57	35,46	11.120,70	5.083,69	45,71	(5,86)	21,34
1. Pendapatan Perpajakan	10.762,21	3.501,06	32,53	10.032,30	4.360,62	43,47	(6,78)	24,55
a. Pajak Dalam Negeri	9.273,35	3.027,28	32,64	9.196,13	3.030,26	32,95	(0,83)	0,10
i. Pajak Penghasilan	3.892,64	1.324,49	34,03	3.569,36	1.165,99	32,67	(8,30)	(11,97)
ii. Pajak Pertambahan Nilai	5.084,81	1.617,34	31,81	5.552,28	1.605,05	28,91	9,19	(0,76)
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	135,55	4,41	3,25	34,14	0,41	1,21	(74,82)	(90,67)
v. Cukai	7,03	6,25	88,92	6,05	9,79	161,76	(13,93)	56,58
vi. Pajak Lainnya	153,32	74,79	48,78	34,30	249,02	726,10	(77,63)	232,96
b. Pajak Perdagangan Internasional	1.488,86	473,78	31,82	836,17	1.330,36	159,10	(43,84)	180,80
i. Bea Masuk	559,83	323,68	57,82	454,21	191,18	42,09	(18,87)	(40,94)
ii. Bea Keluar	929,03	150,10	16,16	381,96	1.139,19	298,25	(58,89)	658,94
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.051,20	688,50	65,50	1.088,40	723,07	66,43	3,54	5,02
a. PNBPN Lainnya	423,41	410,26	96,90	413,02	406,38	98,39	(2,45)	(0,95)
b. Pendapatan Badan Layanan Umum	627,80	278,24	44,32	675,38	316,69	46,89	7,58	13,82
B. BELANJA NEGARA	33.929,45	16.208,79	47,77	32.122,63	14.839,06	46,20	(5,33)	(8,45)
1. Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	11.174,04	4.712,43	42,17	9.062,59	3.573,70	39,43	(18,90)	(24,16)
a. Belanja Pegawai	4.197,77	2.299,97	54,79	4.281,56	2.368,69	55,32	2,00	2,99
b. Belanja Barang	5.555,11	2.078,70	37,42	3.389,67	1.080,62	31,88	(38,98)	(48,01)
c. Belanja Modal	1.377,39	312,94	22,72	1.346,26	101,40	7,53	(2,26)	(67,60)
d. Bantuan Sosial	43,77	20,82	47,57	45,11	22,99	50,96	3,05	10,40
2. Transfer Ke Daerah (TKD)	22.755,41	11.496,36	50,52	23.060,04	11.265,35	48,85	1,34	(2,01)
a. Dana Transfer Umum (DTU)	14.584,63	7.822,24	53,63	15.010,97	7.754,62	51,66	2,92	(0,86)
i. Dana Alokasi Umum	13.954,49	7.597,20	54,44	14.309,67	7.509,35	52,48	2,55	(1,16)
ii. Dana Bagi Hasil	630,14	225,04	35,71	701,30	245,27	34,97	11,29	8,99
b. Dana Transfer Khusus (DTK)	5.580,96	2.269,74	40,67	5.644,49	2.243,29	39,74	1,14	(1,17)
i. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.453,58	113,75	7,83	1.123,95	4,74	0,42	(22,68)	(95,83)
ii. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.125,51	2.155,98	52,26	4.520,55	2.238,54	49,52	9,58	3,83
iii. Hibah Daerah	1,87	0,00	-	0,00	0,00	-	(100,00)	-
c. Insentif Fiskal	253,93	73,85	29,08	126,50	66,98	52,95	(50,18)	(9,29)
d. Dana Desa	2.335,89	1.330,53	56,96	2.278,08	1.200,47	52,70	(2,47)	(9,78)
C. SURPLUS (DEFISIT)	(22.116,04)	(12.019,22)	54,35	(21.001,92)	(9.755,36)	46,45	(5,04)	(18,84)

Sumber: TBD, SIKD, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, ALCo (data diolah)

Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 secara nominal telah tercapai sebesar Rp5.083,69 miliar atau 45,71% dari target, melonjak sebesar 21,34% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh naiknya harga komoditas yang menjadi sektor utama di provinsi Lampung pada kinerja penerimaan negara. Fluktuasi harga komoditas ini mengalami perbaikan sejak akhir tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Sementara itu, realisasi Belanja Negara di Provinsi Lampung telah mencapai Rp14.839,06 miliar atau 46,20% dari pagu anggaran, terkontraksi 8,45%. Meskipun terjadi penyesuaian alokasi belanja negara, efisiensi tersebut mencerminkan strategi konsolidasi fiskal yang hati-hati, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan ketepatan sasaran belanja sebagai landasan penguatan ketahanan fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah. Belanja Negara dilaksanakan dengan fokus meningkatkan kualitas SDM, percepatan





pembangunan infrastruktur pendidikan, serta mendorong industrialisasi bernilai tambah melalui hilirisasi.

2.1.1 Pendapatan Negara

Sampai dengan Triwulan II 2025, Pendapatan Negara telah terkumpul Rp5.083,69 miliar atau setara dengan 45,71% dari target APBN yakni sebesar Rp11.121,70 miliar. Secara kumulatif, pendapatan negara meneruskan kinerja positif periode sebelumnya dengan pertumbuhan *double digit* sebesar 21,43% (yoy), utamanya didorong oleh Pendapatan Perpajakan pada komponen penerimaan Bea Keluar yang meningkat tajam akibat harga komoditas di pasar global.

Penerimaan Negara Bukan Pajak turut mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 5,02% (yoy). Besaran realisasi PNBP sampai dengan Juni 2025 sebesar Rp723,07 miliar atau 66,43% dari target. Realisasi dan capaian target yang positif ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang menjadi kontributor utama PNBP Provinsi Lampung.

2.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Target Penerimaan Perpajakan di Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp10.032,30 miliar. Realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp4.360,62 miliar atau sebesar 43,47% dari target APBN 2025. Rincian penerimaan triwulan II 2025 disajikan tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Capaian Penerimaan Perpajakan s.d. 30 Juni 2025
(miliar rupiah)

Uraian	2025		
	PAGU	REALISASI	%REAL
A. Pajak Dalam Negeri	9.196,13	3.030,26	32,95
Pajak Penghasilan	3.569,36	1.165,99	32,67
Pajak Pertambahan Nilai	5.552,28	1.605,05	28,91
Pajak Bumi dan Bangunan	34,14	0,41	1,21
Cukai	6,05	9,79	161,76
Pajak Lainnya	34,30	249,02	726,10
B. Pajak Perdagangan Internasional	836,17	1.330,36	159,10
Bea Masuk	454,21	191,18	42,09
Bea Keluar/Pungutan Ekspor	381,96	1.139,19	298,25
Total	10.032,30	4.360,62	43,47

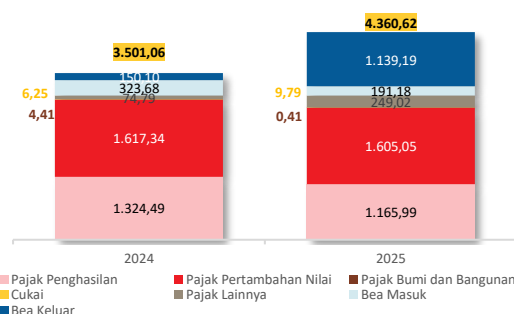
Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai 32,95% dari target, sedangkan Pajak Perdagangan

Internasional menunjukkan kinerja yang amat baik dengan capaian sebesar 159,10% dari target.

Grafik 2.1 menunjukkan pertumbuhan signifikan realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan PPN dan PPh tetap menjadi kontributor penerimaan utama, tetapi Bea Keluar berhasil menyumbang pertumbuhan penerimaan tertinggi sampai dengan akhir Juni 2025. Hal ini disebabkan karena Bea Keluar atau pungutan ekspor sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas di pasar global, khususnya CPO yang menopang ekspor dari Lampung. Pada triwulan II 2025, terjadi penurunan harga referensi minyak kelapa sawit (CPO) dan dampak penurunan permintaan global. Namun, di triwulan II 2025 terjadi kenaikan harga CPO di level global yang menyebabkan harga referensi pengenaan Bea Keluar juga menjadi lebih tinggi dan membawa penerimaan yang positif bagi Pajak Perdagangan Internasional Lampung.

Grafik 2.1. Kontribusi Komponen Penerimaan Perpajakan s.d. 30 Juni Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

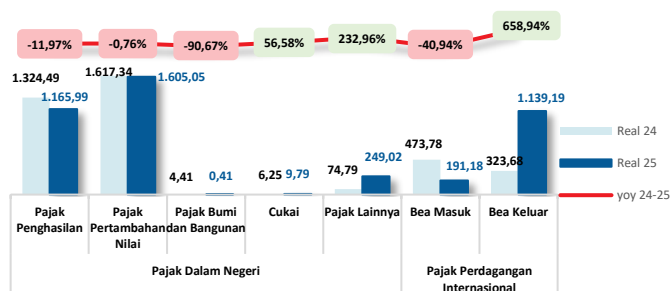
Sampai dengan triwulan II 2025, realisasi penerimaan perpajakan pemerintah pusat di regional Lampung secara agregat tumbuh positif sebesar 24,55% (yoy) dengan capaian Rp4.360,62 miliar atau sebesar 43,47% dari target. Penerimaan Perpajakan di Lampung didominasi oleh penerimaan Pajak Perdagangan Internasional yang terakselerasi hingga 180,80% (yoy). Kinerja baik ini selaras dengan penerimaan Bea Keluar yang meningkat 2025 didorong kenaikan harga referensi CPO dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pajak Dalam Negeri juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,10% (yoy). Capaian Realisasi dan Pertumbuhan pada setiap





komponen Penerimaan Perpajakan ditunjukkan sebagaimana Grafik 2.2.

Grafik 2.2 Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan di Lampung s.d. Triwulan II 2025 (miliar rupiah, persen)



Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, 2025 (diolah)

Kontributor utama Penerimaan Pajak Dalam Negeri sampai dengan triwulan II 2025 bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan proporsi sebesar 52,97%. Total PPN yang berhasil dikumpulkan hingga 30 Juni 2025 senilai Rp1.605,05 miliar atau 28,91% dari target. Penerimaan PPN mengalami perlambatan tipis sebesar 0,76% (yoy) terutama disebabkan dalamnya kontraksi PPN Impor yang turun hingga 35,38% (yoy). Meski demikian, PPN Dalam Negeri yang menjadi kontributor terbesar dari total PPN dengan proporsi 84,38%, tumbuh positif sebesar 9,86% (yoy). Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi dalam negeri masih tetap terjaga.

Penyumbang Pajak Dalam Negeri tertinggi berikutnya adalah Pajak Penghasilan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp1.165,98 miliar atau sebesar 34,03% dari target APBN, terkontraksi 11,97% (yoy). Hal ini utamanya berasal akibat penurunan pada penerimaan PPh 21 sebesar 37,92% (yoy). Penurunan tersebut sebagai dampak pemungutan PPh 21 yang mulai tahun 2025 terpusat untuk beberapa satuan kerja seperti Polda Lampung, Universitas Lampung, dan UIN Raden Intan. Meski demikian, hal ini tidak berpengaruh bagi penerimaan perpajakan secara nasional karena hanya terjadi perpindahan lokus pencatatan penerimaan. Selain itu, PPh Pasal 25/29 Badan dan Final yang juga menyumbang kontribusi besar untuk PPh juga mengalami perlambatan masing-masing sebesar 2,09% (yoy) dan 8,69% (yoy).

Pajak Lainnya mengalami akselerasi sebesar 232,96% (yoy), terutama didorong oleh implementasi fitur Deposit Pajak pada aplikasi Coretax yang mulai diberlakukan sejak tahun 2025. Fitur ini memberi kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak sekaligus meminimalkan risiko sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran. Peningkatan pemanfaatan fitur ini dapat menjadi indikasi awal adanya kenaikan kepatuhan WP di Provinsi Lampung untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan meminimalisasi risiko denda.

Selain penerimaan dari Pajak, penerimaan Cukai juga menyumbang pendapatan negara di Lampung. Di samping sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, penerimaan Cukai di Lampung telah menyumbang pendapatan negara sebesar Rp9,79 miliar atau tercapai melampaui target hingga 161,76 %. Kinerja ini tumbuh 56,58% (yoy) yang utamanya bersumber dari realisasi atas pemesanan Pita Cukai (CK-1) atas komoditas rokok elektrik.

Tabel 2.3. Realisasi dan Pertumbuhan Kumulatif Penerimaan Pajak Dalam Negeri di Lampung (di luar Cukai) Berdasarkan Sektor s.d. 30 Juni 2025 (miliar rupiah, persen)

Sektor	Realisasi/ Kontribusi	Pertumbuhan Kumulatif (yoy)
Industri Pengolahan	Rp 842,32 28,01%	-15,84% 0,74%
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	Rp 830,66 26,60%	-6,42% 17,89%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 487,70 16,60%	-18,33% 19,17%
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	Rp 224,07 8,04%	1,53% 3,43%
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Rp 204,10 6,41%	17,59% 2,46%
Pengangkutan dan Pergudangan	Rp 103,77 4,74%	-18,07% 23,38%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	Rp 93,92 3,72%	-3,98% 57,28%
Sektor Lainnya	Rp 172,51 5,89%	-9,90% -6,68%

■ Growth % 2024 - 2025 ■ Growth % 2023 - 2024

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, 2025 (diolah)

Di sisi lain, Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional menyumbang penerimaan yang sangat tinggi hingga mencapai 180,80% (yoy), didukung oleh Bea Keluar yang turut tumbuh 658,94% (yoy) akibat naiknya harga referensi CPO beserta turunannya, khususnya minyak kelapa sawit yang menduduki peringkat pertama komoditas terbesar ekspor dari Lampung. Bea Masuk mengalami perlambatan sebesar 40,94 (yoy)





dipengaruhi turunnya importasi komoditas pangan beras dan gula. Pada tahun 2025, pemerintah mencanangkan kebijakan untuk menutup keran impor bahan pangan seperti, beras dan gula guna mendukung program ketahanan pangan.

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana pada Grafik 2.3, tiga sektor yang menyumbang penerima Pajak terbesar di Lampung adalah Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran, , dan Administrasi Pemerintahan dengan kontribusi masing-masing 27,89%, 27,50%, dan 16,15% terhadap total penerimaan Pajak Dalam Negeri di luar Cukai.

Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,74% (yoy). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan kegiatan ekonomi pada industri pati ubi kayu dan minyak mentah kelapa sawit.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mencatat pertumbuhan *double digit* sebesar 17,89% (yoy), terutama ditopang oleh peningkatan kinerja pada sub sektor yang mendominasi yakni perdagangan besar kopi, teh dan kakao, perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan perdagangan besar buah yang mengandung minyak.

Sementara itu, Sektor Administrasi Pemerintahan mengalami perlambatan sebesar 18,33% (yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh Pasal 21 seiring dengan pemusatan pembayaran belanja pegawai dan pemungutan pajak penghasilannya serta kebijakan efisiensi belanja baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di tahun 2025.

Di luar ketiga sektor utama tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan *leading sector* Lapangan Usaha di Lampung menyumbang pertumbuhan signifikan dengan dominasi sub sektor yaitu Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Budidaya Ayam Ras Petelur.

Secara keseluruhan, hingga 30 Juni 2025, Pajak Dalam Negeri di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang konsisten. Di tengah dinamika perdagangan global dan gejolak sosio-ekonomi, kontribusi sektor-sektor strategis regional Lampung menunjukkan ketahanan yang mendorong

pertumbuhan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

2.1.1.2 Analisis Tax Ratio

Tax ratio digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian suatu daerah dengan mengukur perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan PDRB suatu daerah pada periode tertentu. Penerimaan Perpajakan dihitung dengan menjumlahkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Tabel 2.4 menyajikan perhitungan *tax ratio* s.d. 30 Juni 2025 di Lampung.

Tabel 2.4 *Tax Ratio* Penerimaan Pajak s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 di Lampung (miliar rupiah)

Komponen (miliar Rupiah)	Triwulan II 2024	Triwulan II 2025
Pajak Dalam Negeri	3.027,28	3.030,26
Pajak Perdagangan Internasional	473,78	1.330,36
Total Pendapatan Perpajakan	3.501,06	4.360,62
PDRB (ADHB)	236.762,36	256.102,20
Tax Ratio	1,48%	1,70%

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, BPS, 2025 (diolah)

Tax ratio pemerintah pusat sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar 1,70%, meningkat dibandingkan dengan *tax ratio* sampai dengan 30 Juni 2025 yang sebesar 1,48%. Kenaikan angka *tax ratio* ini didorong oleh realisasi Pajak Perdagangan Internasional tumbuh seiring dengan peningkatan harga CPO yang merupakan komoditas utama ekspor di Lampung, Penerimaan Pajak Dalam Negeri juga mengalami pertumbuhan sejalan dengan peningkatan PDRB yang mengindikasikan bahwa kontribusi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan aktivitas ekonomi Provinsi Lampung.

2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp723,07 miliar (66,43% terhadap target). Kinerja positif ini juga selaras dengan pertumbuhan kumulatif yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,02% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

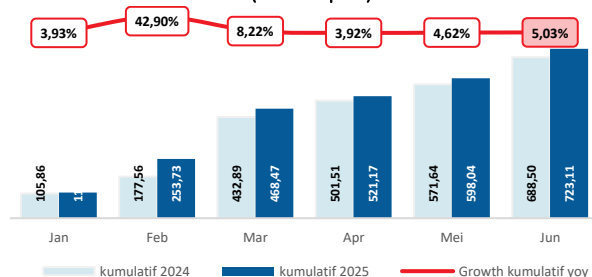
Pertumbuhan kumulatif sampai dengan triwulan II tahun 2025 didorong oleh peningkatan kinerja pada beberapa bidang pelayanan. Satker Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung yang berfokus pada layanan pendidikan mencatatkan





pertumbuhan realisasi pendapatan jasa pendidikan sebesar 5,25% (yoy). Satker PNPB Ditlantas Polda Lampung juga mencatat kinerja positif sebesar 11,96% untuk pelayanan Penerbitan PNPB dan sebesar 39,65% untuk Pendapatan TNKB yang didukung oleh efektivitas penerimaan PNPB dari pemutihan PKB. Kinerja positif ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola keuangan BLU serta meningkatnya efektivitas penegakan hukum.

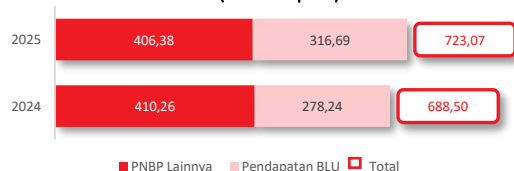
Grafik 2.3 Pertumbuhan Kumulatif PNPB s.d. Triwulan II 2025 (miliar rupiah)



Sumber: TBD, 2025 (diolah)

Sampai dengan akhir Juni 2025, PNPB didominasi oleh PNPB Lainnya dengan kontribusi sebesar 56,20%. PNPB Lainnya terealisasi sebesar Rp406,38 miliar atau 98,39% dari target, terkontraksi tipis 0,95%. Meski demikian realisasi ini hampir mencapai target tahun 2025. Realisasi PNPB Lainnya terutama berasal dari biaya pendidikan perguruan tinggi, dengan porsi terbesar pada Satker ITERA. Pada triwulan II, lonjakan penerimaan STNK dan BPKB turut meningkatkan kontribusi PNPB, didorong program Pemutihan PKB di Provinsi Lampung sejak Mei 2025 yang memberi tambahan penerimaan bagi APBD maupun APBN. Capaian ini mencerminkan optimalisasi penerimaan negara dari sumber non-pajak.

Grafik 2.4 Komposisi PNPB s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar rupiah)



Sumber: TBD, 2025 (diolah)

Pendapatan BLU berkontribusi 43,80% terhadap total PNPB dengan realisasi Rp316,69 miliar atau 46,89% dari target APBN, tumbuh 13,82% (yoy). Realisasi ini didominasi oleh jasa layanan pendidikan pada Satker BLU, terutama Universitas

Lampung dan UIN Raden Intan, serta layanan kesehatan melalui RS Bhayangkara Bandar Lampung. Pertumbuhan tersebut mencerminkan perbaikan kinerja keuangan BLU yang memperluas ruang fiskal untuk belanja lebih efektif dalam peningkatan pelayanan publik.

2.1.1.4 Prognosis/Outlook Pendapatan Negara

Proyeksi Pendapatan Negara di Lampung hingga akhir tahun 2025 disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Triwulan II 2025 dan tren historis penerimaan lima tahun terakhir. Penerimaan yang berasal dari Perpajakan dan PNPB diperkirakan akan terus tumbuh dan mencapai target APBN 2025, dengan proyeksi capaian Rp11,21 triliun atau 100,80% dari target. Optimisme ini didukung oleh beberapa faktor utama di antaranya kinerja solid ekspor komoditas unggulan Lampung dan diprediksi berlanjut hingga akhir tahun, penguatan aktivitas ekonomi pada industri pengolahan serta semakin optimalnya PNPB atas layanan publik. Namun, penurunan belanja pemerintah dan potensi dampak kebijakan tarif resiprokal AS tetap perlu diwaspadai untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan Pendapatan Negara di Provinsi Lampung.

Tabel 2.5. Proyeksi Pendapatan Negara per Triwulan Tahun 2025 Provinsi Lampung (miliar rupiah)

Triwulan	Pajak	PNPB	Total
Realisasi Q1	2.236,56	468,47	2.705,03
Realisasi Q2	2.123,88	254,65	2.378,52
Proyeksi Q3	2.305,19	509,65	2.814,84
Proyeksi Q4	2.886,03	425,37	3.311,40
Total	9.551,67	1.658,12	11.209,79

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Kanwil DJBC Sumbagbar, TBD, 2025 (diolah)

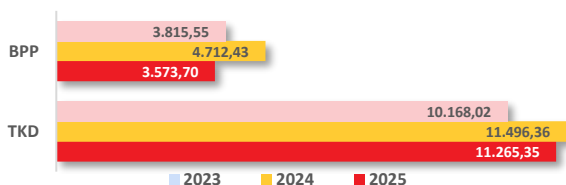
2.1.2 Belanja Negara

Hingga Triwulan II tahun 2025 alokasi Belanja Negara di Lampung tercatat sebesar Rp32.160,94 miliar, turun sebesar 5,33% (yoy). Alokasi ini terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9.062,59 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp23.098,35 miliar. Sampai dengan akhir 30 Juni 2025, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14.839,06 miliar atau 46,20% dari pagu, dan mencatat pertumbuhan negatif sebesar 8,45% (yoy).





Grafik 2.5. Realisasi Komponen Belanja Negara Provinsi Lampung Triwulan II 2023 – 2025 (miliar rupiah)



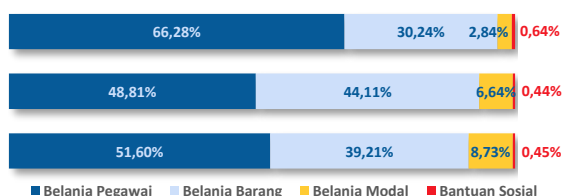
Sumber: TBD, 2025 (diolah)

Realisasi Belanja Negara didominasi oleh penyaluran TKD dengan kontribusi 75,92% dari total Belanja Negara atau secara nominal Rp11.265,35 miliar. Sementara, untuk realisasi BPP memiliki kontribusi 24,08% atau secara nominal Rp3.573,70 miliar.

2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Hingga 30 Juni 2025, realisasi BPP di Provinsi Lampung mencapai Rp3.573,70 miliar atau 39,43% dari pagu. Realisasi ini menggambarkan terjadinya kontraksi yang cukup signifikan yakni 24,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya, disebabkan melemahnya penyerapan pada Belanja Barang dan Belanja Modal.

Grafik 2.6. Distribusi Komponen BPP Per Jenis Belanja Triwulan II 2023 – 2025 (miliar rupiah)



Sumber: TBD, 2025 (data diolah)

Melihat kontribusi dari jenis BPP terhadap total realisasi BPP, pada Triwulan II-2023 dan Triwulan II-2024, komponen Belanja Pegawai menjadi kontributor terbesar realisasi BPP. Sama halnya yang terjadi pada Triwulan II 2025 realisasi belanja pegawai makin mendominasi seiring dengan turunnya realisasi Belanja Barang disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi Belanja Pegawai mendominasi dengan realisasi sebesar 66,28% dari total realisasi BPP, diikuti oleh Belanja Barang (30,24%), Belanja Modal (2,84%), dan Bantuan Sosial (0,64%).

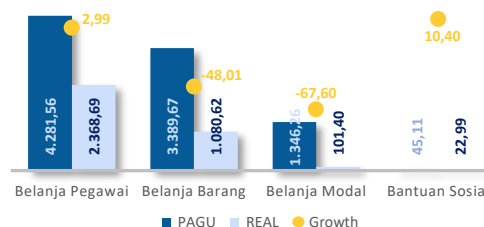
2.1.2.1.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2025 mencerminkan kebijakan efisiensi anggaran

sesuai Inpres Nomor 1/2025 dan KMK Nomor 29/2025. Dari seluruh jenis belanja, hanya belanja pegawai yang tumbuh positif, didorong penyesuaian gaji dan sifatnya yang rigid, sementara belanja barang, modal, dan bantuan sosial mengalami kontraksi. Pola ini menegaskan konsolidasi fiskal dengan fokus pada belanja prioritas, pengendalian operasional, dan disiplin anggaran.

Hingga 30 Juni 2025, belanja pegawai sebagai komponen terbesar BPP telah terealisasi sebesar Rp2.368,69 miliar atau 55,32% dari pagu, tumbuh 2,99% (yoy), dipicu kenaikan tunjangan kinerja, profesi, serta pembayaran tunjangan ke-13. Realisasi ini menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui perputaran penghasilan aparatur yang mengalir ke sektor ritel, jasa, dan UMKM, memperkuat konsumsi masyarakat di tengah tekanan inflasi. Arus pendapatan rutin tersebut menciptakan *multiplier effect* yang signifikan dan sejalan dengan fungsi *countercyclical* APBN dalam menopang pertumbuhan di tengah dinamika global maupun domestik.

Grafik 2.7. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan BPP per Jenis Belanja (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Sebagai komponen terbesar kedua Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Barang terealisasi Rp1.080,62 miliar atau 31,88% dari pagu, namun terkontraksi 48,01% (yoy) seiring penurunan alokasi pagu 38,98% (yoy). Kontraksi ini tidak hanya mencerminkan pelemahan aktivitas, tetapi juga pergeseran pola belanja menuju efektivitas dan prioritas pembangunan sesuai arahan efisiensi fiskal pemerintah.

Realisasi terutama ditopang oleh belanja operasional kantor, pemeliharaan aset, serta beban BLU yang terkait langsung dengan pelayanan publik. Dengan demikian, meski menurun secara agregat, Belanja Barang tetap berperan penting menjaga kualitas layanan pemerintahan. Kebijakan efisiensi





ini juga menjadi langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan fiskal dan mengarahkan pembiayaan pada program prioritas, sehingga APBN tetap berfungsi sebagai instrumen pembangunan sekaligus stabilisasi ekonomi.

Belanja Modal mengalami kontraksi terdalam sebesar 67,60% (yoy), dengan realisasi hanya Rp101,40 miliar atau 7,53% dari pagu. Rendahnya penyerapan dipengaruhi keterlambatan penyelesaian kontrak bernilai besar yang memerlukan persetujuan menteri, serta tambahan pagu dari pusat yang baru bisa dieksekusi setelah revisi anggaran. Kondisi ini berpotensi menahan *multiplier effect* pada penyerapan tenaga kerja dan bahan baku sektor konstruksi, sehingga percepatan belanja menjadi kunci menjaga keberlanjutan proyek strategis sesuai target tahun anggaran.

Hingga Triwulan II, realisasi Belanja Bantuan Sosial mencapai 50,96% atau tumbuh 10,40% (yoy), terutama melalui program KIP Kuliah di UIN Raden Intan Lampung, UIN Jurai Siwo Lampung, dan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu. Pola penyaluran KIP mengikuti kalender akademik sehingga pencairan berikutnya dilakukan setelah penerimaan mahasiswa baru dan seleksi penerima, yang berpotensi mendorong peningkatan realisasi signifikan pada semester II dan menumpuk di akhir tahun jika tidak diantisipasi.

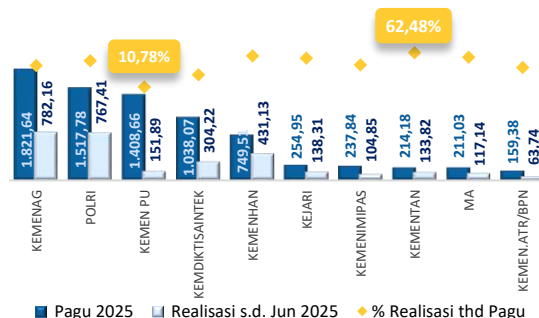
2.1.2.1.2 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga

Capaian kinerja BPP pada Triwulan II tahun 2025 didukung oleh kontribusi sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) dengan alokasi pagu terbesar di Provinsi Lampung, yang secara keseluruhan mencapai 83,95% dari total pagu BPP tahun 2025.

Kementerian Agama menempati alokasi terbesar di Lampung dengan pagu Rp1.821,64 miliar, sebagian besar untuk Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan guru/tenaga pendidik). Disusul Kepolisian RI Rp1.517,78 miliar dan Kementerian PU Rp1.408,66 miliar. Dari sisi kinerja, Kementerian Pertanian mencatat realisasi tertinggi 62,48%, terutama dari

Belanja Barang Lainnya berupa bantuan alat pertanian, bibit, dan sarana produksi. Sebaliknya, empat K/L menunjukkan serapan rendah, yakni Kementerian PU 10,78%, Kementerian Dikisaintek 29,31%, Kementerian ATR/BPN 39,99%, serta Kementerian Imigrasi dan Mipas 44,09%. Rendahnya serapan Kementerian PU dipengaruhi keterlambatan realisasi Belanja Modal akibat proses kontrak dan lelang, tambahan pagu yang baru turun di Triwulan II, serta sebagian alokasi yang masih diblokir untuk efisiensi.

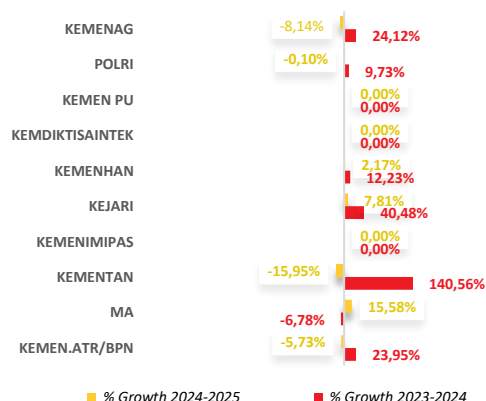
Grafik 2.8. Perbandingan Pagu dan Realisasi pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar Provinsi Lampung Tahun 2025 (miliar Rp, persen)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Berdasarkan persentase pertumbuhan realisasi BPP dari 10 K/L dengan pagu terbesar di Provinsi Lampung (Grafik 2.9), peningkatan tertinggi dicapai Mahkamah Agung sebesar 15,58% (yoy), diikuti Kejaksaan RI sebesar 7,81% (yoy) dan Kementerian Pertahanan sebesar 2,17% (yoy).

Grafik 2.9. Pertumbuhan Realisasi Belanja pada Sepuluh K/L Pagu Terbesar (persen)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Kenaikan realisasi didorong oleh kebijakan pengecualian efisiensi anggaran bagi beberapa K/L. Sebaliknya, serapan belum optimal terlihat pada penurunan realisasi di Kementerian Pertanian 15,95% (yoy), Kementerian Agama 8,14% (yoy), dan





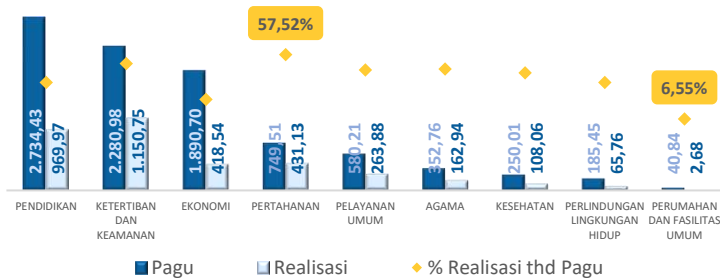
Kementerian ATR/BPN 5,73% (yoy). Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan lemahnya kinerja, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang menurunkan pagu tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya.

2.1.2.1.3 Berdasarkan Fungsi

Analisis sebaran belanja pemerintah pusat (BPP) berdasarkan fungsi di Provinsi Lampung pada tahun 2025 menunjukkan alokasi yang berorientasi strategis.

Prioritas utama diberikan pada Fungsi Pendidikan dengan porsi signifikan 30,17%, mencerminkan komitmen pemerintah untuk investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia unggul, khususnya melalui Pendidikan Tinggi. Alokasi ini secara berurutan diikuti oleh Fungsi Ketertiban dan Keamanan (25,16%), Fungsi Ekonomi (20,86%), Fungsi Pertahanan (8,27%), Fungsi Pelayanan Umum (6,40%), Fungsi Agama (3,89%), Fungsi Kesehatan (2,76%), Fungsi Pelindungan Lingkungan Hidup (2,05%), dan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (0,45%) menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan daerah.

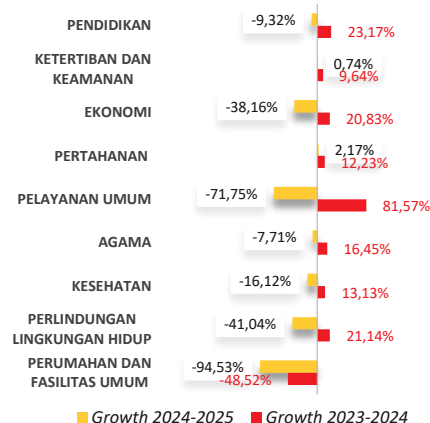
Grafik 2.10. Realisasi BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2025 (miliar Rp, persen)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Dari sisi realisasi anggaran per 30 Juni 2025, terdapat penyerapan yang optimal pada sektor vital. Fungsi Pertahanan mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 57,52%, yang dialokasikan pada dukungan layanan manajemen internal, penguatan prasarana, dan pelatihan bidang pertahanan-keamanan. Fungsi Ketertiban dan Keamanan menyusul dengan 50,45%, dialokasikan untuk gaji aparat, peningkatan layanan publik, dan penegakan hukum. Realisasi cepat ini menegaskan kesiapan dalam menjaga iklim kondusif bagi pembangunan.

Grafik 2.11. Tren Pertumbuhan BPP Berdasarkan Fungsi Tahun 2023-2025 (miliar rupiah)



Sumber: SINTESA, 2025 (data diolah)

Dari sisi pertumbuhan, Fungsi Pertahanan mencatat kenaikan 2,17% (yoy) dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan tumbuh 0,74% (yoy). Sementara itu, tujuh fungsi lain mengalami pertumbuhan negatif akibat penurunan alokasi pagu 2025 dibanding 2024. Fenomena ini mencerminkan strategi alokasi anggaran yang dinamis, dengan fokus pemerintah pada prioritas jangka panjang dan kesinambungan pembangunan.

Sementara itu, alokasi pada infrastruktur vital seperti penyediaan air minum masih terkendala sinkronisasi perencanaan dan eksekusi yang belum optimal. Namun, dengan terbitnya SK Menteri di akhir triwulan II, hambatan administratif dapat dikatakan mulai terurai sehingga jalur pelaksanaan proyek semakin terbuka. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi pembangunan pada triwulan berikutnya, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan lebih terencana, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.1.2.1.4 Belanja Pemerintah Pusat Per kapita

Perhitungan BPP Per Kapita menggunakan realisasi BPP hingga Juni 2023–2025 yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan berdasarkan data resmi BPS. Pada 2025, jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat 9,52 juta jiwa, meningkat 1,10% (yoy) dibanding 2024.

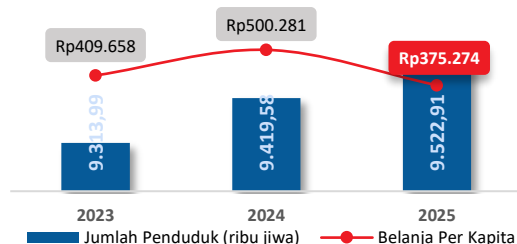
Pada periode Triwulan II 2025, BPP Per Kapita di Lampung tercatat sebesar Rp375.274, mengalami kontraksi signifikan yaitu 24,99% (yoy) seiring dengan realisasi BPP yang menurun dibandingkan





tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan menurunnya rata-rata pengeluaran pemerintah per penduduk dibanding periode sebelumnya sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun yang tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya dukungan pemerintah, melainkan penajaman prioritas belanja ke program yang lebih strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Grafik 2.12. Perkembangan BPP Per Kapita Triwulan II 2025 (rupiah, jiwa)



Sumber: OM-SPAN, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

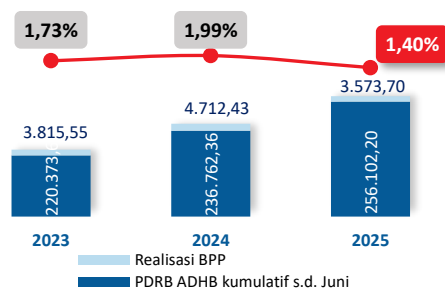
Sebaliknya, hal ini dapat diartikan sebagai penajaman prioritas belanja, dengan pergeseran fokus ke program yang lebih strategis, mendesak, serta memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut, pemerintah daerah tetap menjaga kualitas layanan publik sekaligus memastikan setiap rupiah belanja memberi nilai tambah optimal bagi pembangunan.

2.1.2.1.5 Kontribusi BPP Terhadap PDRB

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Provinsi Lampung hingga 30 Juni 2025 tercatat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I sebesar 1,40%. Namun, kontribusi ini mengalami kontraksi sebesar 0,59% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan kontribusi tersebut mencerminkan pergeseran peran belanja pemerintah terhadap PDRB Lampung melalui komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), yang utamanya disebabkan oleh pertumbuhan negatif pada Belanja Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar 48,01% dan 67,60% (yoy). Namun demikian, kontraksi yang lebih dalam dapat ditekan oleh kinerja positif pada Belanja Sosial sebesar 10,40% serta Belanja Pegawai sebesar 2,99% (yoy), sehingga tetap menjaga stabilitas PKP.

Grafik 2.13. Perkembangan Kontribusi BPP Terhadap PDRB 2023 – 2025 (miliar Rp, persen)



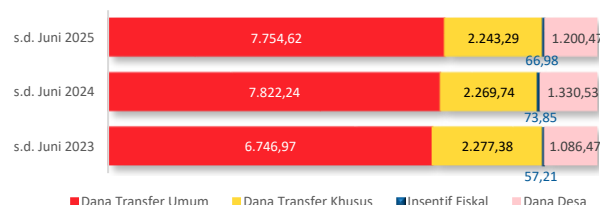
Sumber: OM-SPAN, SINTESA, BPS Provinsi Lampung, 2025 (diolah)

Perkembangan ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang menekankan efisiensi serta penajaman prioritas belanja. Penguatan pada belanja sosial dan pegawai berperan menjaga kesinambungan layanan publik dan daya beli masyarakat, sementara realisasi belanja barang dan modal diproyeksikan meningkat pada periode berikutnya seiring dengan penyelesaian revisi anggaran, percepatan proses pengadaan, dan penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan strategis. Dengan demikian, peran PKP diharapkan tetap terjaga secara seimbang antara fungsi rutin dan belanja pembangunan, serta memberi kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan selanjutnya.

2.1.2.2 Transfer ke Daerah

Kebijakan TKD pada Tahun 2025 menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal antara pusat dan daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui optimalisasi penggunaan TKD pada sektor-sektor prioritas dan produktif, serta perbaikan tata kelola TKD yang berkelanjutan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian di daerah.

Grafik 2.14. Distribusi Penyaluran TKD s.d. Triwulan II 2023 – 2025 per Jenis (miliar Rp, persen)



Sumber: SIMTRADA, SINTESA, 2025 (diolah)

Alokasi TKD pada tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp23.060,04 miliar, meningkat 1,34% (yoy), yang terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU), Dana



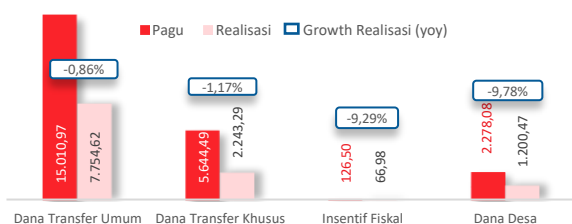


Transfer Khusus (DTK), Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. DTU terdiri dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara DTK terdiri dari Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik.

Peningkatan alokasi TKD utamanya berasal dari peningkatan DTU alokasi berupa DAU dan DBH naik sebesar 2,55% (yoy) dan 11,29% (yoy), sedangkan kenaikan DTK berupa DAK Non Fisik sebesar 9,58% (yoy). Sementara, kinerja penyaluran TKD sampai dengan 30 Juni 2025 secara nominal telah tersalurkan sebesar Rp11.265,35 miliar atau 48,85% dari pagu, tercatat berkontraksi 2,01% (yoy).

Dalam tiga tahun terakhir, penyaluran DTU masih mendominasi TKD di Provinsi Lampung dengan proporsi yang meningkat pada 2024 dan kembali naik pada 2025. Perkembangan distribusi penyaluran TKD hingga triwulan II periode 2023–2025 ditunjukkan pada Grafik 2.14.

Grafik 2.15. Pagu, Realisasi dan Pertumbuhan Penyaluran TKD berdasarkan DTU, DTK, Dana IF, dan Dana Desa s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp)



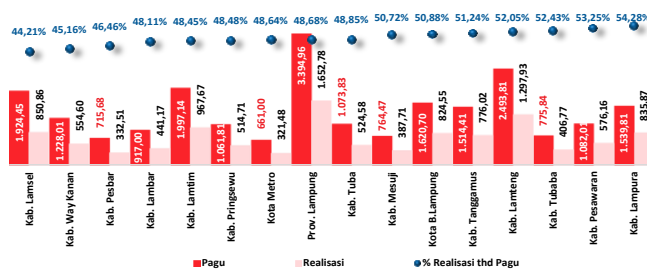
Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Pada Triwulan II 2025, penyaluran DTU mendominasi dengan porsi 68,84% dari total TKD, diikuti DTK 19,91%, Dana Desa 10,66%, dan Dana Insentif Fiskal 0,59%. DTU terutama berasal dari DAU, sementara DTK didominasi DAK Non Fisik. Sampai dengan 30 Juni 2025, penyaluran DTU mencapai Rp7.754,62 miliar atau 51,66% pagu, namun berkontraksi 0,86% (yoy) akibat realisasi DAU turun 1,16% (yoy), meski DBH tumbuh 8,99% (yoy). DTK juga berkontraksi 1,17% (yoy) dengan realisasi Rp2.243,29 miliar atau 39,74% pagu, terdiri dari DAK Fisik Rp4,74 miliar atau 0,42% pagu, dan DAK Non Fisik Rp2.238,54 miliar atau 49,52% dari pagu yang dialokasikan, sementara komponen Hibah belum tersalurkan.

Hingga akhir triwulan II TA 2025, realisasi Dana Insentif Fiskal mencapai Rp66,98 miliar atau 52,95%

dari alokasi Rp126,50 miliar. Meski berkontraksi 9,29% (yoy), capaian ini lebih baik dibanding periode sama tahun lalu yang hanya mencapai 29,08% dari pagu, seiring dengan penurunan alokasi anggaran sebesar 50,18%. Sementara itu, penyaluran Dana Desa tercatat Rp1.200,47 miliar atau 52,70% dari alokasi, namun mengalami kontraksi 9,78% (yoy).

Grafik 2.16. Pagu, Realisasi, dan Penyaluran TKD s.d. Triwulan II 2025 per Pemerintah Daerah (miliar Rp, persen)

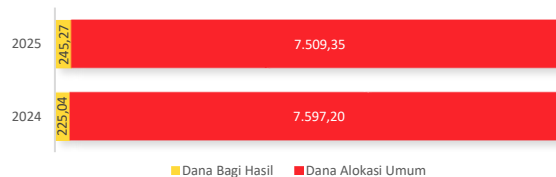


Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik tersebut, hingga 30 Juni 2025, Kabupaten Lampung Utara mencatat persentase penyaluran TKD tertinggi sebesar 54,28% dari alokasi, didukung realisasi DAU dan DAK Non Fisik yang relatif baik. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Selatan menjadi yang terendah dengan persentase 44,21% dari pagu, dipengaruhi rendahnya penyaluran DAU yang baru mencapai 44,58%, terendah di antara seluruh pemerintah daerah.

2.1.2.2.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 2.17. Komponen Penyaluran DTU s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (miliar Rp, persen)



Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi DTU Tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp15.101,97 miliar, meningkat 2,92% (yoy) dari alokasi tahun 2024. Sampai dengan 30 Juni 2025, DTU telah tersalurkan sebesar Rp7.754,62 miliar atau 51,66% dari pagu, yang terdiri dari komponen DAU dan DBH.

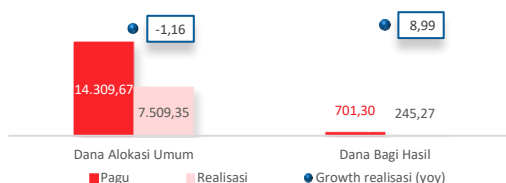
Penyaluran DTU hingga akhir periode tercatat berkontraksi 0,86% (yoy), dipengaruhi penurunan realisasi DAU sebesar 1,16% (yoy) meski DBH





tumbuh 8,99% (yoy). Penyaluran komponen DAU masih mendominasi dengan porsi 96,84%, sedangkan DBH hanya berkontribusi 3,16%.

Grafik 2.18. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DTU s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)

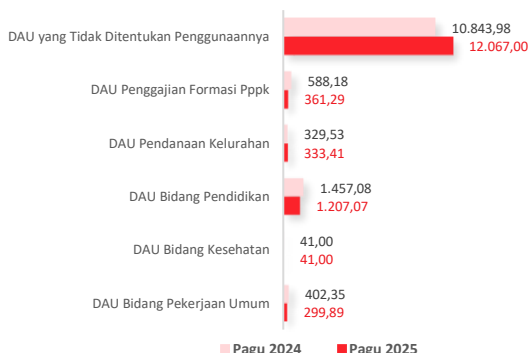


Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Pada Tahun 2025, Alokasi DAU di Provinsi Lampung sebesar Rp14.309,67 miliar, meningkat 2,55% (yoy), yang terdiri dari dua jenis DAU yakni DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*). Rincian alokasi DAU per jenis sebagaimana pada Grafik 2.19.

Pada periode Bulan Januari–Juni 2025, penyaluran DAU di Provinsi Lampung mencapai Rp7.509,35 miliar atau 52,48% dari pagu, terkontraksi 1,16% (yoy). DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya tersalur tepat waktu setiap bulan dengan total Rp6.951,95 miliar, sedangkan DAU Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp557,39 miliar telah terealisasi hampir di seluruh jenis, kecuali untuk Pekerjaan Umum dan Penggajian Formasi PPPK Daerah yang hingga triwulan II belum mencatat realisasi.

Grafik 2.19. Pagu DAU Per Jenis Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)

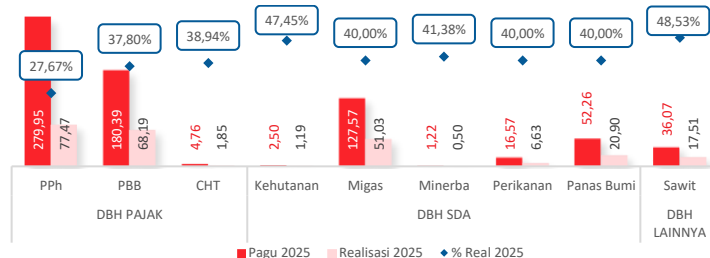


Sumber: OMSPAN TKD, 2025 (diolah)

Komponen DBH tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp701,30 miliar, tumbuh 11,29% (yoy), terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), dan DBH Lainnya. Alokasi DBH dihitung berdasarkan data tahun 2024 yang diproyeksikan hingga semester II

dengan formula dan kinerja. Hingga Triwulan II 2025, penyaluran DBH mencapai Rp245,27 miliar atau 34,97% pagu, naik 8,99% (yoy) seiring peningkatan hampir semua jenis penyaluran kecuali DBH PPh dan DBH Lainnya, serta didukung kenaikan pagu dari tahun 2024.

Grafik 2.20. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DBH Per Jenis s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)



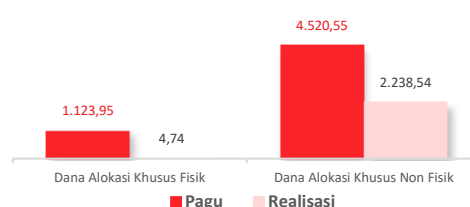
Sumber: OMSPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi DBH Pajak menjadi porsi terbesar dari total DBH di Provinsi Lampung. Hingga 30 Juni 2025, DBH PPh tersalur Rp77,47 miliar atau 27,67% dari pagu, sedangkan DBH PBB sebesar Rp68,19 miliar atau 37,80% pagu. Sementara dari sektor SDA, penyaluran terbesar berasal dari DBH Migas Rp51,03 miliar atau 40% pagu, dan DBH Panas Bumi Rp20,90 miliar atau 40% dari total pagu.

2.1.2.2.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Dalam APBN Provinsi Lampung TA 2025, alokasi DTK sebesar Rp5.644,49 miliar atau naik 1,14% (yoy), terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Hingga 30 Juni 2025, realisasi DTK secara nominal mencapai Rp2.243,29 miliar atau sebesar 39,74% dari pagu, terkontraksi 1,17% (yoy) dibanding tahun lalu.

Grafik 2.21. Pagu dan Realisasi Penyaluran DTK s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

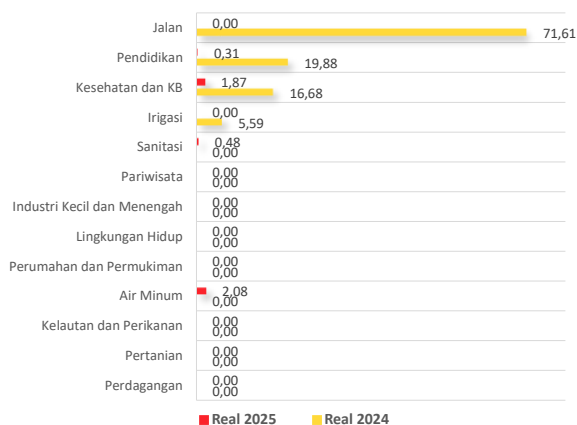
Alokasi DAK Fisik TA 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp1.123,95 miliar, dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp1.453,58 miliar tercatat tumbuh negatif sebesar 22,68% (yoy).





Realisasi DAK Fisik hingga Triwulan II 2025 hanya mencapai Rp4,74 miliar atau 0,42% dari pagu dan mengalami kontraksi 95,8% (yoy), hal tersebut menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan negatif pada DTK. Sementara itu, penyerapan DAK Non Fisik hingga periode yang sama tercatat sebesar Rp2.238,54 miliar atau 49,52% dari pagu.

Grafik 2.22. Realisasi DAK Fisik Per Bidang s.d. Triwulan II-2024 dan 2025 (miliar, Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Hingga 30 Juni 2025, hanya empat bidang yang memiliki realisasi DAK Fisik, sementara bidang lainnya belum terealisasi akibat keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Realisasi DAK Fisik bidang Air Minum mencapai Rp2,08 miliar, disusul bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp1,87 miliar, kemudian bidang Sanitasi sebesar Rp0,48 miliar, dan bidang Pendidikan sebesar Rp0,31 miliar.

Selanjutnya, untuk Komponen DAK Non Fisik, alokasi pagu Tahun 2025 di Provinsi Lampung secara total sebesar Rp4.520,55 miliar dengan realisasi 2.238,54 miliar atau naik 9,58% (yoy) dari alokasi Tahun 2024. DAK Non Fisik di Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis yang ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.5.

Sampai 30 Juni 2025, DAK Non Fisik di Provinsi Lampung telah tersalur Rp2.238,54 miliar atau 49,52% dari pagu, meningkat 4,25% (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi percepatan penyaluran beberapa jenis DAK Non Fisik seperti Dana TPG ASN-D, Dana BOS, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana BPP Perpustakaan Daerah.

Tabel 2.6. Pagu, Realisasi, dan Pertumbuhan Penyaluran DAK Non Fisik Per Jenis Tahun 2025 (miliar, Rp)

Jenis	Pagu 2025	Realisasi 2025	% Real thd Pagu	Realisasi 2024	% Growth Realisasi (yoy)
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	2.121,24	1.070,91	50,49%	942,93	13,57%
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	21,34	4,36	20,44%	9,69	-54,99%
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	20,44	0,00	0,00%	19,76	-100,00%
Dana Bantuan Operasional Sekolah	1.661,17	853,17	51,36%	848,01	0,61%
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	413,98	169,43	40,93%	186,45	-9,13%
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	90,44	45,22	50,00%	46,73	-3,22%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	122,77	62,01	50,51%	62,72	-1,12%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	40,05	20,61	51,47%	21,41	-3,75%
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5,36	2,68	50,00%	2,75	-2,61%
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6,11	3,06	50,00%	3,16	-3,21%
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,15	4,35	35,78%	3,72	17,00%
Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	5,48	2,74	50,00%	-	-
Total	4.520,55	2.238,54	49,52%	2.147,32	4,25%

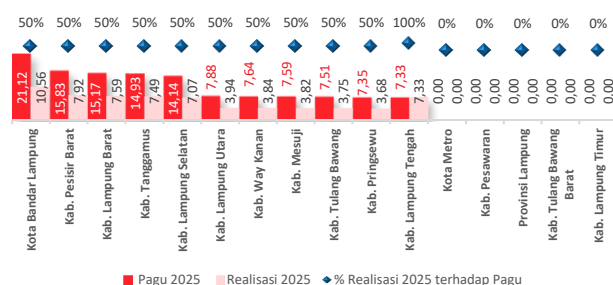
Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Sebaliknya, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN-D, Dana BOK, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana BOP–Pendidikan Anak Usia Dini, Dana BOP–Pendidikan Kesetaraan, Dana BOP–Museum dan Taman Budaya, dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak justru menurun secara tahunan. Adapun Dana TPG ASN-D belum terdapat realisasi.

2.1.2.2.3 Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal

Alokasi Dana Insentif Fiskal Provinsi Lampung tahun 2025 sebesar Rp126,50 miliar, seluruhnya berupa penghargaan atas kinerja tahun sebelumnya yang diberikan kepada 11 pemda. Penilaian didasarkan pada dukungan daerah terhadap kebijakan nasional, antara lain pengendalian inflasi, penggunaan Produk Dalam Negeri, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta percepatan realisasi APBD.

Grafik 2.23. Pagu dan Realisasi Insentif Fiskal Lampung Tahun 2025 per Pemda s.d. 30 Juni 2025 (miliar Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Alokasi tahun 2025 mengalami kontraksi 50,18% (yoy) karena belum ada tambahan atas kinerja tahun berjalan. Hingga 30 Juni 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp66,98 miliar atau 52,95% dari pagu, terkontraksi 9,29% (yoy). Seluruh pemda dengan pagu





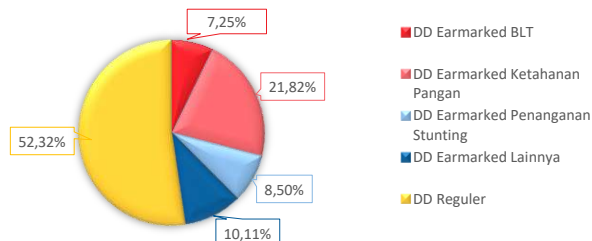
Dana Insentif Fiskal telah menyalurkan 50% dari alokasi, dengan Kabupaten Lampung Tengah yang telah merealisasikan 100% dari pagu.

2.1.2.2.4 Dana Desa

Pada 2025, pagu Dana Desa terbagi atas dana desa yang ditentukan penggunaannya (earmarked) dan yang tidak ditentukan penggunaannya (non-earmarked). Kedua jenis Dana Desa disalurkan dalam dua tahap. Pagu Dana Desa Tahun 2025 di Provinsi Lampung sebesar Rp2.278,08 miliar, mengalami kontraksi 2,47% (yoy).

Alokasi Dana Desa tahun 2025 terdiri dari Dana Desa Reguler sebesar Rp1.191,95 miliar, Dana Desa *Earmarked* Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp165,08 miliar, Dana Desa *Earmarked* Ketahanan Pangan sebesar Rp497,04 miliar, dan Dana Desa *Earmarked* Program Pencegahan dan Penanganan *Stunting* sebesar Rp193,72 miliar. Jenis Dana Desa *Earmarked* di Tahun 2025 juga mengalami penambahan yaitu Padat Karya, Teknologi dan Informasi, Potensi Desa, dan Perubahan Iklim dengan total alokasi Rp230,29 miliar.

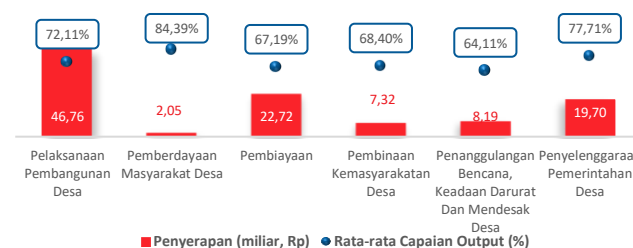
Grafik 2.24. Distribusi Pagu Dana Desa *Earmarked* dan Non-*Earmarked* Tahun 2025 (miliar Rp)



Sumber: OM-SPAN TKD, 2025 (diolah)

Hingga 30 Juni 2025, Dana Desa yang tersalurkan di Provinsi Lampung sebesar Rp1.200,47 miliar, terdiri dari Dana Desa *Earmarked* Rp661,79 miliar dan Dana Desa Reguler Rp538,68 miliar. Penyaluran ini terkontraksi 9,78% (yoy), dipengaruhi *redesign* kebijakan penyaluran dari tiga tahap menjadi dua tahap, pemberian *reward* berupa persentase penyaluran Dana Desa Non *Earmarked* Tahap I yang lebih besar bagi Desa Mandiri, serta peningkatan kepatuhan pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur.

Grafik 2.25. Clustering Penyerapan Dana Desa s.d. Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)



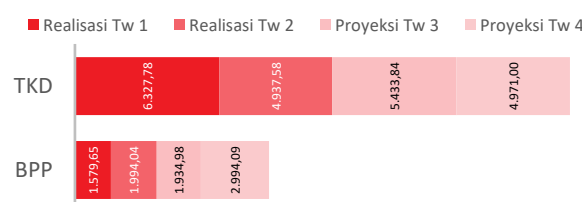
Sumber: OM-SPAN, data sementara diakses 22 Agustus 2025 (diolah)

Dari total Dana Desa yang tersalur, dana yang telah terserap dan dilaporkan pemda sebesar Rp106,75 miliar. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencatat penyerapan tertinggi Rp46,76 miliar, dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta fasilitas kesehatan desa, seperti jalan usaha tani, jembatan, gedung posyandu, dan ambulans. Sementara itu, dari rata-rata capaian output, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berhasil mencatat capaian terbesar yakni 84,39%, antara lain untuk pelatihan keterampilan, wirausaha dan UMKM, serta penguatan BUMDes dan koperasi desa.

2.1.2.3 Prognosis/Outlook Belanja Negara

Proyeksi realisasi Belanja Negara disusun dengan mengakumulasikan proyeksi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Kedua komponen tersebut diestimasi menggunakan metode *Moving Average 5 periode* (MA(5)), yang memanfaatkan data historis lima tahun terakhir. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan konsistensi dan validitas dalam melakukan estimasi.

Grafik 2.26. Proyeksi/Outlook Belanja Negara Regional Lampung Tahun 2025 (miliar, Rp)



Sumber: ALCo, RFB, 2025 (diolah)

Memasuki triwulan III, Belanja Negara diperkirakan Rp22.207,87 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp5.508,68 miliar dan Transfer ke Daerah Rp16.699,19 miliar. Dengan mempertimbangkan realisasi hingga Triwulan II serta pola historis penyerapan, total Belanja Negara diproyeksikan





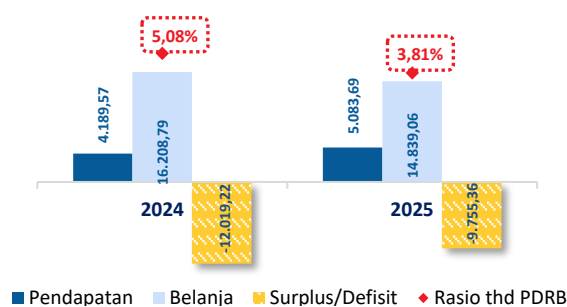
Rp30.172,96 miliar hingga akhir tahun atau 93,82% dari pagu, mencakup BPP Rp8.502,77 miliar dan TKD Rp21.670,20 miliar. Secara historis, penyerapan cenderung meningkat signifikan menjelang akhir tahun seiring percepatan implementasi program dan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sebagai strategi optimalisasi belanja.

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Hingga Triwulan II, APBN di Provinsi Lampung mencatat defisit Rp9.755,36 miliar atau menyempit 18,84% (yoy) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Penyempitan ini terutama didorong pertumbuhan Penerimaan Negara yang sangat kuat, yaitu sebesar 21,34%. Meskipun Belanja Negara tumbuh negatif, peningkatan pendapatan yang signifikan berhasil menekan defisit sehingga lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

Pada Triwulan II, rasio defisit APBN terhadap PDRB tercatat 3,81%, turun 1,27% dibanding periode sama 2024 yang mencapai 5,08%. Penurunan rasio ini dipengaruhi dua faktor utama: peningkatan realisasi Pendapatan Negara yang substansial dan penurunan realisasi Belanja Negara, yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan efisiensi anggaran secara konsisten.

Grafik 2.27. Surplus/Defisit APBN Regional Lampung Tahun 2024-2025 (miliar, Rp)



Sumber: OM-SPAN, 2025 (diolah)

2.1.4 Capaian Output Sektoral

Belanja Negara di Bidang Kesehatan diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan guna meningkatkan derajat kesehatan serta produktivitas masyarakat. Pemerintah terus memperluas pemerataan akses layanan kesehatan dasar agar manfaatnya dirasakan lebih inklusif.

Rincian realisasi Belanja Negara di Bidang Kesehatan pada Triwulan II 2025 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Real	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,44	4,84	51,25%	51	paket
Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	5,62	3,44	61,24%	74	lembaga
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4,23	0	0,00%	3	layanan
Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS)	2,91	0,48	16,35%	113	orang
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2,43	0,16	6,74%	7	paket
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	2,31	0,77	33,35%	100	lembaga
	2,28	-	0,00%	6	unit

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Sementara itu, belanja di bidang pendidikan tetap menjadi fokus utama dalam APBN 2025 sebagai wujud komitmen pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Penguatan investasi pendidikan ini diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Maju melalui peningkatan akses, mutu, serta relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Realisasi belanja pada bidang ini selama Triwulan II 2025 telah memberikan sejumlah capaian strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Capaian Output Strategis Bidang Pendidikan Triwulan II 2025 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Real	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	186,21	64,34	34,55%	113	layanan
PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	164,58	9,21	5,59%	6	lembaga
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	157,20	67,95	43,22%	43	orang
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)	110,59	12,49	11,29%	71	layanan
Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	106,82	2,58	2,42%	10	paket
Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	86,72	0,93	1,07%	10	paket
	84,63	26,74	31,60%	90	orang

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

Pembangunan infrastruktur di Lampung terus dilanjutkan sebagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan jaringan sumber daya air guna mendukung ketahanan sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan sektor properti yang





berkontribusi pada penguatan perekonomian daerah. Realisasi Belanja Negara di Bidang Infrastruktur pada Triwulan II 2025 telah menghasilkan sejumlah output strategis yang tercantum dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Capaian Output Strategis Bidang Infrastruktur Triwulan I 2025 (miliar Rp, persen)

Uraian	Pagu	Real	% Real	Capaian Output	
				Volume	Satuan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	7,32	0,06	0,76%	45	Hektar
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	6,87	0,05	0,73%	1	SR
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	5,72	0,16	2,75%	6	KK
Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	3,92	0,00	0%	0	Unit
Pembinaan & Pengawasan Pengembangan SPAM	2,37	0,26	10,80%	19	Daerah
Pembinaan & Pengawasan Pengembangan Sanitasi	1,22	0,17	14,01%	14	Daerah

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah)

2.1.5 Kinerja Penyaluran Kredit Program Pemerintah

Kredit program pemerintah berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro. Selain sebagai instrumen fiskal, kredit program hadir sebagai sarana pemberdayaan masyarakat serta penguatan inklusi keuangan. Kanwil DJPb Provinsi Lampung memastikan penyaluran berjalan optimal dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

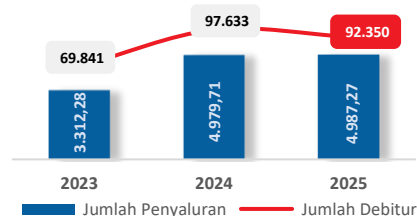
2.1.5.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Hingga 30 Juni 2025, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung mencapai Rp4.987,27 miliar kepada 92.350 debitur. Penyaluran pada triwulan II 2025 tumbuh 0,15% (yoy), didorong oleh dominasi sektor pertanian dan perdagangan sebagai sektor penerima utama KUR, komitmen perbankan dalam mendukung UMKM, serta kinerja positif perekonomian regional.

Berdasarkan skema, penyaluran terbesar tercatat pada KUR Mikro sebesar Rp3.728,54 miliar kepada 86.727 debitur, diikuti KUR Kecil Rp1.256,02 miliar (5.372 debitur), Supermikro Rp2,23 miliar (237 debitur), dan TKI Rp0,48 miliar (14 debitur). Skema Mikro konsisten menjadi pilihan utama dalam tiga

tahun terakhir berkat fleksibilitas dan jangkauan luasnya, sedangkan skema TKI relatif terbatas akibat kendala struktural.

Grafik 2.28 Tren Penyaluran KUR di Provinsi Lampung s.d. Triwulan II Tahun 2023-2025 (miliar rupiah, debitur)



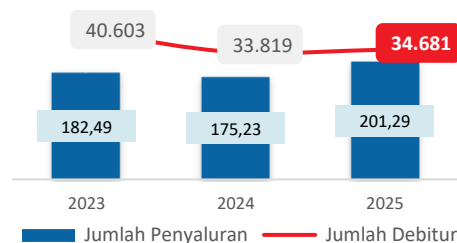
Sumber: SIKP, 2025 (diolah)

Penyaluran KUR di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi pada sektor Pertanian dan Perdagangan dengan porsi 90,19% atau 83.294 debitur, sejalan dengan peran kedua sektor tersebut sebagai unggulan daerah. Secara spasial, penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp1.227,20 miliar kepada 23.982 debitur. Dari sisi perbankan, BRI mendominasi dengan kontribusi 85,99%, diikuti Bank Mandiri 7,03% dan BPD Lampung 4,94%

2.1.5.2 Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi ditargetkan untuk para pelaku usaha yang masih berskala sangat kecil. Realisasi penyaluran pembiayaan UMi di Lampung hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp201,29 miliar kepada 34.681 debitur yang sebagian besar disalurkan melalui PT Penanaman Nasional Madani (PNM) secara *linkage*. Nilai penyaluran tersebut meningkat 14,87% (yoy).

Grafik 2.29 Penyaluran UMi di Lampung s.d. Triwulan II Tahun 2023-2025



Sumber: SIKP UMi, 2025 (diolah)

Secara spasial, hingga triwulan II 2025 penyaluran UMi terbesar terdapat di Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp27,99 miliar kepada 4.928 debitur, disusul Lampung Tengah dan Lampung Utara, sementara Kota Metro tercatat terendah





Rp39 juta untuk 3 debitur. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran usaha mikro dalam memanfaatkan pembiayaan serta hasil sinergi pemerintah, lembaga penyalur, dan OJK. Program UMi berkontribusi dalam penguatan UMKM, perluasan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, yang dioptimalkan melalui sosialisasi, fasilitasi akses, koordinasi perbankan, serta money rutin.

2.1.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Hingga 30 Juni 2025, pelaksanaan APBN di Provinsi Lampung menunjukkan peran fiskal yang solid dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penerimaan negara sejalan dengan pemulihan aktivitas masyarakat, sementara belanja negara difokuskan pada program prioritas dan penguatan ketahanan ekonomi regional. Meski demikian, sejumlah tantangan strategis masih perlu dicermati baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara.

Isu Pendapatan Negara

1) Ketergantungan pada Komoditas Volatile

Struktur penerimaan perpajakan Lampung masih sangat bergantung pada komoditas unggulan seperti *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya, kopi, dan batubara. Ketergantungan ini menimbulkan volatilitas tinggi, terutama ketika terjadi fluktuasi harga di pasar global. Meskipun memberikan *windfall* jangka pendek saat harga tinggi, namun dalam jangka menengah atau panjang ada risiko menciptakan kerentanan fiskal.

2) Implementasi Tarif Ekspor Batu Bara

Volume ekspor batu bara dari Lampung cukup tinggi dan merupakan salah satu komoditas penyumbang devisa tertinggi dalam beberapa periode terakhir. Perluasan basis penerimaan melalui pengenaan bea keluar batubara berpotensi memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara, meski penetapan tarif juga berisiko menambah beban industri di tengah tren harga global yang menurun.

3) Kontraksi pada penerimaan PPN dan PPh

Hingga akhir Juni, penerimaan pajak dalam negeri (di luar cukai) berkontraksi dibanding periode sama tahun lalu, terutama pada PPN Dalam Negeri dan PPh Badan. Selain itu, restitusi PPN dari industri pengolahan sebagai sektor penyumbang pajak tertinggi menambah tekanan pada capaian pajak regional Lampung.

Isu Belanja Negara

1) Efisiensi Fiskal, Stabilitas Konsumsi, dan Akses Pendidikan

Hingga Triwulan II 2025, Belanja Pemerintah Pusat di Lampung berkontraksi signifikan pada Belanja Barang dan Modal sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal untuk menjaga ruang fiskal dan fokus pada program prioritas. Meski masih rendah, progres konstruksi strategis mulai berjalan sehingga realisasi diperkirakan meningkat pada semester II. Di sisi lain, belanja pegawai tumbuh positif menopang daya beli, sementara belanja sosial melalui KIP Kuliah menggambarkan perluasan akses pendidikan tinggi dan penguatan kualitas SDM.

2) Pengelolaan Defisit Lebih Terkendali

Pada Triwulan II 2025, APBN Lampung mencatat defisit Rp9,76 triliun, namun berhasil menyempit 18,84% (yoy) seiring pertumbuhan pendapatan negara 21,34%. Rasio defisit terhadap PDRB turun menjadi 3,81% dari 5,08% tahun lalu, menunjukkan perbaikan disiplin fiskal. Defisit yang lebih terkendali menegaskan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan pendapatan-belanja, mengurangi risiko fiskal, dan menjaga keberlanjutan APBN.

3) Kinerja Penyaluran DAK Fisik

Hingga 30 Juni 2025, penyaluran DAK Fisik tercatat sebagai yang terendah dibanding dana transfer lain, hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Selain itu, berdasarkan Surat Wali Kota Metro nomor 600/1194/D.33/2025 tanggal 14 Agustus 2025 hal Pernyataan Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum Kota Metro T.A. 2025, menyatakan Pemerintah Kota Metro tidak melanjutkan DAK Fisik Bidang Air Minum 2025 karena pertimbangan relevansi volume pekerjaan, harga satuan upah, harga bahan, serta regulasi terbaru.



SUPLEMEN 3

Pemanfaatan Dana Desa

Desa Rawa Selapan

Dari Lumbung Padi Menuju Desa Mandiri Berprestasi

Desa Rawa Selapan di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, telah membuktikan diri sebagai etalase keberhasilan pemanfaatan Dana Desa dengan meraih prestasi gemilang sebagai Juara II Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung tahun 2025. Berstatus Desa Mandiri dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang impresif, kesuksesan Rawa Selapan berakar kuat pada perannya sebagai lumbung padi utama yang menyumbang lebih dari 11.000 ton gabah per tahun untuk ketahanan pangan nasional. Fondasi pertanian yang kokoh ini menjadi landasan bagi desa untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan inovasi pelayanan publik bagi 4.392 warganya. Dengan pagu Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp1,29 miliar dan realisasi penyaluran hingga Agustus sebesar Rp958,21 juta, pemerintah desa secara cerdas mengorkestrasi pembangunan yang seimbang antara penguatan ekonomi dan infrastruktur. Dana tersebut menjadi stimulus bagi diversifikasi usaha melalui BUMDes Gumelar yang mengelola peternakan kambing, budidaya ikan patin dan lele, sekaligus memperkuat citra desa sebagai Kampung Nata De Coco. Secara paralel, alokasi dana juga diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti proyek rabat beton di Dusun II yang vital untuk meningkatkan konektivitas dan kelancaran aktivitas ekonomi warga.

Di atas fondasi ekonomi dan infrastruktur yang solid, Rawa Selapan memprioritaskan investasi pada sumber daya manusia melalui inovasi digital dan program sosial. Inisiatif Smart Village melalui layanan "PAK KADES" berhasil memangkas birokrasi dan memudahkan akses administrasi bagi warga. Kesuksesan ini dilengkapi dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, terbukti dari penghargaan Kader Gemarikan terbaik sebagai ujung tombak penanganan stunting, serta aktifnya program perlindungan anak (PATBM) dan fasilitas pendidikan seperti PKBM dan perpustakaan desa. Kombinasi inilah yang menjadikan Rawa Selapan sebagai teladan desa yang tidak hanya membangun fisik, tetapi juga memberdayakan warganya secara menyeluruh.



Pembangunan Rabat Beton Dusun II



Bantuan Langsung Tunai Tahap I



Penghargaan Kader Gemarikan



Juara II Lomba Desa se-Provinsi



Indeks Desa Membangun
Desa Mandiri
0,8179



Realisasi Dana Desa
Rp958,21 juta
74,1% dari pagu



Yuk kenali
DESA KITA!



SCAN ME

Sumber: Instagram Kecamatan Candipuro dan Pemdes Rawa Selapan
<https://hanuang.com/rawa-selapan-diunggulkan-pemkab-lampung-selatan-target-juara-lomba-desa-tingkat-provinsi-2025/>



2.2 PELAKSANAAN APBD

APBD tahun 2025 Regional Lampung menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp31.666,63 miliar, turun 5,71% dibandingkan target APBD *audited* tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Pusat), Transfer Antar Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sejalan dengan penurunan target pendapatan, APBD tahun 2025 mengalokasikan Belanja Daerah

sebesar Rp31.737,37 miliar, terkontraksi 6,86% dibandingkan alokasi APBD *audited* tahun 2024. Penurunan ini mencakup sebagian besar komponen belanja, termasuk Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Modal, dan Belanja Bagi Hasil. Namun demikian, beberapa pos belanja mengalami peningkatan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan, mencerminkan penyesuaian prioritas fiskal untuk memperkuat ketahanan sosial dan operasional pemerintahan.

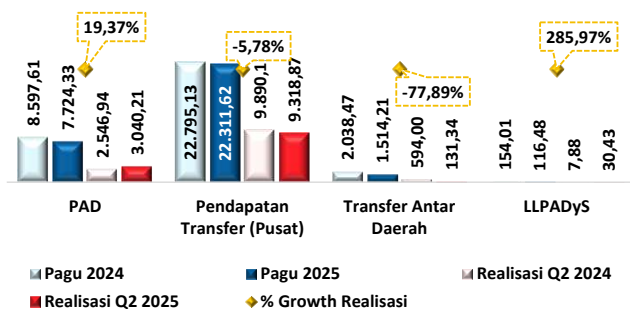
Tabel 2.10. I-Account Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2024-2025 (miliar rupiah)

I-Account (dalam Miliar Rp)	Triwulan II-2024			Triwulan II-2025			%Growth	
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI
PENDAPATAN DAERAH	33.585,23	13.038,93	38,82%	31.666,63	12.520,86	39,54%	-5,71%	-3,97%
PAD	8.597,61	2.546,94	29,62%	7.724,33	3.040,21	39,36%	-10,16%	19,37%
Pendapatan Transfer (Pusat)	22.795,13	9.890,11	43,39%	22.311,62	9.318,87	41,77%	-2,12%	-5,78%
Transfer Antar daerah	2.038,47	594,00	29,14%	1.514,21	131,34	8,67%	-25,72%	-77,89%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	154,01	7,88	5,12%	116,48	30,43	26,12%	-24,37%	285,97%
BELANJA DAERAH	34.076,21	10.930,06	32,08%	31.737,37	10.631,04	33,50%	-6,86%	-2,74%
Belanja Operasi	23.910,91	8.220,10	34,38%	23.067,11	8.276,79	35,88%	-3,53%	0,69%
Belanja Pegawai	12.503,87	5.249,39	41,98%	13.462,72	5.455,54	40,52%	7,67%	3,93%
Belanja Barang dan Jasa	9.235,86	2.380,56	25,78%	8.403,76	2.595,65	30,89%	-9,01%	9,04%
Belanja Bunga	40,42	14,03	34,70%	40,26	11,59	28,79%	-0,38%	-17,37%
Belanja Subsidi	9,65	0,65	6,76%	7,61	2,05	26,88%	-21,11%	213,86%
Belanja Hibah	2.096,03	571,35	27,26%	1.126,79	209,15	18,56%	-46,24%	-63,39%
Belanja Bantuan Sosial	25,08	4,12	16,43%	25,97	2,81	10,82%	3,54%	-31,78%
Belanja Modal	4.622,17	683,81	14,79%	3.554,41	774,51	21,79%	-23,10%	13,26%
Belanja Modal	4.622,17	683,81	14,79%	3.554,41	774,51	21,79%	-23,10%	13,26%
Belanja Tidak Terduga	110,84	26,76	24,14%	210,96	36,34	17,23%	90,33%	35,80%
Belanja Tidak Terduga	110,84	26,76	24,14%	210,96	36,34	17,23%	90,33%	35,80%
Belanja Transfer	5.432,29	1.999,39	36,81%	4.904,89	1.543,40	31,47%	-9,71%	-22,81%
Belanja Bagi Hasil	1.968,18	689,05	35,01%	1.406,83	117,67	8,36%	-28,52%	-82,92%
Belanja Bantuan Keuangan	3.464,11	1.310,34	37,83%	3.498,07	1.425,73	40,76%	0,98%	8,81%
SURPLUS/ (DEFISIT)	-490,98	2.108,87	-429,52%	-70,74	1.889,82	-2671,42%	-85,59%	-10,39%
PEMBIAYAAN	490,98	112,57	22,93%	70,91	56,02	79,00%	-85,56%	-50,23%
Penerimaan Pembiayaan	748,90	209,94	28,03%	333,33	161,76	48,53%	-55,49%	-22,95%
Pengeluaran Pembiayaan	257,92	97,37	37,75%	262,42	105,74	40,29%	1,74%	8,59%
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN	0,00	2.221,44		0,17	1.945,84	1144025,57%		-12,41%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Grafik 2.30. Perbandingan Pagu-Realisasi Pendapatan Daerah (miliar Rp) dan Pertumbuhannya (persen) Triwulan I 2024 dan 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sejalan dengan penurunan target, hingga 30 Juni 2025, Pendapatan Daerah Regional Lampung mencapai Rp12.520,86 miliar atau 39,54% dari target APBD, terkontraksi sebesar 3,97% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang terkontraksi 5,78% (yoy) dan penurunan tajam Transfer Antar Daerah sebesar 77,89% (yoy).

Kontraksi pada Transfer Antar Daerah terutama sebagai dampak penerapan opsen pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang



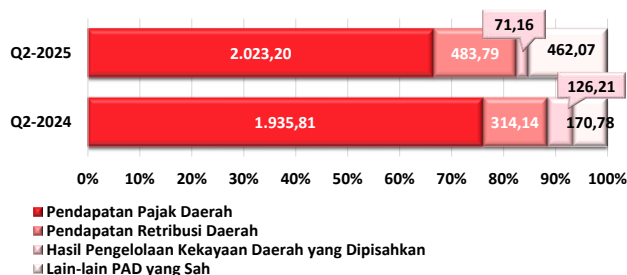


menggantikan mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB dari Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun berjalan dengan skema *split payment*. Kebijakan ini tidak hanya mempercepat penyaluran dana melalui distribusi langsung, tetapi juga meningkatkan kontribusi PAD dengan mengubah status penerimaan dari bagi hasil menjadi Pajak Daerah, sehingga memperkuat struktur pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

PAD tetap menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 19,37% (yoy), sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat lonjakan signifikan sebesar 285,97% (yoy). Hal ini mencerminkan adanya pergeseran sumber pendapatan yang mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah di tengah penurunan pendapatan transfer.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik 2.31. Perbandingan Komposisi PAD Lampung Triwulan II 2024 dan 2025 (miliar Rp)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sampai dengan 30 Juni 2025, PAD Regional Lampung mencapai Rp3.040,21 miliar atau 39,36% dari target, mencatat pertumbuhan *double digit* sebesar 19,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan realisasi pada sebagian besar komponen, yaitu Pajak Daerah yang tumbuh 4,51% (yoy), Retribusi Daerah yang melonjak 54,00% (yoy), serta Lain-Lain PAD yang Sah yang tumbuh 170,56% (yoy). Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berkontraksi 43,62% (yoy) disebabkan penurunan penerimaan deviden BUMD.

Sejalan dengan peningkatan ini secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah juga meningkat, dari 19,53% pada Triwulan II 2024 menjadi 24,28% pada Triwulan II 2025,

menunjukkan peran strategis PAD dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD mengalami peningkatan signifikan, mencapai 15,91% pada Triwulan II 2025, dibandingkan 12,33% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi 66,55% dari total PAD, mengukuhkan posisinya sebagai komponen utama dalam struktur pendapatan daerah.

2.2.1.2 Rasio Pajak Daerah (*Local Tax Ratio*)

Tabel 2.11. Perbandingan *Local Tax Ratio* Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

Komponen (miliar Rupiah)	s.d. Triwulan II 2024	s.d. Triwulan II 2025
Pendapatan Pajak Daerah	1.935,81	2.023,20
Pendapatan Retribusi Daerah	314,14	483,79
Total Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD)	2.249,95	2.506,99
PDRB (ADHB)	236.762,36	256.102,20
Local Tax Ratio (Persen)	0,95	0,98

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Local Tax Ratio merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Pada Triwulan II 2025, rasio ini tercatat sebesar 0,98%, meningkat dibandingkan 0,95% pada Triwulan II 2024. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan PDRD sebesar 11,42% (yoy) yang melampaui pertumbuhan PDRB 8,17% (yoy), meskipun masih jauh di bawah batas ideal yaitu 3%, yang menunjukkan besarnya ketergantungan Lampung terhadap sumber pendapatan lainnya dalam hal ini dana transfer pemerintah pusat. Rendahnya rasio ini juga menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan dan retribusi, belum sepenuhnya dioptimalkan.

Dari sisi sektoral, meski sektor Pertanian menyumbang 26,55% terhadap PDRB Provinsi Lampung Semester II 2025, kontribusinya terhadap PDRD masih belum sebanding karena sebagian besar aktivitas dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan informal yang belum tercakup dalam basis perpajakan, serta terbatasnya objek pajak dan retribusi yang dapat dipungut dari kegiatan pertanian primer. Sebaliknya, sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 18,99% terhadap PDRB menunjukkan potensi fiskal yang lebih besar



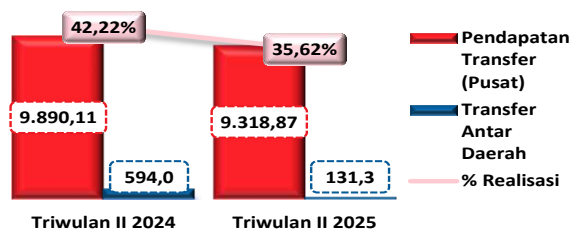


karena memiliki struktur usaha yang lebih formal dan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industrialisasi melalui hilirisasi komoditas pertanian, didukung oleh peningkatan investasi dan inovasi di sektor pengolahan, menjadi langkah penting dan strategis untuk memperluas basis perpajakan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.1.3 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Triwulan II 2025 menunjukkan perbedaan signifikan antara komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp9.318,87 miliar atau 41,77% dari target, menurun 5,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Meski tetap menjadi kontributor utama dengan porsi 74,43% dari total Pendapatan Daerah, kontribusi ini sedikit menurun dari 75,85% pada tahun sebelumnya, mencerminkan upaya diversifikasi sumber pendapatan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Grafik 2.32. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

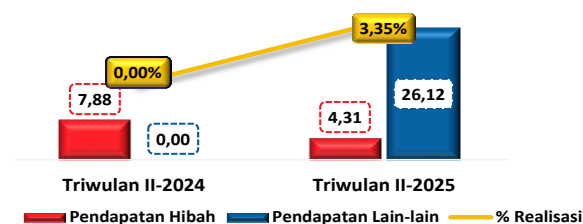
Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kontraksi signifikan, hanya mencapai Rp116,54 miliar atau 8,67% dari target, turun 77,89% (yoy). Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengubah mekanisme penerimaan PKB dan BBNKB dari skema bagi hasil menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota (opsen). Kebijakan ini mempercepat penyaluran dana melalui distribusi langsung dan memperkuat struktur pendapatan daerah, namun mengurangi potensi Pendapatan Transfer Antar Daerah, karena sebagian besar

penerimaan kini dicatat langsung sebagai PAD, bukan lagi alokasi bagi hasil dari provinsi.

2.2.1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDyS) mencakup berbagai sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Hibah, Dana Darurat, serta Pendapatan Lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pada Triwulan II 2025, realisasi LLPDyS Provinsi Lampung mencapai Rp30,43 miliar, atau 26,12% dari target, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dengan realisasi Rp7,88 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Grafik 2.33. Perbandingan Realisasi LLPDyS Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)

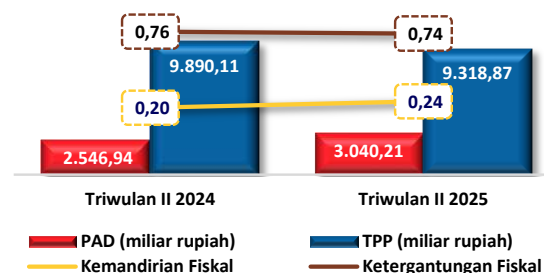


Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.5 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan serta rasio Transfer Pemerintah Pusat (TPP) terhadap total pendapatan. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah.

Grafik 2.34. Perbandingan Realisasi PAD (miliar Rp) dan Rasio Kemandirian Fiskal (persen) Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)





Secara agregat, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) regional Lampung pada Triwulan II 2025 tercatat sebesar 0,24 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 0,20. Meskipun terjadi peningkatan, nilai ini masih berada dalam kategori Belum Mandiri menurut klasifikasi Sampurna (2018), yang menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk membiayai kebutuhannya secara mandiri masih terbatas.

Tabel 2.12. Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal

Rasio Kemandirian	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju Kemandirian
$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

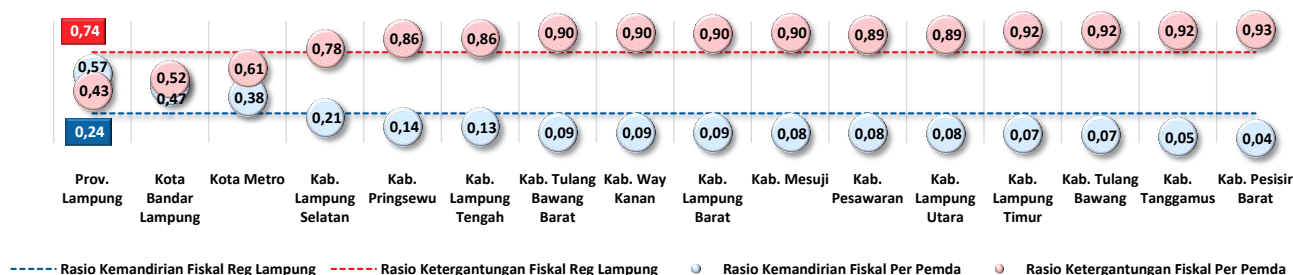
Sumber (Sampurna, 2018)

Peningkatan IKF ini sejalan dengan kenaikan PAD yang tumbuh 19,37% (yoy), dari Rp2.546,94 miliar

pada Triwulan II-2024 menjadi Rp3.040,21 miliar pada Triwulan II 2025. Namun, rasio ketergantungan fiskal tetap tinggi, meskipun turun dari 0,76 pada Triwulan II 2024 menjadi 0,74 pada Triwulan II 2025, yang menunjukkan sebagian besar pendanaan daerah masih bergantung pada transfer pusat.

Secara spasial, Provinsi Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi di antara pemerintah daerah di Regional Lampung dengan rasio 0,57, berada dalam kategori Mandiri. Sementara itu, Kab. Pesisir Barat mencatat rasio kemandirian terendah, yaitu 0,04, mencerminkan tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat. Kab. Pesisir Barat juga memiliki tingkat ketergantungan tertinggi dengan rasio 0,93, sementara Provinsi Lampung memiliki tingkat ketergantungan terendah sebesar 0,43.

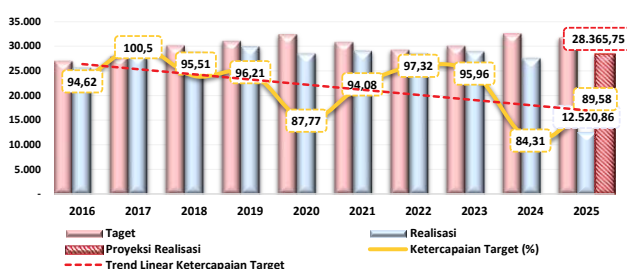
Grafik 2.35. Rasio Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal Daerah per Pemda Triwulan II Tahun 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.1.6 Prognosis/Outlook Pendapatan

Tabel 2.13. Proyeksi Ketercapaian Pendapatan s.d. Akhir Tahun 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

Berdasarkan *tren linear* ketercapaian target selama sembilan tahun terakhir, proyeksi ketercapaian pendapatan daerah Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 89,58% dari total target APBD yang ditetapkan. Dengan target pendapatan daerah sekitar Rp31.666,63 miliar, pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp28.365,75 miliar,

mencerminkan peningkatan moderat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi hingga Triwulan II 2025 yang tercatat sebesar Rp12.520,86 miliar, atau sekitar 39,54% dari total target, menurun 3,97% (yoy). Pada tahun 2024, rasio ketercapaian target hanya mencapai 84,31%, lebih rendah dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya yang umumnya berada di atas 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan utama. Selain itu, kontraksi penerimaan dari Pendapatan Transfer menambah tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan langkah strategis dan inovatif untuk menjaga keberlanjutan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Salah satu faktor yang diperkirakan akan mendorong peningkatan pendapatan pada tahun





2025 adalah penerapan kebijakan *pemutihan* pajak kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur No. G/291/VI.03/HK/2025. Kebijakan ini mencakup pembebasan seluruh pokok tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk opsen pajak dan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya yang berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Oktober 2025. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan daerah, serta memperbaiki rasio kemandirian fiskal Provinsi Lampung pada tahun 2025.

2.2.1.7 Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Beberapa rekomendasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah di regional Lampung berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

a. Optimalisasi Pajak Daerah melalui Kebijakan Insentif yang Tepat Sasaran

Kebijakan *pemutihan* pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan daerah. Namun, untuk menjaga keberlanjutan pendapatan daerah, diperlukan langkah strategis yang lebih berfokus pada pembinaan kepatuhan jangka panjang. Pemda perlu memperkuat kualitas pendataan wajib pajak untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data, yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam merancang insentif yang tepat sasaran. Insentif berbasis kinerja, seperti diskon pajak bagi wajib pajak yang konsisten membayar tepat waktu atau pengurangan tarif progresif untuk kendaraan yang mendukung pengurangan emisi karbon, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat asas keadilan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kebijakan *pemutihan*, menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan.

b. Pemanfaatan Potensi Retribusi Daerah dan Pengelolaan Aset Secara Optimal

Meningkatkan kontribusi retribusi daerah yang meningkat signifikan hingga mencapai 16,13% dari total PAD pada Triwulan II 2025, Pemerintah Daerah perlu memperkuat pengelolaan aset strategis, seperti pasar, terminal, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, penerapan transparansi tarif, serta penguatan pengawasan terhadap penerimaan retribusi. Implementasi sistem pembayaran digital akan semakin meningkatkan akurasi dan transparansi penerimaan, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran. Selain itu, pengembangan kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan aset strategis dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c. Kerja sama dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah perlu menjalin kerja sama strategis dengan Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat pendampingan hukum dalam proses penagihan pajak dan retribusi daerah. Contohnya, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pendampingan hukum, yang menjadi langkah konkret dalam mendukung penegakan aturan. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga meminimalkan potensi sengketa dan mempercepat penyelesaian tunggakan. Dengan dukungan APH, penegakan regulasi dapat dilaksanakan secara lebih tegas, terukur, dan efektif, sehingga potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

d. Optimalisasi PAD Berkelanjutan

Optimalisasi PAD perlu diawali dengan peningkatan kualitas layanan dan pengendalian kebocoran penerimaan sebelum penyesuaian tarif. Publik cenderung menolak kenaikan mendadak pada sektor sensitif seperti PBB dan





pagak hiburan, namun menerima inovasi digital yang meningkatkan transparansi. Strategi efektif meliputi kenaikan PBB bertahap, *e-parking* di titik rawan kebocoran, *e-billing* hotel-resto untuk menekan *underreporting*, serta pemanfaatan aset daerah yang tidak produktif. Penegasan prinsip *tax-for-service* juga penting, misalnya retribusi parkir untuk penerangan jalan atau kontribusi MBLB bagi infrastruktur tambang. Dengan komunikasi transparan, kanal aduan responsif, dan pengawasan lintas OPD, optimalisasi PAD dapat dicapai secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat.

e. Peningkatan Kontribusi Sektor Produktif melalui Hilirisasi dan Industrialisasi

Dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDRB namun rendah terhadap PAD, Pemda Lampung perlu mendorong hilirisasi hasil pertanian dan pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Kebijakan ini dapat mencakup insentif bagi industri hilir, peningkatan infrastruktur penunjang, serta dukungan terhadap inovasi teknologi dan pengembangan pasar ekspor. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

f. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Optimalisasi Transfer Dana

Mengingat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, Pemda perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran alokasi dan penyaluran dana transfer. Optimalisasi penggunaan dana transfer melalui perencanaan yang lebih matang, pengawasan ketat, serta peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran akan membantu mengurangi ketergantungan fiskal dan memperbesar ruang fiskal daerah.

2.2.2 Belanja Daerah

Sampai dengan 30 Juni 2025, realisasi Belanja Daerah Regional Lampung mencapai Rp10.631,04 miliar atau 33,50% dari total pagu anggaran. Realisasi ini mencerminkan pertumbuhan negatif

sebesar 2,74% (yoy), hal ini dipengaruhi oleh dinamika transisi kepemimpinan daerah menjelang pergantian kepala daerah pada 2025. Proses evaluasi dan penyesuaian program prioritas oleh pimpinan baru atau pejabat sementara berdampak pada penundaan pelaksanaan sejumlah kegiatan.

Grafik 2.36. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Daerah (miliar Rp) dan Pertumbuhannya (persen) s.d. Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

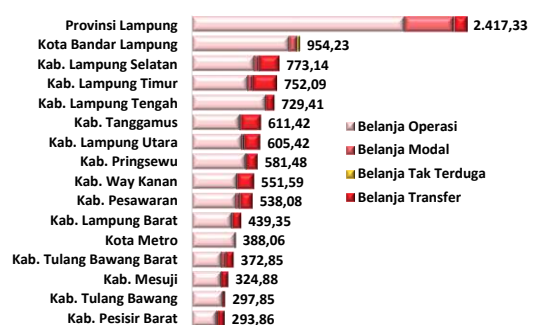


Sumber: LKPD-TW II Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya diklasifikasikan dalam empat kategori utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada Triwulan II 2025, realisasi Belanja Daerah Regional Lampung masih didominasi oleh belanja operasi dengan kontribusi mencapai 77,85% dari total realisasi, atau sebesar Rp8.276,79 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024, di mana belanja operasi menyumbang 75,21%. Peningkatan tersebut mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan belanja rutin guna mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Komposisi Belanja Daerah per Pemda menurut jenis belanja dapat dilihat pada grafik 2.37.

Grafik 2.37. Komposisi Belanja Daerah per Pemda (miliar Rp) Triwulan II 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

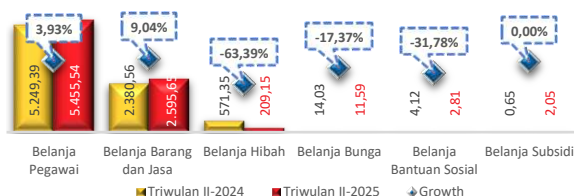




2.2.2.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi hingga Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp8.276,79 miliar atau 35,88% dari pagu, tumbuh sebesar 0,69% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan Belanja Subsidi yang naik dari Rp0,65 miliar pada Triwulan II-2024 menjadi senilai Rp2,05 miliar pada Triwulan II 2025 mencatatkan pertumbuhan sangat signifikan sebesar 213,86% (yoy). Belanja Pegawai senilai Rp5.455,54 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,93% (yoy) tetap menjadi komponen dominan dalam porsi struktur Belanja Operasi, dengan kontribusi sebesar 65,91% terhadap total Belanja Operasi atau 51,32% dari keseluruhan belanja daerah pada Triwulan II 2025. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 48,03% dari total belanja daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai maksimal 30% dari APBD paling lambat pada tahun anggaran 2027, oleh karena itu diperlukan strategi untuk secara bertahap menurunkan porsi Belanja Pegawai guna memenuhi ketentuan ini tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Grafik 2.38. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mencatatkan realisasi sebesar Rp2.595,65 miliar atau 30,89% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 9,04% (yoy). Kontribusinya terhadap total porsi Belanja Operasi mengalami kenaikan dari 28,96% pada Triwulan II-2024 menjadi 31,36% pada Triwulan II 2025.

Belanja Bunga, meskipun memiliki tingkat realisasi yang relatif tinggi sebesar 28,79% dari pagu, juga mengalami kontraksi sebesar 17,37% (yoy), dari

Rp14,03 miliar pada Triwulan II-2024 menjadi Rp11,59 miliar pada periode yang sama tahun 2025.

Belanja Hibah tercatat mengalami kontraksi sangat tajam sebesar 63,39% (yoy), dengan realisasi sebesar Rp571,35 miliar pada Triwulan II-2024 menjadi Rp209,15 miliar pada periode yang sama tahun 2025, antara lain disebabkan oleh tidak dialokasikannya kembali anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak, yang pada tahun 2024 menjadi salah satu komponen utama dalam Belanja Hibah.

Di sisi lain, Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp2,05 miliar atau 26,88% dari pagu. Meskipun kontribusinya terhadap total Belanja Daerah masih relatif kecil dan terdapat kontraksi pada pagu sebesar 21,11% (yoy), namun pertumbuhannya sangat signifikan sebesar 213,89% (yoy). Di lihat dari sisi realisasi per Kab/Kota, pada tahun 2025 terdapat tujuh Kab/Kota yang telah merealisasikan belanja subsidi ini. Berbeda pada tahun 2024 yang hanya empat Kab/Kota saja yang baru merealisasikan belanja tersebut. Percepatan realisasi oleh beberapa Kab/Kota tersebut menjadi salah satu penyebab signifikan pertumbuhan sebagaimana dimaksud. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial mencatat kontraksi sebesar 31,78% (yoy) menjadi Rp2,81 miliar pada Triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,12 miliar.

2.2.2.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Daerah Provinsi Lampung hingga Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp774,51 miliar atau 21,79% dari pagu, mencatat pertumbuhan sebesar 13,26% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang meningkat sebesar 673,57% (yoy), walaupun komponen belanja modal lainnya mengalami kontraksi yang signifikan, seperti Belanja Modal Tanah 89,32% (yoy); Belanja Modal Aset Lainnya 93,66% (yoy), Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14,82% (yoy), dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18,79% (yoy).

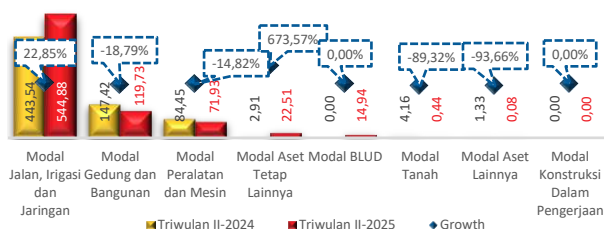
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp544,88 miliar atau 70,35% dari total Belanja





Modal, serta mengalami pertumbuhan sebesar 22,85% (yoy).

Grafik 2.39. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 (miliar Rp)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Belanja Modal BLUD mencatat realisasi sebesar Rp14,94 miliar pada Triwulan II 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang belum terealisasi sama sekali. Di sisi lain, Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan belum mencatatkan realisasi.

2.2.2.1.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Provinsi Lampung hingga akhir Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp36,34 miliar atau 17,23% dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 35,80% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya mencapai Rp26,76 miliar atau 24,14% dari pagu. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk keadaan darurat yang mendesak dan tidak terprediksi atau bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tingginya pertumbuhan Belanja Tidak Terduga juga perlu diimbangi dengan pengelolaan yang ketat untuk memastikan alokasi ini digunakan secara tepat sasaran dan efisien.

2.2.2.1.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer hingga Triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp1.543,40 miliar atau 31,47% dari pagu, terkontraksi 22,81% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tajam pada komponen Transfer Bagi Hasil, yang turun hingga 82,92% (yoy). Kontraksi ini sebagian besar terjadi pada transfer

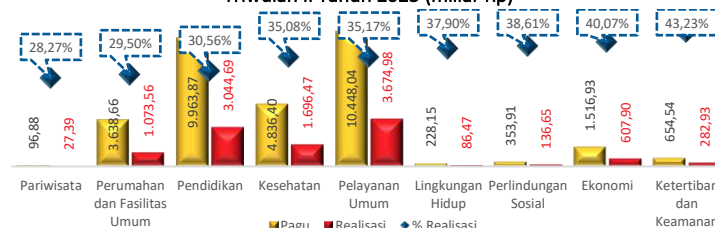
dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya sebagai dampak dari penerapan kebijakan opsen pajak yang mengubah skema pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, komponen Belanja Bantuan Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,81% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp1.425,73 miliar.

2.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsinya, Belanja Daerah Provinsi Lampung mencakup sembilan fungsi utama, yaitu Pelayanan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, serta Perlindungan Sosial. Alokasi terbesar diberikan kepada Fungsi Pelayanan Umum dengan pagu sebesar Rp10.448,04 miliar atau 32,92% dari total anggaran, menunjukkan prioritas untuk mendukung berbagai pelayanan administratif dan operasional pemerintahan. Hingga Triwulan II 2025, realisasi belanja pada fungsi ini mencapai Rp3.674,98 miliar atau 35,17% dari pagu, memberikan kontribusi terbesar 34,57% terhadap total realisasi belanja daerah.

Grafik 2.40. Pagu dan Realisasi Belanja per Fungsi Triwulan II Tahun 2025 (miliar Rp)



Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Lampung Triwulan II 2025 (diolah)

Fungsi Pendidikan menempati posisi kedua dengan alokasi sebesar Rp9.963,87 miliar atau 31,39% dari total pagu, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Alokasi ini juga sejalan dengan ketentuan *mandatory spending*, di mana fungsi Pendidikan wajib dialokasikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Hingga Triwulan II 2025, realisasi belanja Pendidikan mencapai Rp3.044,69 miliar atau 30,56% dari pagu, menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah pelayanan





umum dengan kontribusi 28,64% dari total realisasi belanja daerah.

2.2.2.3 Kontribusi Belanja Terhadap PDRB

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mekanisme pengeluaran pemerintah. Dalam PDRB Pengeluaran, belanja pemerintah tercermin dalam komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Tabel 2.14. Perbandingan Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

Komponen	Triwulan II 2024	Triwulan II 2025
Realisasi Belanja Daerah (miliar rupiah)	10.930,06	10.631,04
PK-P s.d. Triwulan II ADHB (miliar rupiah)	13.983,00	14.017,54
PDRB s.d. Triwulan II (miliar rupiah)	236.762,36	256.102,20
Ratio Belanja Daerah terhadap PDRB	4,62%	4,15%
Kontribusi PK-P pada PDRB ADHB	5,91%	5,47%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Sampai dengan Triwulan II 2025, realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp10.631,04 miliar atau berkontraksi 2,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio belanja daerah terhadap PDRB juga mengalami penurunan dari 4,62% pada Triwulan II-2024 menjadi 4,15% pada periode yang sama tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung lebih didorong oleh sektor non-pemerintah, khususnya konsumsi rumah tangga.

Kontribusi PK-P terhadap PDRB ADHB juga menurun dari 5,91% menjadi 5,47% pada Triwulan II 2025. Walaupun secara angka pertumbuhan realisasi PK-P secara kumulatif meningkat dari 13.983,00 miliar pada Triwulan II-2024 menjadi 14.017,54 miliar pada periode yang sama pada tahun 2025 (sumber: BPS Provinsi Lampung). Kondisi dikarenakan peningkatan PDRB sampai dengan Triwulan II sebagai nilai pembagi dan juga komponen penunjang PDRB lainnya yang tumbuh lebih signifikan dibandingkan dengan PK-P.

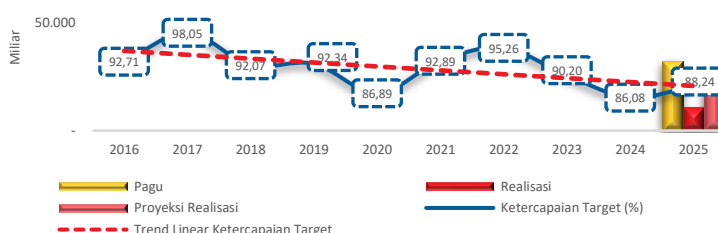
2.2.2.4 Prognosis/Outlook Belanja Daerah

Berdasarkan tren linier ketercapaian belanja selama sembilan tahun terakhir serta realisasi hingga Triwulan II 2025, Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp28.004,64

miliar atau setara 88,24% dari pagu. Proyeksi ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, serta terjadi penurunan pagu sebesar 6,86% sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja. Realisasi pada Triwulan II yang berkontraksi sebesar 2,74% (yoy) merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Struktur belanja masih akan didominasi oleh Belanja Pegawai, sementara itu, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa mencatatkan tingkat serapan yang relatif masih rendah serta menjadi indikasi umum adanya siklus penyerapan belanja yang tertumpuk di semester II. Kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan untuk akselerasi pelaksanaan program prioritas secara tepat waktu dan berkualitas, terutama pada belanja yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Grafik 2.41. Proyeksi Ketercapaian Belanja s.d. Akhir Tahun 2025



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, DJPK (diolah)

2.2.2.5 Rekomendasi Kebijakan Belanja

Realisasi Belanja Daerah regional Lampung hingga akhir Triwulan-II 2025 menunjukkan kontraksi, merupakan fenomena yang terencana dan strategis. Beberapa rekomendasi strategis untuk menguatkan manajemen fiskal dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan berdasarkan analisis pada bab ini antara lain:

1) Penguatan Belanja Produktif

Pemda dapat melanjutkan tren positif dalam penyerapan Belanja Modal untuk memperkuat infrastruktur dan layanan publik, serta optimalkan penggunaan Belanja Tak Terduga secara tepat sasaran dalam merespons kebutuhan mendesak (seperti penanganan bencana, pengendalian inflasi, stabilisasi pangan, dan dukungan program strategis





pemerintah pusat) yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2) Konsolidasi Fiskal Multi-Tahun untuk Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai sebesar 52,09% dari total belanja daerah jauh melampaui batas 30% yang harus dicapai pada tahun 2027 di mana sesuai dengan amanat UU HKPD untuk menurunkan porsi Belanja Pegawai hingga maksimal 30% pada 2027. Beberapa langkah aksi yang dapat dilakukan, antara lain: Melakukan audit komprehensif terhadap struktur organisasi untuk mengidentifikasi duplikasi dan area yang dapat dirasionalisasi; Menerapkan kebijakan pembekuan atau pembatasan ketat terhadap rekrutmen pegawai baru; Mengembangkan program peningkatan kapasitas dan pelatihan silang (*cross-functional training*) untuk memaksimalkan efisiensi dan fleksibilitas staf yang ada tanpa menambah jumlah personel; dan Mempertimbangkan adopsi teknologi dan otomatisasi untuk menyederhanakan proses-proses administratif dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

2.2.3 Perkembangan Surplus/Defisit APBD

Kinerja fiskal APBD Regional Lampung pada Triwulan II 2025 mencatat surplus sebesar Rp1.889,82 miliar, turun 10,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.108,87 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pendapatan daerah (-3,97% yoy) yang lebih dalam dibandingkan penurunan belanja daerah (-2,74% yoy).

Perkembangan keseimbangan umum APBD dapat dianalisis melalui tiga indikator rasio sebagai berikut:

a. Rasio Surplus APBD terhadap Total Pendapatan Daerah.

Rasio ini menurun dari 16,17% menjadi 15,09%, mencerminkan penyempitan ruang fiskal. Meskipun PAD tumbuh positif 19,37% (yoy) dengan realisasi mencapai 39,36% dari pagu, peningkatan ini belum mampu mengimbangi

penurunan pendapatan transfer yang selama ini menjadi pilar utama penerimaan daerah. Implikasinya, fleksibilitas pendanaan program prioritas menjadi lebih terbatas.

b. Rasio Surplus APBD terhadap Belanja.

Rasio ini melemah dari 19,29% menjadi 17,78%. Penurunan ini terjadi di tengah realisasi belanja daerah yang rendah, yakni baru 33,50% dari pagu APBD. Meskipun belanja daerah dijaga agar tidak melampaui pendapatan, rendahnya serapan menunjukkan adanya *under-spending* yang perlu diatasi pada semester II, terutama pada belanja produktif untuk mendorong pertumbuhan.

c. Rasio Surplus terhadap PDRB

Rasio surplus terhadap PDRB turun dari 0,89% menjadi 0,74% ditengah PDRB ADHB yang tumbuh 8,17% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi fiskal daerah terhadap penguatan kapasitas ekonomi makro melemah, dengan pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh aktivitas sektor riil di luar belanja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, pelemahan ketiga rasio menegaskan sumber tekanan utama berada di sisi penerimaan, terutama dana transfer, sementara realisasi belanja yang lambat membatasi efektivitas APBD sebagai instrumen stimulus.

Tabel 2.15. Perkembangan Rasio Surplus/Defisit APBD Regional Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

Periode	Surplus / Defisit (miliar rupiah)	Surplus terhadap Pendapatan	Surplus terhadap Belanja	Surplus terhadap PDRB
Triwulan II-2024	2.108,87	16,17%	19,29%	0,89%
Triwulan II-2025	1.889,82	15,09%	17,78%	0,74%

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung, BPS (diolah)

Keseimbangan primer Triwulan II 2025 tetap mencatat surplus Rp1.901,41 miliar, meskipun lebih rendah dari Rp2.122,90 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan kebijakan fiskal daerah masih berada pada posisi kontraktif, dengan belanja lebih kecil daripada pendapatan setelah dikurangi pembayaran bunga. Namun, semakin menyempitnya ruang fiskal menandakan berkurangnya kapasitas pemerintah





daerah dalam menyediakan *buffer* untuk merespons potensi guncangan ekonomi.

Tabel 2.16. Perkembangan Keseimbangan Umum dan Primer Regional Lampung Triwulan II Tahun 2024 dan 2025

Periode	Pendapatan APBD	Belanja APBD	Belanja Bunga	Keseimbangan Umum	Keseimbangan Primer
Triwulan II-2024	13.038,93	10.930,06	14,03	2.108,87	2.122,90
Triwulan II-2025	12.520,86	10.631,04	11,59	1.889,82	1.901,41

Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Pada Triwulan II 2025, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp56,02 miliar, turun 50,23% (yoy) dibandingkan Rp112,57 miliar pada Triwulan II 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan pembiayaan sebesar 22,95% (yoy) dari Rp209,94 miliar menjadi Rp161,76 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan meningkat 8,59% (yoy) dari Rp97,37 miliar menjadi Rp105,74 miliar.

Grafik 2.42. Perbandingan Realisasi Pembiayaan Daerah Lampung Triwulan II-2024 dan 2025 (miliar Rp)



Sumber: LKPD-TW Lingkup Provinsi Lampung (diolah)

Dari sisi penerimaan, sumber utama masih berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai

Rp153,56 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan Rp209,94 miliar pada Triwulan II 2024. Selain itu, pada periode ini, terdapat diversifikasi sumber penerimaan melalui pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,91 miliar dan penerimaan kembali piutang sebesar Rp0,29 miliar, yang pada tahun 2024 belum terdapat realisasi.

Di sisi pengeluaran, peningkatan terutama berasal dari penyertaan modal pada BUMD yang naik dari Rp8,00 miliar menjadi Rp13,83 miliar (72,93% yoy), serta pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat yang melonjak dari Rp17,83 miliar menjadi Rp47,71 miliar (167,66% yoy). Sementara itu, pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank mengalami penurunan dari Rp59,14 miliar menjadi Rp44,19 miliar (-25,29% yoy), dan tidak terdapat pembayaran pokok pinjaman kepada bank pada tahun 2025.

Struktur pembiayaan pada Triwulan II 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar SiLPA serta mengarahkan pengeluaran pembiayaan tidak hanya untuk kewajiban pelunasan utang, tetapi juga untuk memperkuat permodalan BUMD sebagai instrumen pendukung pembangunan daerah.



SUPLEMEN 4

Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Analisis Perkembangan Dampak Awal MBG terhadap Perekonomian Lampung Sampai Dengan Semester 1-2025



Perkembangan Dampak Melalui Model Regresi

Dampak	Model Regresi	p-value
Terhadap Pertanian	$\ln(\text{NTP_Tanaman_Pangan}) = 4.9080 + -0.0198 \ln(\text{Real_MBG})$	0.07
Terhadap Peternakan	$\ln(\text{NTP_Peternakan}) = 4.6186 + -0.0039 \ln(\text{Real_MBG})$	0.0911
Terhadap Perikanan	$\ln(\text{NTP_Perikanan_Budidaya}) = 4.5714 + 0.0008 \ln(\text{Real_MBG})$	0.6387
Terhadap Harga Beras	$\ln(\text{Harga_Beras}) = 9.5802 + 0.0032 \ln(\text{Real_MBG})$	0.098



Perkembangan Dampak MBG Terhadap Ekonomi Lampung

- ✓ Korelasi dan kausalitas dari data awal semester I-2025 ini masih perlu validasi dengan observasi lebih panjang dan kontrol terhadap variabel lain.
- ✓ Secara statistik MBG memberi sinyal keterkaitan dengan harga dan kesejahteraan produsen, tetapi pola hubungan tersebut masih rentan bias oleh faktor musiman (panen gabah Januari-April, puncak tangkapan ikan Oktober-April, dan peningkatan konsumsi saat Idul Fitri serta Idul Adha)
- ✓ Dampak MBG terhadap inflasi umum masih relatif terbatas. Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak menunjukkan hubungan signifikan, meskipun terdapat sinyal pada komoditas tertentu seperti beras dan minyak goreng.
- ✓ Hasil ini menggambarkan bahwa desain program MBG masih lebih kuat pada aspek permintaan (penyediaan konsumsi) dibanding aspek penawaran (penyerapan dan dorongan peningkatan produktivitas hasil produksi lokal)

Sumber: BGN, Sintesa DJPb, BPS Lampung (diolah)



Rekomendasi Kebijakan

- ✓ Pemerintah Desa bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dapat memperkuat peran BUMDes, koperasi, dan UMKM sebagai pemasok pangan MBG. Dukungan berupa pelatihan, pendampingan sertifikasi, hingga insentif fiskal akan meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi standar kebersihan, nutrisi, dan keamanan pangan.
- ✓ SPPG dapat menjalin kontrak pasok BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih dan produsen lokal untuk membeli hasil panen, ternak, dan ikan dari mereka dengan harga yang adil sehingga mampu menjamin penyerapan hasil produksi dan memberikan kepastian pendapatan bagi produsen.
- ✓ BGN dan Kemenko Perekonomian dapat membuat desain MBG atau pembukaan SPPG baru yang mendukung target masyarakat miskin dan komoditas pangan unggulan di daerah tertentu dengan nilai ekonomi tinggi. Misalnya, fokus pada produk perikanan di wilayah pesisir atau produk hortikultura di wilayah dataran tinggi Lampung dengan tetap memperhatikan standar gizi yang seimbang dan optimal.



2.3 PROGRES IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

2.3.1 Pendahuluan

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul adalah fondasi utama untuk memperkuat daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia yang maju. Dalam kerangka ini, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu prioritas, dengan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, tetapi juga dirancang sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Program MBG memiliki dua tujuan utama: pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi esensial bagi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan balita, yang merupakan kelompok paling rentan. Kedua, memperkuat perekonomian daerah dengan memberdayakan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku utama. Dengan pendekatan ini, program diharapkan dapat menciptakan efek berganda, tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendistribusikan pendapatan secara lebih merata dan memperkuat rantai pasok pangan lokal.

Sejalan dengan ambisi Indonesia Emas 2045 untuk mencetak generasi emas, Program MBG berfokus pada investasi gizi sejak dini. Investasi ini sangat krusial mengingat proyeksi demografi yang menunjukkan Indonesia akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Kualitas gizi yang optimal sejak usia dini akan menjadi pondasi penting untuk membentuk individu yang sehat, cerdas, dan produktif, sehingga siap bersaing di kancah global. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa, meskipun angka stunting sudah menurun, prevalensinya masih di angka 21,5%. Pemerintah menargetkan penurunan signifikan hingga 14% pada tahun 2024. Selain itu, masalah gizi buruk juga tetap menjadi perhatian, dengan 3,8% anak balita mengalami kondisi ini. Situasi ini berpotensi menghambat

perkembangan kognitif dan fisik, sehingga penanganan yang sistematis dan berkelanjutan melalui program seperti MBG menjadi sangat esensial.

Bagian ini akan memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Lampung. Analisis ini mencakup narasi implementasi di lapangan, indikasi awal dari dampak program terhadap berbagai indikator ekonomi dan sosial, serta isu-isu yang muncul selama pelaksanaan pada Triwulan II 2025. Dengan menggunakan data operasional dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rilis resmi indikator ekonomi, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan progress mengenai efektivitas program MBG.

2.3.1.1 Overview Proses Pelaksanaan MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Regional Lampung dilaksanakan berdasarkan regulasi yang menjadi landasan hukum program. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi acuan utama, di mana BGN berperan sebagai koordinator pemenuhan gizi nasional. Pelaksanaan teknis diatur lebih lanjut melalui SK Deputy Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis MBG serta SK BGN Nomor 13 Tahun 2024 terkait manajemen SDM. Untuk pengawasan daerah, BGN juga menerbitkan Surat Tugas Nomor SGAS.01/03.02/01/2025 yang memberikan panduan teknis. Seiring waktu, petunjuk teknis program diperluas mencakup standar kebersihan, keamanan pangan, pengelolaan bahan baku, hingga tata kelola distribusi.

Dalam implementasinya, BGN bertindak sebagai koordinator utama yang menjalin kerja sama lintas pihak. Tugasnya meliputi penyusunan kebijakan teknis, penjaminan standar kualitas pangan, pengelolaan rantai pasok, serta efisiensi distribusi makanan. Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, BGN membentuk Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi





(SPPG) sebagai unit pelaksana teknis. SPPG memastikan menu yang disalurkan sesuai standar gizi. Organisasi SPPG terdiri dari tiga orang, yakni koordinator lapangan, ahli gizi, dan akuntan. Mereka bekerja sama dengan UMKM, TNI, kepolisian, dan penyedia bahan pangan untuk menjamin kualitas sekaligus ketepatan distribusi. Program MBG sendiri dimulai sebagai uji coba pada Agustus 2024 dan berjalan nasional sejak Januari 2025, setelah perekrutan SPPI Batch 1 (September 2024) dan Batch 2 (November 2024).

Dari sisi sasaran, penerima manfaat program ini adalah peserta didik mulai dari SD hingga SMA/ sederajat serta kelompok rentan yang membutuhkan tambahan gizi. Sekolah yang terdaftar di DAPODIK Kemendikdasmen atau EMIS Kemenag dapat menjadi target, dengan syarat berlokasi maksimal 6 km atau 30 menit dari SPPG agar distribusi efisien. Anggaran setiap porsi makanan berkisar Rp8.000–Rp10.000 dengan kandungan kalori berbeda sesuai kelompok usia: 300–400 kkal untuk TK hingga kelas 3 SD, 700–800 kkal untuk kelas 4 SD hingga SMA, serta menu khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

2.3.2 Progres Pelaksanaan MBG di Regional Lampung

2.3.2.1 Progres Implementasi

Hingga 30 Juni 2025, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menunjukkan capaian yang cukup signifikan, meskipun masih perlu perluasan ke beberapa wilayah. Program ini telah hadir di 13 kabupaten/kota, kecuali Lampung Barat dan Pesisir Barat, dengan dukungan 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru mencapai 4% dari target 957 unit. Sampai pertengahan 2025, sebanyak 371.814 penerima manfaat atau sekitar 18% dari total target 2.021.981 orang telah dilayani melalui 3.079 kelompok penerima, dengan keterlibatan 293 supplier.

Perluasan cakupan di wilayah yang belum memiliki SPPG menjadi agenda penting ke depan, mengingat ketentuan distribusi program yang mengharuskan

radius pelayanan maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh 30 menit dari SPPG ke penerima manfaat. Ketentuan tersebut bersifat fleksibel, karena radius dapat dipersempit apabila jumlah siswa yang dilayani melampaui kapasitas dapur SPPG. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah SPPG akan terus beradaptasi dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Gambar 2.1. Progress Implementasi Makan Bergizi Gratis di Provinsi Lampung Semester I 2025



Sumber: BGN, 2025 (diolah)

Selain aspek distribusi, kesesuaian jumlah penerima manfaat dengan kebutuhan riil antarwilayah akan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas program. Data terkini juga menunjukkan bahwa sasaran utama program MBG di Lampung masih berfokus pada anak usia sekolah, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis program untuk mendukung tumbuh kembang siswa selama masa pendidikan formal.

2.3.3 Analisis Indikasi Awal Dampak Program MBG Terhadap *Outcome* Jangka Pendek

2.3.3.1 Tinjauan Literatur Dampak Program Makan Bergizi

Penelitian menunjukkan bahwa program makan gratis yang disponsori pemerintah untuk siswa memiliki potensi dalam memberikan dampak positif pada hasil pendidikan dan pembangunan ekonomi.





Beberapa studi menemukan bahwa program makan sekolah meningkatkan angka masuk sekolah siswa, terutama di kalangan anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah (Bonds, 2012). Program-program ini berhubungan dengan peningkatan prestasi kognitif, terutama dalam matematika (R. Nida & Dwi Puspita Sari, 2023), dan memiliki dampak positif yang signifikan pada prestasi akademik (Paul & Mondal, 2012).

Makan sekolah gratis universal dikaitkan dengan peningkatan partisipasi makan sekolah, peningkatan kualitas diet, ketahanan pangan, dan prestasi akademik (Cohen et al., 2021). Selain itu, program-program ini mungkin memiliki efek perlindungan pada BMI siswa dan berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah (Cohen et al., 2021). Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan tentang implikasi keuangan untuk distrik sekolah, bukti menunjukkan bahwa program makan gratis dapat berkontribusi pada hasil pendidikan yang positif dan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan gizi siswa dan prestasi akademik.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, bagian ini akan mencoba mengukur perkiraan dampak awal atas realisasi MBG terhadap beberapa indikator terkait di regional Lampung.

2.3.3.2 Asumsi dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Interpretasi Analisis Dampak Awal

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak awal dari realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap beberapa indikator ekonomi utama di regional Lampung. Data dan perspektif yang digunakan mencakup triwulan I dan II 2025 (periode Januari s.d. Juni 2025), di mana variabel independen adalah nilai rupiah realisasi MBG setiap bulan, dan variabel dependen adalah berbagai indikator ekonomi terkait.

Penting untuk ditekankan bahwa analisis ini bersifat preliminar dan mengidentifikasi asosiasi statistik awal, karena data masih sangat terbatas maka hasil analisis masih perlu diterjemahkan secara hati-hati.

Periode observasi yang masih sangat singkat, yaitu baru selama enam bulan (Januari s.d. Juni 2025), kemungkinan akan sangat membatasi generalisasi temuan. Sehingga, asumsi *ceteris paribus* digunakan, dimana berarti analisis menganggap faktor-faktor lain di luar realisasi MBG yang dapat memengaruhi *outcome* bersifat konstan selama periode observasi. Lebih lanjut, realisasi MBG diasumsikan sebagai produk dari delta (setiap tambahan/pertumbuhan) jumlah penerima manfaat dikalikan dengan rata-rata pengeluaran anggaran sebesar Rp10.000 per orang.

Asumsi yang digunakan

Tabel 2.17. Asumsi dan Estimasi Analisis MBG

Bulan	Pertumbuhan Penerima Manfaat	Standar Biaya (asumsi rata-rata observasi)	Jumlah Hari Sekolah	Asumsi Pengeluaran MBG per bulan
Jan	16.359	Rp10.000	19	Rp3,10 M
Feb	45.379	Rp10.000	20	Rp9,07 M
Mar	35.949	Rp10.000	21	Rp7,54 M
Apr	68,532*	Rp10.000	16	Rp19,68 M
Mei	95,944*	Rp10.000	17	Rp19,03 M
Jun	109,651*	Rp10.000	18	Rp24,63 M

Sumber: Sintesa, 2025 (diolah); *estimasi

Model regresi Log-Log

Dengan keterbatasan data yang baru tersedia untuk periode Januari s.d. Juni 2025, maka model persamaan regresi yang cocok adalah regresi linier sederhana (dengan asumsi *ceteris paribus*), bukan regresi linier berganda.

Selanjutnya, model regresi log-log dipilih untuk mencoba menangkap hubungan elastisitas antara variabel, yakni melihat seberapa besar persentase perubahan pada variabel dependen (misalnya NTP, IHK, perubahan harga komoditas) akibat perubahan persentase pada variabel independen (Realisasi MBG). Model regresi log-log mentransformasikan tiap variabel ke dalam bentuk logaritma natural (ln) sehingga distribusi data lebih mendekati normal dan variansinya lebih stabil (homoskedastis). Selain itu, model log-log juga memudahkan interpretasi koefisien regresi, karena langsung menunjukkan elastisitas (besaran dampak), sehingga lebih relevan





untuk analisis kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan atau perubahan relatif.

Formula model regresi log-log yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln(\hat{Y}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + \epsilon,$$

di mana:

Y = variabel dependen (NTP / Inflasi / lainnya)

X = realisasi MBG,

β_0 = intersep

β_1 = koefisien kemiringan (elastisitas)

ϵ = error term

Proses pengambilan keputusan statistik

Hasil analisis regresi log-log disajikan dengan memperhatikan signifikansi statistik, koefisien korelasi (r), koefisien determinasi (R^2). Seluruh model telah melalui uji asumsi klasik berupa: uji Normalitas (Lilliefors/Shapiro-Wilk), uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan), uji multikolinearitas (Variance Inflation Factor/ VIF), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson).

Signifikansi statistik yang digunakan sebagai acuan adalah $p\text{-value} < 0.10$ dimana lebih fleksibel dari acuan umum sebesar 0,05. Hal ini dilakukan agar penulis masih dapat menginterpretasikan permasalahan dan penelitian bidang *social science* dengan topik dan data yang masih relatif baru, dimana umumnya hasil awal yang ditunjukkan masih belum terlalu jelas.

Keterangan Variabel

Tabel 2.18. Keterangan Variabel Penelitian

Variabel	Penjelasan
Real_MBG	= Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
NTP	= Nilai Tukar Petani (agregat umum)
NTP_Pangan	= Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan
NTP_Hortikultura	= Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura
NTP_Peternakan	= Nilai Tukar Petani Peternakan
NTP_Perikanan_Tangka p	= Nilai Tukar Petani Perikanan Tangkap
NTP_Perikanan_Budidaya a	= Nilai Tukar Petani Perikanan Budidaya

Variabel	Penjelasan
IHK_Umum	= Indeks Harga Konsumen (Agregat Umum)
IHK_MMT	= Indeks Harga Konsumen Makanan, Minuman, dan Tembakau
Harga_Beras	= Rata-Rata Harga Beras Eceran (/kg)
Harga_Telur	= Rata-Rata Harga Beras Telur Ayam Ras (/kg)
Harga_Daging_Ayama	= Rata-Rata Harga Beras Daging Ayam Ras Segar (/kg)
Harga_Minyak_Goreng	= Rata-Rata Harga Beras Minyak Goreng Eceran (/l)

Sumber: BPS, penulis (diolah)

2.3.3.3 Dampak Awal MBG terhadap Pertanian

Tabel 2.19. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Petani Semester I-2025

Persamaan Regresi	Uji Asumsi Klasik	Koefisien Korelasi (r)	R-squared	p-value	Signifikansi (0,10)
$\ln(\text{NTP}) = 4.9602 + -0.0195 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.7303	0.5334	0.0988	Signifikan
$\ln(\text{NTP_Tanaman_Pangan}) = 4.9080 + -0.0198 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.7675	0.5891	0.07	Signifikan
$\ln(\text{NTP_Tanaman_Hortikultura}) = 4.7937 + -0.0039 \ln(\text{Real_MBG})$	Tidak Memenuhi	-0.4705	0.2214	0.386	Tidak Signifikan

Sumber: BPS, BGN, DJPb 2025 (diolah)

Dari perspektif statistik, hasil regresi menunjukkan adanya hubungan negatif yang cukup kuat antara realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Nilai Tukar Petani (NTP), terutama pada subsektor tanaman pangan. Koefisien korelasi yang relatif tinggi (-0,73 hingga -0,77) dengan nilai R-squared di atas 0,5 menandakan bahwa variasi realisasi MBG dapat menjelaskan lebih dari separuh variasi NTP. Meski demikian, perlu kehati-hatian dalam menafsirkan karena arah hubungan yang negatif (berbeda dibandingkan asumsi teori ekonomi umum) berpotensi dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti panen gabah pada Januari–April serta fluktuasi harga menjelang Idulfitri dan Iduladha. Artinya, meskipun hasilnya signifikan secara statistik, kesimpulan kausalitas masih





memerlukan validasi lebih lanjut dengan data yang lebih panjang.

Dari sudut pandang makroekonomi, pola ini dapat dijelaskan melalui mekanisme penawaran dan permintaan di pasar pangan. Saat musim panen awal tahun, pasokan gabah dan beras melimpah sehingga harga produsen cenderung turun, yang secara otomatis menekan NTP meskipun konsumsi beras melalui MBG meningkat. Pada periode Idulfitri (Maret–April), permintaan pangan naik, namun lebih banyak terkonsentrasi pada produk olahan dan daging sehingga tekanan harga gabah tetap terasa. Demikian pula menjelang Iduladha (akhir Juni), fokus konsumsi bergeser ke hewan ternak, sementara subsektor tanaman pangan tidak mendapatkan dampak harga yang signifikan. Kondisi inilah yang membuat peningkatan realisasi MBG belum mampu secara langsung memperkuat posisi tukar petani, bahkan justru beriringan dengan penurunan nilai tukarnya.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil ini menjadi sinyal penting bahwa implementasi MBG perlu diimbangi dengan strategi stabilisasi harga dan perlindungan pendapatan petani. Program MBG berpotensi besar mendorong konsumsi beras, namun jika tidak terintegrasi dengan pengelolaan pasca panen, distribusi, dan penyerapan gabah lokal, manfaatnya bagi petani tidak optimal. Pemerintah daerah bersama pusat dapat mempertimbangkan skema kemitraan antara sekolah penerima MBG dengan kelompok tani dan koperasi desa, sehingga rantai pasok lebih terjamin dari sisi harga maupun volume. Hasil analisis yang telah dilakukan mungkin menunjukkan bahwa program MBG belum sepenuhnya dapat memperkuat posisi tawar petani di pasar, sehingga keberlanjutan dampaknya bagi kesejahteraan mereka masih terbatas.

2.3.3.4 Dampak Awal MBG terhadap Peternakan

Dari perspektif statistik, hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhubungan signifikan dengan Nilai Tukar

Peternak (NTP Peternakan), dengan koefisien korelasi sebesar 0,74 dan R-squared 0,55. Artinya, sekitar 55 persen variasi NTP peternakan dapat dijelaskan oleh variasi realisasi MBG. Meski demikian, arah koefisien regresi tercatat negatif, yang berarti peningkatan realisasi MBG justru diikuti dengan penurunan NTP peternakan. Kondisi ini perlu dibaca dengan hati-hati, karena hubungan statistik yang terdeteksi bisa dipengaruhi faktor musiman, terutama momen Idulfitri dan Iduladha yang meningkatkan permintaan daging sapi dan kambing, sehingga harga ternak mengalami fluktuasi tajam.

Tabel 2.20. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Peternak Semester I-2025

Persamaan Regresi	Uji Asumsi Klasik	Koefisien Korelasi (r)	R-squared	p-value	Signifikansi (0,10)
$\ln(\text{NTP_Peternakan}) = 4.6186 + -0.0039 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	0.7428	0.5518	0.0911	Signifikan

Sumber: BPS, BGN, DJPb 2025 (diolah)

Dari perspektif makroekonomi, dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui interaksi permintaan dan pasokan di sektor peternakan. Pada bulan Maret–April (Idulfitri) dan akhir Juni (Iduladha), konsumsi masyarakat cenderung meningkat terhadap daging, sehingga harga ternak naik dalam jangka pendek. Namun, peningkatan harga tidak serta-merta memperbaiki NTP karena biaya produksi ternak (seperti pakan, obat, dan transportasi) juga meningkat seiring momen tersebut. Selain itu, program MBG lebih fokus pada penyediaan makanan bergizi berbasis beras dan lauk sederhana, sehingga serapan langsung terhadap komoditas ternak masih terbatas. Hal inilah yang mungkin menjelaskan mengapa dampak MBG terhadap NTP peternakan terukur negatif meskipun permintaan daging meningkat pada periode tertentu.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi MBG masih perlu diperkuat melalui integrasi dengan subsektor peternakan, agar manfaatnya lebih inklusif bagi peternak lokal. Pemerintah dapat mendorong pola kemitraan antara penyedia MBG dengan koperasi





atau kelompok peternak, misalnya dalam penyediaan telur ayam, daging ayam, maupun produk olahan ternak untuk menu MBG. Dengan cara ini, rantai pasok MBG tidak hanya mendukung konsumsi masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi tawar peternak. Program saat ini mungkin belum secara optimal menyerap produksi ternak lokal, sehingga potensi manfaat bagi peternak masih belum sepenuhnya tercapai.

2.3.3.5 Dampak Awal Program MBG terhadap Perikanan

Tabel 2.21. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Nilai Tukar Nelayan Semester I-2025

Persamaan Regresi	Uji Asumsi Klasik	Koefisien Korelasi (r)	R-squared	p-value	Signifikansi (0,10)
$\ln(\text{NTP_Perikanan_Tangkap}) = 4.7297 + 0.0009 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	0.5286	0.2794	0.3013	Tidak Signifikan
$\ln(\text{NTP_Perikanan_Budidaya}) = 4.5714 + 0.0008 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	0.2818	0.0794	0.6387	Tidak Signifikan

Sumber: BPS, BGN, DJPb 2025 (diolah)

Dari perspektif statistik, hasil regresi menunjukkan bahwa realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Nilai Tukar Nelayan, baik di subsektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nilai R-squared masing-masing hanya 0,27 dan 0,08, yang berarti variasi NTP nelayan sebagian besar dipengaruhi faktor lain di luar realisasi MBG. Koefisien korelasi juga relatif lemah, bahkan mendekati nol pada perikanan budidaya. Hal ini menandakan bahwa secara statistik, MBG pada periode awal implementasi belum menunjukkan keterkaitan yang berarti dengan kesejahteraan nelayan.

Dari perspektif makroekonomi, kondisi ini dapat dipahami karena pola produksi dan harga ikan sangat dipengaruhi oleh musim. Pada Januari–April, nelayan tangkap di Lampung berada pada musim puncak dengan hasil melimpah, sehingga harga cenderung turun meskipun volume produksi tinggi. Sebaliknya, pada Juni mulai masuk musim paceklik yang membuat hasil tangkapan menurun, sehingga

tekanan terhadap pendapatan nelayan meningkat. Sementara itu, kebutuhan konsumsi masyarakat saat Idulfitri dan Iduladha lebih terfokus pada beras, daging sapi, kambing, atau ayam, sehingga kontribusi ikan terhadap permintaan pangan MBG relatif terbatas. Oleh karena itu, dampak MBG terhadap NTP nelayan kemungkinan masih sangat kecil.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini mengisyaratkan perlunya strategi yang lebih terarah agar sektor perikanan juga mendapat manfaat dari program MBG. Pemerintah daerah dapat mendorong integrasi menu MBG dengan produk ikan lokal, baik segar maupun olahan, khususnya pada periode musim puncak agar harga ikan nelayan tidak jatuh. Selain itu, dukungan penyimpanan dingin (*cold storage*) dan pengolahan pasca panen menjadi penting untuk menjaga nilai jual ikan sepanjang musim. Hasil analisis yang telah dilakukan mungkin menunjukkan bahwa program MBG pada tahap awal belum sepenuhnya menyasar diversifikasi pangan berbasis perikanan, sehingga potensi besar Lampung sebagai daerah penghasil ikan belum terhubung secara optimal dengan program tersebut.

2.3.3.6 Dampak Awal Program MBG terhadap Inflasi/ Kenaikan Harga

Tabel 2.22. Hasil Analisis Regresi Pengaruh Realisasi MBG terhadap Indeks Harga Konsumen dan Harga Komoditas Semester I-2025

Persamaan Regresi	Uji Asumsi Klasik	Koefisien Korelasi (r)	R-squared	p-value	Signifikansi (0,10)
$\ln(\text{IHK_Umum}) = 4.6853 + 0.0090 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.3204	0.1027	0.5985	Tidak Signifikan
$\ln(\text{IHK_Makanan_Minuman_Tembakau}) = 4.7554 + 0.0086 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.6277	0.3939	0.2605	Tidak Signifikan
$\ln(\text{Harga_Beras}) = 9.5802 + 0.0032 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.7317	0.5354	0.098	Signifikan
$\ln(\text{Harga_Telur}) = 10.3347 + -0.0102 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.32	0.103	0.5985	Tidak Signifikan





Persamaan Regresi	Uji Asumsi Klasik	Koefisien Korelasi (r)	R-squared	p-value	Signifikansi (0,10)
$\ln(\text{Harga_Daging_Ayam}) = 10.5936 + -0.0305 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.628	0.394	0.2605	Tidak Signifikan
$\ln(\text{Harga_Minyak_Goreng}) = 9.9470 + -0.0055 \ln(\text{Real_MBG})$	Memenuhi	-0.732	0.535	0.098	Signifikan

Sumber: BPS, BGN, DJPb 2025 (diolah)

Dari perspektif statistik, hasil regresi menunjukkan bahwa secara umum realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi (IHK umum maupun kelompok makanan, minuman, dan tembakau). Namun, terdapat pengecualian pada harga beras dan minyak goreng, di mana hubungan yang terdeteksi signifikan meskipun arah korelasinya negatif. R-squared yang relatif tinggi pada kedua komoditas tersebut (sekitar 0,53) menandakan bahwa fluktuasi harga beras dan minyak goreng cukup sensitif terhadap variasi realisasi MBG. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi dalam program MBG dapat memberikan tekanan pada harga bahan pokok tertentu, walaupun secara keseluruhan tidak menggerakkan inflasi umum secara berarti.

Dari perspektif makroekonomi, pola ini dapat dipahami karena periode Januari–April di Lampung bertepatan dengan panen raya gabah, sehingga harga beras cenderung stabil meski ada peningkatan permintaan dari MBG. Namun, menjelang Idulfitri (Maret–April) konsumsi masyarakat melonjak, sehingga harga komoditas pangan tertentu ikut terdorong. Sementara itu, pada akhir Juni bertepatan dengan Iduladha, pola konsumsi beralih ke daging sapi dan kambing, sehingga tekanan harga lebih banyak terjadi pada daging ketimbang bahan pangan pokok lain. Harga minyak goreng yang menunjukkan hubungan signifikan bisa jadi disebabkan oleh peran minyak sebagai bahan dasar masakan harian dalam menu MBG maupun rumah tangga, sehingga ketika kebutuhan meningkat, sensitivitas harga langsung terlihat.

Dari perspektif kebijakan publik, temuan ini menegaskan perlunya pengelolaan rantai pasok pangan secara lebih terkoordinasi agar program MBG tidak menimbulkan tekanan harga yang berlebihan pada komoditas utama. Pemerintah dapat memperkuat cadangan beras pemerintah, mendorong efisiensi distribusi minyak goreng, serta menyiapkan skema stabilisasi harga melalui kerja sama dengan Bulog maupun produsen lokal. Kritik yang dapat diajukan secara moderat adalah bahwa saat ini MBG belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pengendalian harga bahan pokok, sehingga potensi risiko inflasi sektoral masih ada. Jika integrasi pasokan dan konsumsi ini diperkuat, program MBG tidak hanya mampu menjaga gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendali inflasi daerah.

2.3.3.7 Overview Keseluruhan Dampak MBG Terhadap Permintaan dan Penawaran Agregat

Dari perspektif keterbatasan statistik, hasil regresi awal menunjukkan adanya variasi tingkat signifikansi dan kekuatan korelasi antar subsektor. Pada pertanian dan peternakan, hubungan terlihat signifikan dengan R-squared cukup tinggi, namun arah koefisien justru negatif. Sebaliknya, pada perikanan dan inflasi umum, hubungan cenderung tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik MBG memang memberi sinyal keterkaitan dengan harga dan kesejahteraan produsen, tetapi pola hubungan tersebut masih rentan bias karena faktor musiman (panen gabah Januari–April, puncak tangkapan ikan Oktober–April, dan konsumsi saat Idulfitri serta Iduladha). Oleh karena itu, kesimpulan kausalitas dari data awal ini masih perlu validasi dengan observasi lebih panjang dan kontrol terhadap variabel lain.

Dari perspektif ekonomi riil, MBG cenderung meningkatkan permintaan agregat terutama pada komoditas pangan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan protein hewani. Namun, karena pelaksanaannya bertepatan dengan periode panen raya gabah di Lampung, peningkatan permintaan tidak serta-merta memperbaiki nilai tukar petani





karena pasokan yang melimpah justru menekan harga. Hal serupa terjadi di peternakan, di mana peningkatan konsumsi daging pada momen keagamaan beriringan dengan naiknya biaya produksi, sehingga keuntungan peternak tidak optimal. Sementara pada perikanan, dampaknya kecil karena konsumsi MBG lebih terfokus pada lauk sederhana berbasis daging ayam atau telur, bukan ikan. Dengan demikian, dorongan MBG terhadap permintaan agregat masih menghadapi keterbatasan dalam menyeimbangkan sisi penawaran.

Dari perspektif moneter, dampak MBG terhadap inflasi umum masih relatif terbatas. Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak menunjukkan hubungan signifikan, meskipun terdapat sinyal pada komoditas tertentu seperti beras dan minyak goreng. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak menimbulkan lonjakan inflasi luas, tetapi berpotensi menekan harga di pasar komoditas tertentu akibat distribusi yang terfokus. Di satu sisi, kondisi ini menenangkan karena tidak memicu instabilitas harga secara makro. Namun di sisi lain, sensitivitas harga pada komoditas pokok tertentu menuntut peran aktif otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga ketersediaan pasokan agar tekanan harga sektoral tidak menyebar menjadi inflasi agregat.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil ini menggambarkan bahwa desain program MBG masih lebih kuat pada aspek permintaan (penyediaan konsumsi) dibanding aspek penawaran (penyerapan hasil produksi lokal). Dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat sudah terlihat dari ketersediaan makanan bergizi, namun bagi petani, peternak, dan nelayan, manfaat masih terbatas atau bahkan cenderung negatif pada nilai tukar. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu mengarah pada integrasi MBG dengan pengelolaan rantai pasok pangan, misalnya kontrak pasok dengan kelompok tani, koperasi peternak, atau nelayan budidaya. Dengan cara ini, MBG dapat berfungsi ganda yaitu menjaga gizi masyarakat sekaligus memperkuat posisi produsen lokal.

Dari perspektif *public finance*, MBG merupakan program belanja sosial yang memiliki *multiplier effect* terhadap permintaan agregat, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh desain fiskalnya. Jika anggaran MBG hanya dialokasikan pada pembelian komoditas dari pasar yang tersedia tanpa meningkatkan keterhubungan dan produktivitas dengan produsen lokal, maka efek belanja pemerintah terhadap pendapatan domestik akan berkurang. Sebaliknya, jika pemerintah daerah menggunakan instrumen fiskal untuk memastikan penyerapan hasil panen, hasil ternak, dan produksi perikanan lokal, maka alokasi anggaran MBG dapat menjadi instrumen stabilisasi harga dan peningkatan pendapatan produsen lokal.

2.3.4 Isu Strategis Pelaksanaan MBG di Lampung

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung dirancang sebagai langkah penting untuk memperbaiki kondisi gizi anak-anak serta kelompok masyarakat rentan, sekaligus memberi dorongan pada aktivitas ekonomi daerah. Walaupun memiliki tujuan yang kuat, implementasi di lapangan masih diwarnai sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi agar manfaatnya benar-benar maksimal.

1) Isu Desain Program dan Arah Kebijakan

Kebijakan MBG memiliki cakupan penerima yang luas, mulai dari siswa SD hingga SMA, termasuk kelompok rentan. Hal ini membuat penentuan sasaran yang tepat sering kali menjadi persoalan, terutama bila dibandingkan dengan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang lebih spesifik menasar 1000 hari pertama kehidupan. Perbedaan orientasi ini bisa menurunkan efektivitas MBG dalam mendukung penanganan stunting secara langsung. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi di tingkat daerah belum sepenuhnya merata, karena tata kelola masih sangat bergantung pada peran pusat (BGN). Situasi ini berpotensi membatasi sinergi kebijakan lokal yang dibutuhkan untuk memperkuat implementasi.

2) Isu Operasional dan Distribusi





Pada aspek operasional, terdapat hambatan dalam menjaga kecukupan gizi sekaligus keragaman menu. Misalnya, distribusi susu yang menjadi sumber nutrisi penting masih belum konsisten di seluruh titik pelaksanaan. Kendala lainnya mencakup keterbatasan penyedia dapur dan pemasok yang memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, serta kualitas layanan. Dari sisi administrasi, keterlambatan pembayaran pegawai maupun reimbursement vendor juga menjadi tekanan tambahan bagi pengelola. Selain itu, akses program di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Lampung masih terbatas, sementara kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas belum seluruhnya terakomodasi.

3) Isu Dampak Sosial-Ekonomi dan Aspek Fiskal

Secara sosial-ekonomi, MBG dapat membantu keluarga miskin dengan menurunkan pengeluaran pangan, sehingga anggaran rumah tangga bisa dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan. Namun, efek jangka panjangnya sangat bergantung pada keterpaduan dengan program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta dukungan terhadap faktor mendasar, misalnya perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Walau manfaatnya jelas, program ini berpotensi menambah beban fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan pendanaan perlu dihitung secara matang agar tidak menimbulkan risiko ketahanan fiskal.

4) Isu Risiko dan Mitigasi

Pelaksanaan MBG juga tidak lepas dari sejumlah risiko. Keterbatasan pasokan pangan lokal bisa mendorong penggunaan bahan olahan tinggi (ultra-processed food/UPF), yang meski bergizi tetapi tidak selalu ideal untuk jangka panjang. Di samping itu, belum menjadi hal umum bagi BUMDes atau Koperasi Desa terlibat sebagai pemasok, sehingga peluang memperkuat rantai pasok lokal masih kurang dimanfaatkan. Risiko lain terkait distribusi, standar kebersihan makanan, dan pengelolaan limbah paska makan tetap perlu menjadi prioritas

pengawasan. Dengan pendekatan mitigasi yang proaktif, program ini berpeluang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2.3.5 Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis awal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung menunjukkan dampak yang beragam terhadap sektor-sektor utama. Pada subsektor pertanian dan peternakan, hubungan yang terdeteksi signifikan justru cenderung negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi MBG beriringan dengan penurunan nilai tukar produsen. Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor musiman seperti panen gabah, lonjakan konsumsi pada Idulfitri, dan kebutuhan hewan kurban saat Iduladha, yang membuat keseimbangan harga tidak sepenuhnya mendukung posisi petani maupun peternak. Sebaliknya, di sektor perikanan dampaknya relatif lemah, sementara pada inflasi umum tidak terlihat pengaruh berarti, meski terdapat sensitivitas pada komoditas tertentu seperti beras dan minyak goreng. Dengan kata lain, MBG lebih berperan sebagai pendorong permintaan konsumsi dibanding penguat posisi produsen dalam jangka pendek.

Dari sisi kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya dengan memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memerlukan integrasi yang lebih erat dengan rantai pasok lokal. Tanpa mekanisme yang menghubungkan kebutuhan konsumsi program dengan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, manfaat ekonomi daerah akan terbatas, bahkan berpotensi menekan nilai tukar produsen. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu menekankan pada kemitraan dengan koperasi, kelompok tani, dan pelaku perikanan, disertai dukungan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Dengan pendekatan tersebut, MBG dapat berfungsi ganda: meningkatkan gizi masyarakat penerima manfaat sekaligus memperkuat kesejahteraan produsen lokal serta menjaga stabilitas harga di tingkat daerah.





Simpulan awal terhadap isu-isu strategis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat serta memberikan stimulus bagi perekonomian lokal, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Permasalahan yang muncul antara lain cakupan kebijakan yang terlalu luas, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, hingga hambatan operasional dan logistik. Selain itu, ketidakmerataan akses terutama di wilayah 3T serta keterbatasan dalam pemenuhan standar gizi yang beragam mengindikasikan perlunya penguatan strategi pelaksanaan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.

Di sisi lain, peluang manfaat MBG tetap terbuka luas, baik dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga miskin maupun dalam mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk pangan lokal. Namun, terdapat risiko yang harus dikelola dengan hati-hati, seperti kecenderungan penggunaan bahan pangan olahan secara berlebihan, keterbatasan rantai pasok lokal, serta tekanan terhadap keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi MBG di Lampung akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, meningkatkan partisipasi pelaku lokal, serta memastikan tata kelola dan pendanaan yang berkelanjutan, tanpa mengurangi kualitas gizi dan dampak positif yang ditargetkan.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan isu strategis dan temuan awal dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung, beberapa rekomendasi konstruktif dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas, keberlanjutan, serta relevansi kebijakan:

1) Evaluasi Berkala Desain Program dan Penguatan Keselarasan Kebijakan

- a) BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas cakupan penerima manfaat agar program lebih fokus pada kelompok paling

rentan, terutama balita, ibu hamil, dan masyarakat miskin di wilayah 3T. Mengingat data menunjukkan MBG belum cukup banyak terfokus pada kelompok rentan guna meningkatkan efektivitas program.

- b) BGN, Kemensos, dan Dinas Sosial Pemda Lampung perlu memperkuat integrasi MBG dengan program lain seperti PPS, PKH, dan BPNT. Dengan sinergi ini, manfaat gizi dari MBG dapat diperkuat dengan jaring pengaman sosial yang lebih luas, sehingga efek kumulatif terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi lebih nyata.

2) Perbaikan Operasional dan Penguatan Rantai Pasok Lokal

- a) SPPG perlu merumuskan standar gizi berbasis data lokal, misalnya memperhatikan pola panen beras di Januari–April, musim puncak ikan pada Oktober–April, serta lonjakan permintaan daging di Iduladha. Dengan begitu, penyusunan menu MBG bisa selaras dengan siklus pangan daerah, menjaga kontinuitas pasokan sekaligus mendukung harga tetap stabil.
- b) Pemerintah Desa bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dapat memperkuat peran BUMDes, koperasi, dan UMKM sebagai pemasok pangan MBG. Dukungan berupa pelatihan, pendampingan sertifikasi, hingga insentif fiskal akan meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan atas pasokan bahan pangan bagi dapur MBG.
- c) BGN perlu membangun sistem logistik berbasis teknologi dengan pemetaan wilayah 3T. Kolaborasi dengan TNI/Polri, jasa transportasi lokal, dan platform digital distribusi dapat mengurangi keterlambatan distribusi makanan.
- d) Setiap SPPG di Lampung didorong segera memanfaatkan fitur Virtual Account untuk





pembayaran gaji dan reimbursement vendor agar permasalahan administrasi tidak mengganggu kelancaran operasional maupun motivasi pelaksana di lapangan.

3) Manajemen Dampak Ekonomi dan Fiskal

- a) Mengingat regresi menunjukkan adanya pengaruh MBG pada harga beras dan minyak goreng, TPID bersama BGN perlu mengembangkan mekanisme early warning system harga pangan. Pemantauan rutin serta intervensi pasar (misalnya operasi pasar atau *buffer stock*) perlu dilakukan untuk mencegah inflasi pangan pasca distribusi MBG.
- b) BGN dan Kemensos dapat menyelenggarakan edukasi literasi keuangan bagi penerima manfaat, agar dana rumah tangga yang dihemat dari MBG dapat dialokasikan lebih produktif, misalnya untuk pendidikan anak atau peningkatan kesehatan keluarga.

4) Manajemen Risiko dan Peningkatan Transparansi

- a) Validasi data penerima manfaat perlu dilakukan secara rutin oleh SPPG, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial untuk memastikan ketepatan sasaran, mengingat cakupan MBG masih berpotensi bias terhadap kelompok non-rentan.
- b) Pengawasan kualitas pangan dapat diperketat, terutama untuk menghindari bahan *ultra-processed food*. Dengan memanfaatkan potensi pangan segar lokal seperti ikan (saat musim baratan) atau hasil pertanian musiman, kualitas gizi bisa lebih terjamin sekaligus menekan risiko kesehatan jangka panjang.
- c) BGN disarankan membangun sistem *dashboard* pelaporan digital terintegrasi yang transparan dan real-time. Sistem ini mencakup rantai pasok, distribusi, kualitas menu, hingga dampak sosial-ekonomi. Transparansi data akan mendukung akuntabilitas publik dan mempermudah evaluasi berbasis bukti (*evidence-based policy*).



SUPLEMEN 5

Program Ketahanan Energi

Ketahanan Energi untuk Masyarakat dan
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi Presiden

“Tingkatkan produksi (lifting Migas), stabilisasi harga dan Transisi energi bersih (EBT) serta pengurangan emisi”

Tujuan Program

- ✓ **Kemandirian Energi Nasional:** Menargetkan swasembada energi, termasuk penghentian impor BBM dalam waktu lima tahun dan menjadi pemain utama transisi energi global.
- ✓ **Pemerataan dan Kesejahteraan:** Memberikan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan kepada seluruh rakyat, termasuk di desa terpencil dan pulau-pulau kecil.
- ✓ **Zero Emission dan Green Energy:** Memacu pencapaian target nol emisi karbon sebelum 2050 dan meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 100% dalam 10 tahun ke depan.
- ✓ **Dukungan untuk Industri dan Pertumbuhan Ekonomi:** Ketahanan energi diposisikan sebagai tulang punggung transformasi Indonesia menuju negara industri modern dan makmur.



Anggaran Nasional
Rp415,2 Triliun

- ➡ Subsidi Energi **Rp203,1 T**
- ➡ Kompensasi Energi **Rp190,9 T**
- ➡ Insentif Perpajakan **Rp16,7 T**
- ➡ Infrastruktur Energi **Rp4,5 T**

Potensi EBT di Lampung

Sumber Energi	Existing	Potensi Energi
Panas Bumi	220 MW	≈ 1.758 MWe (estimasi)
Energi Surya	≈1,21 MW	belum ada estimasi
Bioenergi	≈52 MW	Potensi signifikan
Hidro & Mikrohidro	≈204 MW	≈ 330 MW
Waste-to-Energy	0 MW	Potensi (PLT Sampah)

Kendala dan Tantangan

- ✓ Kapasitas produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sedangkan penemuan cadangan baru migas terbatas, mengancam ketersediaan energi fosil jangka panjang.
- ✓ Infrastruktur distribusi energi, jaringan listrik, dan fasilitas energi terbarukan belum merata terutama di wilayah terpencil dan pelosok nusantara, sehingga akses energi belum merata.
- ✓ Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan migas, sedangkan biaya investasi energi baru terbarukan relatif mahal dengan tantangan pengumpulan bahan baku dan teknologi pemanfaatan.

Sumber: RPJPD, RPMD, RUPTL, Handbook Energi (diolah)

BAB 3

ANALISIS TEMATIK: KETAHANAN ENERGI

SMV
corner

pojok
UMKM



“Hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak”

-Albert Einstein-

Infra KANWIL DIPP PROVINSI LAMPUNG

Ultra Mikro (UMi)

Apa itu UMi?
Pembiayaan UMi merupakan program pemerintah untuk menyediakan pembiayaan dan pendampingan bagi usaha mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan melalui perbankan.

Plafon Pinjaman
Plafon pinjaman UMi Rp 20 Juta per Debitur dan tenor maksimal 3 tahun

Tujuan Program UMi

- Menyediakan pembiayaan yang mudah dan
- Menambah jumlah pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan;
- Mendukung kemandirian pelaku usaha penerima bantuan sosial.

Syarat Pinjaman UMi

- Memiliki NIK (KTP Elektronik)
- Tidak sedang menerima Fasilitas Program Pemerintah (KUR)

Manfaat Bagi Pelaku UMi

- Persyaratan mudah dan pencairan cepat;
- Mendapatkan pendampingan usaha;
- Berkesempatan mendapatkan pelatihan usaha produk.

Pengaluran

- Disalurkan secara langsung melalui penyalur, PT PRM, PT Pegadaian, KSPS, KSP, Koperasi, (KUR),
- Disalurkan secara tidak langsung melalui PT Baha Artha Ventura melalui linkage.

BAB 3 ANALISIS KETAHANAN ENERGI: POTENSI KERJA SAMA PEMBIAYAAN BPD LH UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DI LAMPUNG

3.1 PENDAHULUAN

Transisi energi menuju penggunaan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi salah satu prioritas strategis nasional. Pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada 2050, sesuai Kebijakan Energi Nasional yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan RUPTL 2021–2030. Hingga akhir 2024, realisasi bauran EBT nasional baru sekitar 14,7%, menunjukkan perlunya akselerasi yang signifikan untuk mencapai target. Provinsi Lampung memiliki potensi EBT yang besar, termasuk panas bumi, surya, biomassa, mikro-hidro, dan *waste-to-energy*. Namun, keterbatasan pendanaan masih menjadi kendala utama percepatan proyek EBT di daerah. Biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, serta tantangan teknis dan regulasi menyebabkan penerapan EBT belum optimal.

Dalam konteks inilah, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) berperan strategis sebagai pengelola dana lingkungan untuk mendukung pembiayaan proyek hijau, termasuk EBT di Lampung. BPD LH dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana publik maupun bantuan internasional di bidang lingkungan hidup. Melalui berbagai instrumen pembiayaan yang inovatif, BPD LH dapat menjadi katalis pendanaan transisi energi di level daerah.

3.2 METODOLOGI DAN KERANGKA ANALISIS

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan data dan informasi yang diperoleh melalui studi pustaka atas dokumen perencanaan (RPJMD dan RPJPD Lampung), laporan sektoral (RUPTL 2021–2030, *Handbook* Statistik

Energi dan Ekonomi 2024), Laporan Tahunan BPD LH 2023, serta kajian dan artikel relevan. Analisis dilakukan dengan kerangka empat pilar utama: (1) *Resource Assessment*, (2) *Financing Landscape*, (3) *Investment Gap Analysis*, (4) *Fiscal & Institutional Linkage*, dan (5) *Policy Recommendation*. Setiap pilar dikaji untuk mendapatkan gambaran komprehensif dari sisi potensi teknis, kondisi pendanaan saat ini, kebutuhan investasi dan gap pendanaan, peran fiskal dan institusional (khususnya BPD LH dan pemerintah daerah), serta opsi kebijakan ke depan.

Beberapa alat analisis spesifik digunakan, antara lain: Analisis SWOT Pembiayaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam skema pembiayaan EBT, serta Matriks Kecocokan Proyek-Instrumen untuk menilai kecocokan jenis proyek EBT dengan instrumen pembiayaan BPD LH maupun non-BPD LH. Melalui pendekatan ini, diharapkan kajian dapat menghubungkan potensi teknis EBT dengan aspek finansial dan fiskal secara tepat sasaran.

3.3 POTENSI EBT DI REGIONAL LAMPUNG

Provinsi Lampung memiliki beragam potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik maupun energi non-listrik. Berikut gambaran singkat masing-masing potensi EBT utama di Lampung:

3.3.1 Panas Bumi

Lampung termasuk wilayah kaya sumber panas bumi di Sumatera. Terdapat 13 area prospek panas bumi di 5 kabupaten (Way Kanan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Lampung Selatan) dengan total potensi sumber daya panas bumi sekitar 1.758 MWe. Wilayah kerja panas bumi (WKP) yang sudah dikembangkan adalah Ulubelu di





Tanggamus. PLTP Ulubelu telah beroperasi sejak 2012 dengan 4 unit dan kapasitas terpasang ± 220 MW. Cadangan terbukti panas bumi Lampung sekitar 225 MWe, sehingga masih ada peluang ekspansi, misal Unit 5 Ulubelu atau pengembangan WKP lain di Suoh Sekincau dan Gunung Rajabasa. Kendala sektor ini adalah investasi awal sangat besar dan memerlukan teknologi tinggi, namun potensi kapasitas dan faktor kapasitasnya tinggi sehingga cocok untuk pembangkit beban dasar.

Gambar 3.1. Potensi Panas Bumi Ulubelu



Sumber: <https://www.pge.pertamina.com/>

3.3.2 Energi Surya

Lampung memiliki tingkat penyinaran matahari yang baik terutama di wilayah dataran rendah dan perkotaan. Pengembangan PLTS berpotensi dilakukan dalam dua skema yaitu PLTS atap (*rooftop*) pada rumah tangga, perkantoran, industri, dan fasilitas publik, serta PLTS skala utilitas (*grid-connected*) pada lahan luas atau *floating* (misal di waduk). Wilayah Lampung yang cukup luas dan tingkat kepadatan penduduk yang moderat memungkinkan ketersediaan lahan untuk PLTS skala besar, misalkan rencana PLTS di Way Tias (Kab. Tanggamus). Selain itu, program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) telah dimanfaatkan di desa terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Dengan tren penurunan biaya modul surya, PLTS diproyeksikan menjadi primadona EBT masa depan. Tantangan PLTS adalah sifatnya *intermiten* sehingga perlu dukungan baterai atau *grid* yang andal.

3.3.3 Bioenergi

Lampung merupakan lumbung pertanian nasional, khususnya singkong (ubi kayu), jagung, tebu, dan kelapa sawit, sehingga menghasilkan limbah biomassa melimpah. Produksi singkong Lampung

sempat mencapai 9 juta ton (2010) namun menurun menjadi kurang 7 juta ton pada 2022, tetapi tetap menjadikan Lampung salah satu produsen singkong terbesar Indonesia. Sekitar 90% singkong diserap industri tapioka, menyisakan residu (onggok) dan limbah cair yang berpotensi diolah menjadi biogas atau biomassa padat. Begitu pula, ampas tebu dari pabrik gula, cangkang dan serat sawit, sekam padi, hingga limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar PLT Biomassa/PLT Biogas. Data Dinas ESDM Lampung menunjukkan per 2020 telah ada PLT Biomassa total kurang lebih 52 MW (23 MW *on-grid*, 29 MW *off-grid*) di Provinsi Lampung, tersebar pada pabrik gula dan industri pengolahan, misal PLT Biomassa Gunung Madu Plantations 20 MW dan Bunga Mayang 6,8 MW, serta terdapat PLT Biogas 3 MW *on-grid* di Terbanggi. Ini menunjukkan ketertarikan sektor swasta memanfaatkan biomassa sebagai *co-generation* energi. Tantangan bioenergi adalah kontinuitas pasokan bahan baku dan nilai ekonomi yang kalah bersaing dengan bahan bakar fosil.

3.3.4 Hidro dan Mikro Hidro

Walaupun energi Hidro dan Mikro Hidro bukan dikategorikan sebagai energi baru, tetapi perlu dibahas karena Lampung memiliki beberapa PLTA dan PLTM/PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro). Tiga PLTA besar di Lampung yaitu: PLTA Batutegei (28,6 MW), Way Semangka (56 MW), dan Way Besai (90 MW), dengan total kapasitas 174,6 MW telah menyuplai listrik regional. Selain itu, terdapat PLTM/PLTMH seperti PLTM Way Besai (7,7 MW) dan Way Pintau (3,22 MW). Potensi PLTMH Lampung banyak terdapat di Lampung Barat dan Tanggamus. Meski potensi hidro besar sudah termanfaatkan, peluang PLTMH skala kecil (kurang dari 10 MW) di pedesaan masih ada dan dapat mendukung elektrifikasi desa terpencil. Tantangan pada PLTMH antara lain pembiayaan proyek kecil yang kurang menarik bagi investor besar, serta risiko musim kemarau yang memengaruhi debit air.

3.3.5 Waste to Energi (WtE)





Pengolahan sampah menjadi energi (PLTSa) merupakan opsi untuk kota besar seperti Bandar Lampung. TPA Bakung di Bandar Lampung menampung volume sampah besar, sehingga berpotensi dibangun LFG (*landfill gas*) recovery atau *incinerator* skala menengah. Saat ini PLTSa belum ada di Lampung. Namun pemerintah pusat mendorong proyek percontohan PLTSa di beberapa kota. Untuk Lampung, WtE bisa masuk agenda jangka panjang mengingat kebutuhan investasi dan regulasi (Perpres PLTSa) yang kompleks. Ke depan, proyek *waste-to-energy*, misal *landfill gas* dari TPA, juga dapat dikembangkan di kota Bandar Lampung yang menghasilkan sampah kota cukup besar.

Tabel 3.1. Potensi EBT di Lampung

Sumber Energi	Daya Terpasang Existing	Potensi Energi
Panas Bumi	220 MW (PLTP Ulubelu)	≈ 1.758 MWe (estimasi)
Energi Surya	≈1,21 MW (PLTS off-grid tersebar hingga 2020)	belum ada estimasi
Bioenergi (Biomassa/Biogas)	≈52 MW (PLT Biomassa/Biogas terpasang ±52 MW)	Potensi energi signifikan, skala MW tergantung teknologi
Hidro & Mikrohidro	≈204 MW	≈ 330 MW (potensi proyek baru 127 MW plus existing)
Waste-to-Energy (PLTSa)	0 MW (belum ada Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)	Potensi (PLT Sampah)

Sumber: RPJPD, RPMD, RUPTL, *Handbook Energi* (diolah)

Secara umum, potensi EBT Lampung dapat menjadikan provinsi ini salah satu pusat pengembangan energi bersih di Sumatera. Lampung memiliki keunggulan komparatif: (1) sumber daya panas bumi unggul di Sumatera, (2) produksi pertanian besar mendukung bioenergi, (3) tingkat konsumsi listrik yang tumbuh di atas rata-rata nasional (ekonomi Lampung tumbuh 5,47% yoy Triwulan I-2025, mendorong kenaikan kebutuhan energi). Pengembangan EBT sejalan dengan agenda dekarbonisasi nasional serta prioritas pembangunan Lampung terkait ketahanan energi

dan pemanfaatan sumber daya lokal. Dalam RPJMD Perubahan 2019-2024, Pemprov Lampung menargetkan peningkatan masif pembangkit listrik EBT agar kontribusi EBT mencapai 31% di 2050, seiring dengan target nasional. Hal ini akan dicapai melalui tiga jalur: penambahan kapasitas listrik EBT, peningkatan biofuel (B30), dan pemanfaatan langsung EBT (misal biogas, PLTS atap).

3.4 PROFIL DAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN BPD LH

BPD LH dibentuk pada akhir 2019 sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, dengan mandat menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana terkait lingkungan hidup. BPD LH mengintegrasikan berbagai skema pendanaan lingkungan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian. Misalnya, dana Reboisasi (DR) dari Kementerian LHK sebesar Rp2,01 triliun dialihkan menjadi dana pokok BPD LH. Dana ini kini menjadi modal pembiayaan usaha kehutanan dan investasi lingkungan yang dikelola BPD LH, termasuk program perhutanan sosial dan rehabilitasi hutan. Dalam operasionalnya, BPD LH menyediakan pembiayaan langsung maupun tidak langsung kepada debitur, bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan kualitas lingkungan berkelanjutan.

Dari sisi struktur organisasi, BPD LH memiliki beberapa divisi, antara lain Divisi Penghimpunan Dana, Divisi Investasi/Penyaluran, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi Monitoring & Evaluasi. Unit pembiayaan di BPD LH melakukan *due diligence* terhadap proposal proyek, pengelolaan dana bergulir, hingga skema *co-financing* dengan mitra internasional. Mekanisme operasional pembiayaan BPD LH umumnya melalui tahapan: pengajuan proposal oleh calon penerima, seleksi dan penilaian teknis/lingkungan, keputusan komite investasi, penandatanganan perjanjian pembiayaan, pencairan dana bertahap, dan pengawasan pasca-implementasi. BPD LH juga menerapkan standar *safeguard* lingkungan dan sosial dalam penilaian proyek, mengingat mandatnya di sektor hijau. Berikut adalah instrumen pembiayaan utama yang





dikelola BPD LH (mengacu Laporan Tahunan BPD LH 2023 dan regulasi terkait):

1) Hibah (Grants)

BPD LH dapat menyalurkan hibah program dari sumber dana donor atau APBN untuk kegiatan lingkungan. Contoh: Dana TERRA program hibah riset dan pengabdian masyarakat untuk energi terbarukan yang dikelola BPD LH, pada 2023 menyalurkan hibah kepada 7 lembaga perantara, 13 tim penelitian, dan 19 tim pengabdian masyarakat, mendorong 368 orang mengadopsi teknologi energi surya/biomassa. Contoh lain, Hibah *Sustainable Energy Fund* (SEF) hasil kerja sama dengan *Global Environment Facility*, yang memberikan insentif PLTS atap untuk memperpendek *payback period* investasi surya rumah tangga. Hibah ditujukan untuk proyek yang *non-revenue generating* atau komunitas, serta sebagai dana pendamping untuk meningkatkan kelayakan proyek.

2) Dana Bergulir (Revolving Fund)

Ini merupakan fasilitas pinjaman lunak dengan dana bergilir untuk proyek lingkungan. BPD LH mengelola dana bergilir kehutanan sejak integrasi DR. Penyaluran dana bergilir ditargetkan mencapai ribuan debitur UMKM setiap tahun. Tahun 2023, BPD LH menyalurkan dana bergilir kepada 3.257 debitur (melebihi target 3.200) dengan nilai Rp25,42 miliar. Dana bergilir cocok untuk proyek skala kecil-menengah yang menghasilkan *revenue*, misalnya usaha bioenergi skala UKM, PLTS atap komunal, biogas komunal, dsb, di mana pengembalian dana dilakukan dari hasil usaha. BPD LH menyediakan bunga rendah dan *grace period* yang berbeda dengan perbankan komersial dengan bunga tinggi untuk sektor EBT berisiko.

3) Blended Finance / Co-Financing

Skema pembiayaan campuran, menggabungkan dana publik (*concessional*) dengan dana komersial. BPD LH dapat bertindak sebagai *anchor* investor yang menaruh porsi modal risiko awal, sehingga menarik investor lain. Contoh, BPD LH bersama PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dapat menyusun *blended finance* untuk proyek PLTS, di mana BPD LH

memberikan pinjaman subordinasi atau *first loss guarantee*. Laporan BPD LH menyebut bahwa pembiayaan BPD LH sering berperan sebagai *co-financier* berpartner dengan lembaga internasional. Skema ini efektif menurunkan risiko finansial proyek EBT besar.

4) Pembiayaan Karbon (Carbon Financing)

BPD LH memiliki mandat mengelola mekanisme nilai ekonomi karbon. Salah satunya adalah melalui skema *Result-Based Payment* (RBP) untuk penurunan emisi. BPD LH ditunjuk mengelola dana RBP REDD+ dari GCF senilai USD103,8 juta (2023–2030) yang disalurkan ke 38 provinsi. Ke depan, konsep *carbon credit pre-financing* bisa diterapkan BPD LH, yaitu memberikan pendanaan di muka kepada proyek EBT yang akan menghasilkan kredit karbon, dengan pengembalian dana diambil dari hasil penjualan karbon di masa depan. Skema ini misalnya relevan untuk proyek PLTS yang terverifikasi menurunkan emisi. Saat ini BPD LH juga mengelola dana dari hasil penjualan karbon seperti FCPF (*Forest Carbon Partnership Facility*) World Bank sebesar USD110 juta, meski itu terkait kehutanan, tetapi dapat diperluas ke sektor energi, misalnya skema *Energy Transition Mechanism*.

Peran BPD LH untuk Lampung dengan kapasitas dan instrumen di atas, BPD LH dapat mendukung program EBT Lampung melalui: penyediaan dana bergilir bunga rendah bagi UKM energi (contoh: koperasi desa untuk PLTMH atau biogas); pemberian hibah teknis (TA) untuk studi kelayakan PLTS; bertindak sebagai investor pendamping dalam proyek besar (PLTP atau PLTS farm) sehingga meningkatkan *bankability*; serta menyalurkan dana donor khusus Lampung. BPD LH juga berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan proyek EBT Lampung dengan sumber pendanaan global, sekaligus memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Wamen KLHK Diaz Hendropriyono pada Agustus 2025 mengapresiasi BPD LH yang berhasil menyalurkan dana iklim luar negeri hingga level subnasional. Ini menjadi modal kepercayaan bagi Lampung untuk menggandeng BPD LH dalam mencapai target energi bersihnya.





3.5 KESESUAIAN INSTRUMEN BPD LH DENGAN PROYEK EBT LAMPUNG

Kebutuhan investasi EBT di Lampung sangat bervariasi, mulai dari proyek skala kecil komunitas hingga skala besar komersial. Oleh karena itu, penting untuk mencocokkan jenis instrumen pembiayaan dengan proyek EBT agar pendanaan tepat guna. Berdasarkan analisis, dapat disusun Matriks Kecocokan Proyek vs Instrumen (Tabel 3.2) yang menilai kecocokan tiap instrumen BPD LH terhadap kategori proyek EBT Lampung. Kriteria kecocokan meliputi kesesuaian dengan mandat BPD LH, skala pembiayaan, risiko proyek, potensi revenue, dan kesiapan proyek. Skor 1 berarti “kurang cocok”, sedangkan 5 berarti “sangat cocok”.

Tabel 3.2. Matriks Kecocokan Instrumen BPD LH vs Proyek EBT Lampung

Project	Hibah	Dana Bergulir	Blended Finance	Carbon Financing
PLTS Atap (Publik/UMKM)	4,9	4,62	3,89	3,89
Biomassa/ Biogas Industri	3,48	4,3	3,89	4,33
PLTMH Komunitas	4,74	4,62	3,89	3,89
PLTS Utility-scale	3,48	3,89	4,41	4,33
PLTP Ulubelu (Ekspansi)	3,48	3,89	4,41	4,33
Waste-to-Energy (PLTSa)	3,48	3,89	3,89	3,89

Sumber: RPJPD Lampung, RPMD Lampung, RUPTL, *Handbook Energi*, Laporan Tahunan BPD LH (diolah)

Tabel 3.2 di atas merupakan skema konseptual. Hasil analisis detail menunjukkan beberapa temuan: (a) Proyek skala besar seperti *geothermal* (PLTP Ulubelu ekspansi) dan PLTS *utility-scale* memerlukan modal awal tinggi, sehingga instrumen *blended finance* dan dukungan seperti *green sukuk* lebih sesuai. BPD LH tidak dapat sendiri membiayai proyek jumbo, tapi dapat menjadi *anchor* dalam konsorsium pendanaan. (b) Proyek skala kecil/komunitas seperti PLTS atap, PLTMH desa,

biogas komunal sangat cocok dibiayai melalui dana bergulir BPD LH serta disertai hibah pendamping untuk *technical assistance*. Skema pinjaman mikro dengan bunga rendah akan membantu komunitas memasang infrastruktur EBT dan mencicil dari penghematan energi. (c) Proyek skala menengah komersial (PLT Biomassa industri, PLTS 1-5 MW) dapat memanfaatkan kombinasi: pinjaman lunak BPD LH + pinjaman bank (*blended*), atau jaminan risiko dari BPD LH untuk menarik investor. (d) Untuk proyek EBT yang menghasilkan kredit karbon, misalkan PLTS *utility* mengurangi emisi signifikan, skema *carbon financing* bisa digunakan yaitu BPD LH dapat memberikan dana di muka, lalu proyek menyerahkan sebagian sertifikat karbon ke BPD LH untuk dijual. Ini memitigasi *revenue gap* proyek yang mengandalkan jual listrik ke PLN dengan tarif terbatas; pemasukan tambahan dari karbon akan meningkatkan kelayakan finansial.

Selain itu, analisis mengidentifikasi gap utama dalam *landscape* pembiayaan EBT Lampung, yaitu:

1. Gap Modal Awal

Proyek seperti PLTS utilitas memerlukan investasi kapital besar di awal, namun perbankan enggan memberi pinjaman penuh karena risiko tinggi dan jangka panjang *Power Purchase Agreement* (PPA). BPD LH dapat membantu menutup *equity gap* dengan menaruh dana sebagai *junior equity* atau *subordinated debt*. Misalnya, suatu proyek PLTS 10 MW butuh modal ekuitas 30%, BPD LH bisa penuhi sebagian ekuitas bersama pengembang, sisanya dibiayai bank komersial.

2. Gap Fasilitas Mikro

Proyek komunitas menghadapi kendala akses pembiayaan mikro dan pendampingan teknis. Saat ini program dana bergulir BPD LH belum menjangkau luas sektor EBT desa karena lebih fokus pada kehutanan. Diperlukan skema khusus, semacam “*Off-grid Energy Facility*” yang menggabungkan pinjaman mikro dengan hibah bantuan teknis.

3. Gap Jaminan Pendapatan





Bagi proyek EBT skala besar yang mengandalkan penjualan listrik ke PLN via PPA, ada risiko pasar seperti perubahan kebijakan tarif atau *oversupply*. Untuk mitigasi, instrumen seperti penjaminan pendapatan atau sekuritisasi PPA diperlukan. BPDH bisa bekerja sama dengan PT SMI atau ADB memberikan *partial risk guarantee* atas pembayaran PLN, sehingga investor lebih percaya.

4. Gap Kelembagaan Daerah

Kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung proyek EBT dalam hal perizinan dan fasilitasi masih terbatas. Dana BPDH bisa dialokasikan untuk peningkatan kapasitas bagi pemda dan BUMD energi daerah, agar proyek lebih siap.

Dari analisis di atas, implikasi praktik yang dapat ditarik: BPDH idealnya berperan sebagai *anchor investor* dalam skema *blended finance*, penyedia dana bergulir dan TA untuk proyek kecil, serta fasilitator pembiayaan karbon di muka bagi proyek yang layak karbon kredit. Sebagai contoh, Dana TERRA BPDH yang ada saat ini dapat difokuskan ke PLTS *off-grid* di desa. Sementara untuk ekspansi PLTP Ulubelu, BPDH bisa ikut serta dalam konsorsium *Energy Transition Mechanism* (ETM) sehingga PLTP mendapat pendanaan murah paska pengurangan PLTU.

3.6 OPSI PEMBIAYAAN TAMBAHAN

Di luar instrumen BPDH, Provinsi Lampung dapat mengoptimalkan berbagai opsi pembiayaan tambahan guna menutup gap pendanaan dan mempercepat investasi EBT. Opsi-opsi ini dapat bersinergi dengan skema BPDH, membentuk ekosistem pembiayaan hijau yang lebih kuat. Beberapa opsi utama tersebut antara lain:

1. Green Sukuk Nasional

Pemerintah Indonesia sejak 2018 aktif menerbitkan Green Sukuk, surat utang syariah hijau, di pasar global. Penerbitan perdana Maret 2018 mencapai US\$1,25 miliar tenor 5 tahun. Dana yang dihimpun dari Green Sukuk dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi hijau, dll. Lampung dapat mengusulkan proyek EBT-nya, misalkan untuk

PLTS skala utilitas dan PLTMH agar masuk *pipeline* pembiayaan Green Sukuk pemerintah. Dengan demikian, proyek tersebut dibiayai APBN hasil sukuk. Keuntungan: biaya dana rendah dan mengikat komitmen pemerintah mendukung proyek hingga selesai. Contoh, proyek PLTS di Lampung bisa dimasukkan dalam Green Sukuk Domestik melalui Kementerian Keuangan (DJPPR). Selain sukuk pemerintah, obligasi hijau daerah atau via PT SMI juga bisa dijajaki untuk pendanaan infrastruktur energi Lampung.

2. Energy Transition Mechanism (ETM) – ADB

ETM adalah inisiatif ADB untuk mempercepat pengurangan penggunaan PLTU dan mengalihkannya ke energi bersih. Indonesia bersama ADB meluncurkan ETM pada COP26 2021, dan kini skema pendanaan ETM sedang disiapkan termasuk dukungan *International Partners Group* (IPG) dalam kerangka *Just Energy Transition Partnership* (JETP) senilai US\$20 miliar. Dalam negeri, Pemerintah mengeluarkan Perpres 112/2022 dan PMK 103/2023 untuk fasilitas dukungan fiskal transisi energi. Lampung, meskipun tidak punya PLTU besar sendiri, bisa mendapat manfaat ETM secara tidak langsung, misal jaringan listrik Sumatera menjadi lebih terbuka bagi EBT setelah sejumlah PLTU tua dipensiunkan dengan dana ETM. Selain itu, dana ETM/JETP dapat digunakan untuk mendanai proyek EBT baru di daerah. Oleh karena itu, Pemprov Lampung harus proaktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar proyek-proyek EBT Lampung diusulkan mendapat pendanaan ETM (baik berupa hibah, pinjaman lunak, ataupun garansi). Misalnya, proyek ekspansi PLTP Ulubelu 2 x 55 MW bisa diajukan sebagai bagian dari transisi energi Sumatera, sehingga memperoleh pinjaman lunak ETM untuk konstruksinya.

3. Pendanaan ESG & SRI Funds

Tren investasi global mengarah pada *Environmental, Social, Governance* (ESG) *investing*. Banyak *fund manager* besar memiliki mandat *sustainable investment*. Contohnya, dana pensiun pemerintah Norwegia, beberapa *sovereign wealth funds*, serta





fund *Socially Responsible Investment* (SRI) di Singapura/Malaysia. Lampung dapat mencoba menarik pendanaan ESG ini melalui proyek-proyek yang memenuhi kriteria. Misal, proyek *farm* PLTS 50 MW dapat dibundel sebagai *green asset* dan diterbitkan *Sustainability Bond* di pasar modal regional. Ashurst (2023) mencatat bahwa akselerasi transisi Indonesia butuh keterlibatan swasta global dengan berbagai instrumen inovatif. Maka, Pemprov bisa mengusulkan pada BUMN atau PLN untuk menerbitkan *green bond* khusus Lampung dan daerah target lainnya. Begitu pula, skema *public-private partnership* (PPP) dengan fokus EBT harus diijazahi, misalnya pembangunan PLTS di lahan Pemda dengan investasi swasta, di mana Pemda memberi insentif lahan atau pembelian tenaga listrik jangka panjang.

4. Dana Pembangunan Internasional (DPI)

Berbagai lembaga pembangunan internasional memiliki portofolio pendanaan EBT di Indonesia. JICA (Jepang) dan KOICA (Korea) mendanai proyek-proyek energi melalui pinjaman ODA lunak; UNDP mendukung melalui hibah teknis; USAID dengan program SUSTAINABLE, dan GIZ Jerman. Provinsi Lampung harus aktif mengajukan proposal atau menjadi pilot *project* dalam program-program tersebut. Sebagai contoh, Lampung bisa diusulkan sebagai provinsi percontohan untuk program energi bersih UNDP 2025–2029, mengingat potensi EBT dan dukungan kajian fiskal ini. Juga, *Green Climate Fund* (GCF) selain mendanai REDD+ bisa dialihkan sebagian ke energi terbarukan, misal program Elektrifikasi Terbarukan Daerah. BPD LH berperan di sini karena sebagian besar dana internasional akan disalurkan via BPD LH. Pada 2025, BPD LH telah menyalurkan Rp261 miliar dana GCF untuk program REDD+ ke 15 provinsi; ke depan bukan tidak mungkin ada RBP untuk energi.

5. Mekanisme Pasar Karbon & Nilai Ekonomi Karbon

Perpres 98/2021 membuka jalan perdagangan karbon di Indonesia. Proyek EBT Lampung yang mengurangi emisi bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon, baik di

pasar domestik melalui Sistem Registri Nasional (SRN) maupun internasional (*Voluntary Carbon Market*). Nilai karbon saat ini berkisar \$5-10/ton CO₂, sehingga misal PLTS 10 MW yang mengurangi kurang lebih 15 ribu ton CO₂ per tahun, bisa dapat \$75 ribu per tahun dari karbon. Ini memang kecil relatif terhadap *revenue* listriknya, tapi jika diakumulasi bisa membantu *project internal rate of return* (IRR). Pemprov Lampung sebaiknya mendorong proyek-proyek EBT untuk mendaftar dalam SRN Kementerian LHK agar terdata emisi yang dihindarkan, sehingga bisa ikut perdagangan. BPD LH sendiri dapat memfasilitasi melalui *Carbon Fund* dimana BPD LH membeli kredit karbon dari proyek Lampung di muka. Mekanisme ini sedang disiapkan di tingkat nasional.

Tabel 3.3. Matriks Kecocokan Instrumen Tambahan vs Proyek EBT Lampung

Project	Green Sukuk	ETM	ESG Fund	DPI	Carbon Trading
PLTS Atap (Publik/UMKM)	3,89	3,89	3,89	4,39	3,89
Biomassa/Biogas Industri	3,89	3,89	4,39	3,89	3,99
PLTMH Komunitas	3,89	3,89	3,89	4,39	3,89
PLTS Utility-scale	4,51	3,89	4,39	3,89	3,89
PLTP Ulubelu (Ekspansi)	4,51	4,51	3,89	3,89	3,99
Waste-to-Energy (PLTSa)	3,89	3,89	3,89	3,89	3,89

Sumber: RPIPD Lampung, RPMD Lampung, RUPTL, *Handbook Energi*, Laporan Tahunan BPD LH (diolah)

Semua opsi pembiayaan tambahan di atas dapat bersinergi dengan BPD LH. Misalnya: BPD LH memberi dana pendamping, sementara porsi besar pinjaman didapat dari Green Sukuk atau JICA. Atau BPD LH menjamin sebagian risiko untuk investasi swasta di Lampung. Dengan memanfaatkan kombinasi berbagai sumber, biaya modal total dapat





diturunkan dan *leverage* sektor swasta meningkat. Hal ini penting karena menurut *Climate Policy Initiative* (2024), investasi energi bersih di Indonesia masih jauh dari kebutuhan – rata-rata hanya USD2,2 miliar/tahun untuk *renewable*, padahal dibutuhkan USD9,1 miliar/tahun, Artinya ada *investment gap* USD6,9 miliar per tahun di sektor *renewable* nasional. Kolaborasi multi-sumber (BLU, APBN, swasta, donor) mutlak diperlukan untuk menjembatani gap ini.

3.7 ANALISIS RISIKO DAN MITIGASI

Pengembangan EBT di Lampung tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi. Kombinasi strategi mitigasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholders terhadap inisiatif EBT Lampung. Dengan risiko yang terkelola, proyek-proyek EBT lebih *bankable* dan akses pendanaan pun menjadi lebih mudah. Berikut adalah beberapa risiko utama beserta strategi mitigasinya:

3.7.1 Risiko Finansial

Termasuk risiko kegagalan finansial dimana proyek tidak mencapai *financial close* atau *default* saat operasional. Penyebabnya antara lain biaya investasi melebihi estimasi, biaya produksi listrik EBT per kWh yang masih lebih tinggi dari tarif PLN, atau perubahan ekonomi makro. Mitigasi: penerapan struktur pembiayaan *tranching* (alokasi risiko ke investor berbeda, seperti *first loss* ditanggung investor publik), jaminan pendapatan minimum, serta mekanisme *escrow account* untuk memastikan aliran kas proyek digunakan sesuai prioritas. Peran BPD LH di sini dapat memberikan *partial credit guarantee* untuk proyek EBT layak, meningkatkan rating kredit proyek sehingga lebih mudah dapat pinjaman bank. Selain itu, fasilitas *viability gap fund* bisa diupayakan dan APBN menutup kekurangannya.

3.7.2 Risiko Teknis & Operasional

EBT seperti surya bersifat intermiten; PLTP butuh teknologi pengeboran; PLT biomassa perlu pasokan bahan baku stabil. Risiko teknis lainnya: potensi gangguan jaringan karena variabilitas PLTS,

keterbatasan kemampuan operasi dan *maintenance* lokal, serta risiko *under-performance* karena faktor kapasitas tak tercapai. Mitigasinya ialah pada sisi jaringan, investasi *energy storage (battery)* dan penguatan jaringan (*grid reinforcement*) diperlukan seiring peningkatan PLTS. BPD LH dapat mendanai pilot proyek *battery storage* misalnya. Untuk mengurangi risiko operasional, sertakan komponen *technical assistance* (TA) dalam pendanaan – misal melatih operator PLTMH desa, atau mewajibkan kontraktor memberikan garansi kinerja dan klausul *performance bond*. Penggunaan teknologi yang sudah terbukti lebih diutamakan, serta melibatkan mitra teknis berpengalaman. Diversifikasi portofolio juga membantu menyeimbangkan risiko teknis secara keseluruhan.

3.7.3 Risiko Kebijakan dan Regulasi

Mencakup perubahan kebijakan yang merugikan proyek EBT, misalnya revisi tarif listrik EBT, perubahan insentif, atau hambatan perizinan. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan Perpres 112/2022 yang melarang pembangunan PLTU baru dan mendukung EBT, implementasi aturan turunan kadang lambat. Mitigasi yang dapat dilakukan dengan mengadvokasi sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, di mana Pemprov Lampung menjabarkan target EBT nasional ke dokumen daerah (RPJMD, RAD EBT). Dengan begitu, proyek EBT menjadi bagian dari program prioritas daerah dan proses perizinan dipercepat. Selain itu, perlu kepastian regulasi PPA, misalkan kontrak PPA dibuat dengan jangka panjang dan klausul perlindungan jika kebijakan tarif berubah. Koordinasi antara Pemda Lampung, PLN, dan Kementerian ESDM penting agar *pipeline* proyek EBT Lampung mendapat dukungan regulasi.

3.7.4 Risiko Sosial

Setiap proyek infrastruktur punya aspek sosial. Untuk EBT, potensi isu sosial misalnya: penolakan masyarakat terkait lahan, kekhawatiran lingkungan, atau konflik pemanfaatan lahan. Mitigasinya sejak awal harus dilakukan proses konsultasi publik dan sosialisasi manfaat proyek. BPD LH sebagai institusi





pemerintah bisa memfasilitasi komunikasi antara investor swasta dengan masyarakat lokal. Selain itu, memastikan proyek memenuhi persyaratan AMDAL ketat dan ada rencana *benefit sharing* dengan warga. Dalam penyaluran dana, BPD LH dapat mensyaratkan standar ESG dan *safeguard* sosial. Dengan demikian, dampak sosial negatif diminimalkan dan dukungan publik meningkat.

3.7.5 Risiko Kelembagaan dan Tata Kelola

Ini berkaitan dengan kapasitas institusi pengelola proyek dan transparansi. Misal, Pemda atau BUMD Lampung mungkin belum berpengalaman mengelola proyek EBT besar, sehingga rawan terjadi keterlambatan atau masalah manajemen. Dari sisi BPD LH sendiri, tantangan tata kelola adalah memastikan penyaluran dana efektif dan akuntabel. Mitigasinya ialah melalui peningkatan kapasitas bagi tim proyek di daerah, menggandeng konsultan teknis berpengalaman mendampingi BUMD. BPD LH dapat memberikan pendampingan manajemen proyek, selain pendanaan. Untuk tata kelola, penerapan transparansi pelaporan dan monev wajib dilakukan. Indikator kinerja hijau perlu ditetapkan dan dievaluasi rutin. Ini juga melindungi reputasi BPD LH agar tidak tercoreng jika ada proyek gagal. Memitigasi risiko reputasi penting karena BPD LH mengelola dana publik; satu kegagalan besar bisa mengurangi kepercayaan *stakeholder*. Oleh karena itu, *good governance* seperti audit independen, publikasi laporan berkala, dan melibatkan unsur pengawas akan memastikan dana digunakan tepat sasaran.

3.8 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Provinsi Lampung memiliki potensi EBT yang cukup besar dan beragam, mulai dari panas bumi, tenaga surya, biomassa, hingga hidro dan mikrohidro. Potensi ini jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadikan Lampung sebagai salah satu pusat energi bersih di Sumatera, sekaligus mendukung pencapaian target bauran energi nasional 31% pada 2050 dan visi Lampung 2045 yang berkelanjutan. Namun demikian, pemanfaatan aktual masih

terbatas, dengan kapasitas terpasang relatif kecil dibandingkan potensi teknis yang tersedia, sehingga terdapat gap signifikan antara peluang dan realisasi.

Hambatan utama pengembangan EBT Lampung terletak pada aspek pendanaan. Proyek EBT umumnya membutuhkan investasi awal besar, dengan risiko tinggi dan *long-term return*. Kondisi ini membuat perbankan komersial cenderung berhati-hati. Dalam konteks ini, peran BPD LH menjadi sangat strategis. Melalui instrumen seperti hibah, dana bergulir, *blended finance*, dan pembiayaan karbon, BPD LH dapat menjadi katalis pembiayaan yang menutup gap investasi, khususnya untuk proyek skala kecil dan menengah, sekaligus meningkatkan *bankability* proyek skala besar.

Untuk mendorong percepatan transisi energi, dibutuhkan sinergi erat antara Pemprov Lampung, BPD LH, pemerintah pusat, dan sektor swasta. Pemprov perlu menempatkan program EBT sebagai prioritas, sementara BPD LH dapat memfasilitasi akses ke pendanaan internasional serta memperkuat skema pembiayaan inovatif di tingkat lokal. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang tepat, tata kelola yang transparan, serta strategi mitigasi risiko yang matang, Lampung berpotensi menjadikan potensi EBT sebagai motor pembangunan ekonomi hijau, meningkatkan ketahanan energi, dan memberi kontribusi nyata terhadap target dekarbonisasi nasional.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait strategi pengembangan koperasi di regional Lampung adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Sinergi BPD LH dan Pemda

Tetapkan kerangka kerja sama resmi, mungkin melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), agar BPD LH dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pendanaan proyek hijau di Lampung. Bentuk forum rutin koordinasi untuk evaluasi progres.

2) Optimalisasi Dana Bergulir dan Hibah

Dorong OPD terkait di Lampung untuk memanfaatkan skema BPD LH. Misal, Dinas UMKM bekerja sama ajukan program kredit bergulir energi bagi pelaku usaha kecil. Atau





Dinas ESDM dan Dinas PMPTSP mengajukan proposal *pilot project* PLTS desa untuk dapat hibah TERRA. Perlu target, misal setiap tahun ada minimal sekian miliar dana BPD LH terserap untuk Lampung.

3) Integrasi Program EBT dalam Dokumen Pembangunan Daerah

Pastikan program EBT masuk dalam RKPD tahunan dan penganggaran APBD (sinergi APBN-APBD). Sebagai contoh, APBD bisa mengalokasikan dana pendamping untuk proyek yang dibiayai BPD LH, agar lebih *feasible*. Juga sinkronkan dengan RPJMD yang sedang disusun ulang hingga 2029 dengan memasukkan agenda transisi energi sebagai salah satu prioritas daerah. Hal ini juga memudahkan penilaian kinerja kepala daerah di masa mendatang.

4) Insentif Fiskal Daerah

Berikan insentif konkrit di level daerah untuk mendorong investasi. Misal, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan yang dipakai proyek EBT strategis; pengurangan pajak reklame jika memasang PLTS atap di *billboard*; atau skema Pemda menanggung sebagian bunga pinjaman bank untuk proyek EBT hingga proyek berjalan. Insentif inovatif lainnya seperti *feed-in tariff*

tambahan dari APBD untuk PLTS desa bisa diijazahi dalam kerangka peraturan daerah.

5) Pengembangan Green Finance Regional

Lampung bisa menjadi provinsi pertama yang punya *Roadmap* Keuangan Hijau Daerah. Bekerja sama dengan OJK dan Kemenkeu, Lampung merumuskan peta jalan 5-10 tahun untuk mengarahkan belanja publik dan investasi swasta ke sektor hijau. Misal, target semua bank daerah (Bank Lampung) menyalurkan minimal 10% kredit ke sektor EBT/EF (*energy efficiency*) di 2030. Atau membentuk forum investor hijau Lampung mengundang perusahaan perkebunan, industri, perbankan setempat untuk turut investasi di EBT.

6) Monitoring & Evaluation berbasis Green KPI

Seperti disinggung, perlu ada ukuran keberhasilan. Rekomendasinya, susun indikator kinerja hijau misal: kapasitas EBT terpasang (MW), penurunan emisi (ton CO₂), jumlah rumah terpasang PLTS atap, jumlah tenaga kerja di sektor EBT, dll. Laporkan indikator ini tiap triwulan dalam KFR atau laporan ekonomi daerah. Evaluasi berkala akan menunjukkan apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu ditingkatkan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan secara adaptif.



BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

“Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu mencintai negeri kita ini”

-Sri Mulyani Indrawati-



BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Outlook Makroekonomi Regional Lampung

- 1) Secara *year-on-year*, kinerja ekonomi Lampung triwulan II 2025 tumbuh solid sebesar 5,09% (yoy) yang merupakan capaian tertinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian ini juga lebih tinggi dari Sumatera (4,96%), meskipun sedikit di bawah capaian nasional (5,12%). Capaian ini membuat Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tahunan tertinggi ketiga di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan industri pengolahan (9,97%) yang ditopang oleh aktivitas industri makanan dan minuman yang tetap stabil dan meningkat seiring tingginya permintaan, khususnya dari pasar domestik, kemudian disusul jasa lainnya (9,18%) serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,20%). Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 7,5% (yoy) seiring dengan peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas utama seperti CPO dan Kopi serta rempah-rempah, diikuti pengeluaran impor yang tumbuh 6,73% (yoy).
- 2) Secara *quarter-to-quarter*, ekonomi Lampung triwulan II 2025 tumbuh 9,33%, *rebound* dibanding kontraksi 1,11% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini melampaui Sumatera (3,7%) dan nasional (4,04), serta menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di nasional setelah Papua Tengah (14,15%). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang meningkat 29,26% (yoy) berkat naiknya produksi dan harga tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan.
- 3) Pada Triwulan II 2025, PDRB Lampung tercatat sebesar Rp134,40 triliun (ADHB) dan Rp76,06 triliun (ADHK), meningkat signifikan dari Rp59,15 triliun pada triwulan I 2021. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil

yang ditopang oleh peningkatan volume output, bukan sekadar faktor harga, sehingga mencerminkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan lapangan usaha, struktur PDRB masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 28,51%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dengan porsi 62,41% terhadap total PDRB ADHB.

- 4) Inflasi di Provinsi Lampung menunjukkan tren kenaikan. Pada Juni 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 1,87% (yoy). Rata-rata inflasi bulanan triwulan II 2025 tercatat 0,22% (*mtm*). Inflasi di Lampung, sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, bersifat musiman dan cenderung meningkat pada periode tertentu seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, Tahun Baru, dan awal tahun ajaran baru khususnya pada kelompok makanan dan pendidikan. Setelah Idulfitri, inflasi bulanan biasanya melandai seiring normalisasi konsumsi masyarakat.
- 5) Selama Januari 2022 hingga Juni 2025, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mengalami tren depresiasi, dari Rp14.335,24 menjadi Rp16.310,56. Pelemahan ini mendorong daya saing ekspor, namun juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, terutama terkait pembiayaan impor dan fluktuasi biaya produksi.
- 6) Perkembangan ketidakpastian global pada 2025 menghadirkan tekanan yang signifikan bagi perekonomian Lampung, terutama melalui kebijakan tarif resiprok AS sebesar 19% terhadap komoditas unggulan seperti CPO, kopi, teh, dan olahan nanas. Meskipun lebih rendah dari ancaman awal 32%, tarif ini tetap memiliki potensi melemahkan daya saing produk Lampung, yang berisiko menurunkan





kinerja ekspor dan basis penerimaan fiskal. Kondisi ini semakin kompleks dengan kontraksi ekspor batu bara melalui pelabuhan Lampung akibat penurunan permintaan Tiongkok dan India akibat peningkatan produksi domestiknya dan peralihan ke energi baru terbarukan, sehingga mengurangi potensi Bea Keluar, pendapatan sektor logistik, serta basis pajak dari perusahaan terkait.

- 7) Di tengah tarif AS terdapat peluang ekspor bagi Lampung, salah satunya dari kebijakan tarif tinggi AS terhadap Brasil (50%) dan Vietnam (20%) yang berpotensi mengganggu dominasi kedua negara tersebut di pasar kopi global. Di sisi lain, pada paruh pertama 2025, tren positif harga CPO global dan sentimen *front loading* impor bahan baku industri AS sebelum tarif berlaku berujung pada peningkatan ekspor CPO Lampung, khususnya sebagai bahan baku industri AS pada sektor pangan, kosmetik, deterjen, dan biofuel. Meski begitu, keterbatasan produktivitas hulu dan pascapanen komoditas kopi serta tekanan global pada energi fosil menuntut intervensi kebijakan yang lebih terarah.
- 8) Tingkat kemiskinan Lampung per Maret 2025 mencapai 10,00%, masih di atas rata-rata Sumatera (8,05%) dan nasional (8,47%). Meski demikian, tren penurunan selama lima tahun terakhir menunjukkan efektivitas upaya peningkatan akses kerja dan program pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Tantangan masih terlihat di perdesaan, yang membutuhkan pendekatan kebijakan lebih tepat sasaran salah satunya dengan optimalisasi penggunaan Dana Desa. Rasio Gini Lampung menunjukkan tren menurun, dengan nilai 0,292 per Maret 2025, lebih baik dibandingkan rata-rata Sumatera (0,309) dan nasional (0,375). Capaian ini mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan dan efektivitas kebijakan pemerataan ekonomi.

- 9) Pada Triwulan II 2025, NTP Lampung mencapai 130,57 atau naik 6,54% (yoy), lebih tinggi dari nasional (121,98) namun masih di bawah rata-rata Sumatera (146,46). Dukungan terhadap sektor pertanian di Lampung diarahkan untuk memperkuat NTP dan mewujudkan Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Fokus utama mencakup integrasi pertanian dengan industri pengolahan, penguatan akses pasar, serta efisiensi rantai pasok agar produk pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
- 10) Berbagai langkah strategis dilakukan, mulai dari efisiensi distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, hingga pengembangan bibit unggul padi tahan hama.
- 11) Pada triwulan II 2025, Nilai Tukar Nelayan (NTN) atau NTP subsektor perikanan tangkap di Lampung rata-rata tercatat sebesar 112,98, berada di atas rata-rata NTN nasional (103,35) dan regional Sumatera (107,08). Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan strategis yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Langkah konkret meliputi pembangunan empat SPBN di berbagai lokasi. Selain itu, program Asuransi Nelayan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melindungi nelayan dari risiko kerja, sementara akses pembiayaan melalui KUR memperkuat kapasitas usaha. Kombinasi infrastruktur, perlindungan sosial, dan permodalan ini membangun ekosistem perikanan yang tangguh dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan.

4.1.2 Kinerja Fiskal Regional Lampung

4.1.2.1 Kinerja APBN

- 1) Kinerja APBN Lampung hingga Triwulan II 2025 menunjukkan peran fiskal yang solid dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, dengan pendapatan yang sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan belanja negara yang diarahkan pada prioritas pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, serta perlindungan sosial. APBN 2025 yang sehat terus





dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* dan *shock absorber* untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, serta mendukung program prioritas Asta Cita bagi pemerataan kesejahteraan.

- 2) Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp5.083,69 miliar, tercapai 45,71% dari target dan berhasil tumbuh signifikan 21,34% (yoy). Hal ini didorong pertumbuhan kinerja Penerimaan Perpajakan (24,55%, yoy) yang mengalami pertumbuhan pada Pajak Perdagangan Internasional (180,80%, yoy) khususnya komponen Bea Keluar. Hal ini didukung oleh peningkatan ekspor pada komoditas utama yang mengalami kenaikan harga global. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan 5,02% (yoy) didorong pertumbuhan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
- 3) Realisasi Belanja Negara hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp14.839,06 miliar, tercapai 46,20% dari pagu, tumbuh negatif sebesar 8,45% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang berdampak pada kontraksi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 24,16% (yoy) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar 2,01% (yoy). Realisasi BPP terutama didukung oleh percepatan Belanja Pegawai dan Belanja Sosial, sementara TKD didorong oleh percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- 4) Defisit anggaran regional Lampung hingga 30 Juni 2025 tercatat sebesar Rp9.755,36 miliar, menyempit sebesar 18,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan defisit ini mencerminkan kinerja positif penerimaan serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Defisit menggambarkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang menjaga kesinambungan program prioritas di tengah dinamika penerimaan dan belanja, serta sebagai *shock absorber* yang memastikan daya beli

masyarakat tetap terjaga meskipun terjadi tekanan global maupun domestik.

- 5) Hingga 30 Juni 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung mencapai Rp4.987,27 miliar kepada 92.350 debitur, tumbuh 0,15% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan dan dukungan aktif perbankan dalam pembiayaan UMKM. Selain itu, terdapat pembiayaan UMi yang turut memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang masih berskala ultra mikro (*non-bankable*). Realisasi sampai triwulan II 2025 mencapai Rp201,29 miliar kepada 34.681 debitur. Capaian ini menunjukkan bahwa keberadaan kredit bersubsidi pemerintah berkontribusi nyata dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian Lampung.

4.1.2.2 Kinerja APBD

- 1) Pendapatan Daerah Regional Lampung hingga Triwulan II 2025 tercatat Rp12.520,86 miliar atau 39,54% dari target, mengalami kontraksi 3,97% (yoy). Penurunan terutama dipengaruhi oleh melemahnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (-5,78% yoy) dan penurunan tajam Transfer Antar Daerah (-77,89% yoy). Meski demikian, kinerja positif ditunjukkan oleh PAD yang tumbuh 19,37 % (yoy) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang melonjak 285,97% (yoy), mencerminkan pergeseran struktur penerimaan yang memperkuat kapasitas fiskal daerah.
- 2) Realisasi PAD mencapai Rp3.040,21 miliar atau 39,36% dari target, tumbuh 19,37% (yoy). Pertumbuhan tertinggi dicatat pada Retribusi Daerah (54,00% yoy) dan Lain-Lain PAD yang Sah (170,56 % yoy), sementara Pajak Daerah hanya naik 4,51% (yoy) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan justru berkontraksi 43,62% (yoy). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan meningkat menjadi 24,28% (dari 19,53% pada 2024), namun *Local*





Tax Ratio masih rendah di level 0,98%, jauh di bawah ambang ideal 3%. Hal ini menegaskan potensi fiskal, khususnya dari sektor pertanian yang berkontribusi 26,55% PDRB, belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

- 3) Ketergantungan pada Transfer Pusat tetap tinggi, di mana kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 74,43% dari total pendapatan, meski menurun dibandingkan 75,85% tahun sebelumnya. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) naik signifikan dari 0,20 pada 2024 menjadi 0,24 pada 2025, masuk dalam kategori Belum Mandiri. Meski demikian, rasio ketergantungan fiskal masih 0,74 sehingga penguatan basis penerimaan dari sektor produktif seperti industri pengolahan perlu menjadi prioritas.
- 4) Realisasi Belanja Daerah hingga Triwulan II 2025 mencapai Rp10.631,04 miliar atau 33,50% dari pagu, mengalami kontraksi 2,74% (*yoy*). Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp8.276,79 miliar (77,85% dari total), di mana Belanja Pegawai menyerap 51,32% dari total belanja daerah—jauh di atas batas maksimal 30% yang ditetapkan dalam UU HKPD. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengelolaan secara bertahap untuk menurunkan proporsi belanja pegawai tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa mencatat pertumbuhan 9,04% (*yoy*), sementara Belanja Hibah mengalami kontraksi tajam 63,39% (*yoy*) akibat tidak lagi dialokasikannya anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada.
- 5) Belanja Modal tercatat Rp774,51 miliar atau 21,79% dari pagu, naik 13,26% (*yoy*). Komponen utama adalah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tumbuh 22,85% (*yoy*) dan menyumbang 70,35% dari total belanja modal. Sebaliknya, Belanja Modal Tanah, Gedung, dan Peralatan mengalami kontraksi dalam. Realisasi Belanja Transfer juga menurun drastis (-22,81% *yoy*), terutama pada Transfer Bagi Hasil (-82,92% *yoy*), sebagai dampak implementasi opsen pajak.

- 6) Belanja tertinggi berdasarkan fungsi adalah pada Pelayanan Umum sebesar Rp3.674,98 miliar atau 34,57% dari total realisasi, diikuti Pendidikan Rp3.044,89 miliar (28,64%). Porsi ini menegaskan prioritas alokasi untuk administrasi pemerintahan dan pemenuhan *mandatory spending* sektor pendidikan.
- 7) Rasio belanja daerah terhadap PDRB menurun dari 4,62% pada Triwulan II-2024 menjadi 4,15% pada Triwulan II 2025, seiring dengan kontraksi realisasi belanja daerah. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terhadap PDRB ADHB juga tercatat turun dari 5,91% menjadi 5,47%, meskipun secara nominal meningkat tipis dari Rp13.983,00 miliar menjadi Rp14.017,54 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh sektor non-pemerintah, sehingga efektivitas belanja publik, terutama belanja produktif yang memiliki *multiplier effect* tinggi, perlu terus diperkuat guna menjaga peran fiskal terhadap perekonomian.
- 8) Keseimbangan fiskal pada Triwulan II 2025 mencatat surplus Rp1.889,82 miliar, turun 10,39% (*yoy*), dengan rasio surplus terhadap pendapatan, belanja, dan PDRB masing-masing melemah. Keseimbangan primer tetap positif Rp1.901,41 miliar (lebih rendah dari Rp2.122,90 miliar pada 2024), menandakan *fiscal stance* yang kontraktif dengan ruang *buffer* yang kian terbatas. Sementara itu, pembiayaan netto Rp56,02 miliar turun 50,23% (*yoy*), dipengaruhi turunnya penggunaan SiLPA tahun anggaran yang lalu, naiknya penyertaan modal BUMD (72,93%), serta meningkatnya pembayaran pokok pinjaman (2,83% *yoy*). Struktur ini mencerminkan strategi pembiayaan yang lebih diarahkan pada konsolidasi fiskal dan penguatan kapasitas pembangunan daerah.

4.1.3 Progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- 1) Hingga 30 Juni 2025, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menunjukkan capaian yang cukup





signifikan, meskipun masih perlu perluasan ke beberapa wilayah. Program ini telah hadir di 13 kabupaten/kota, kecuali Lampung Barat dan Pesisir Barat, dengan dukungan 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru mencapai 4% dari target 957 unit. Sampai pertengahan 2025, sebanyak 371.814 penerima manfaat atau sekitar 18% dari total target 2.021.981 orang telah dilayani melalui 3.079 kelompok penerima, dengan keterlibatan 293 supplier.

- 2) Berdasarkan hasil analisis awal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung menunjukkan dampak yang beragam terhadap sektor-sektor utama. Pada subsektor pertanian dan peternakan, hubungan yang terdeteksi signifikan justru cenderung negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi MBG beriringan dengan penurunan nilai tukar produsen. Hal ini dapat dijelaskan oleh faktor musiman seperti panen gabah, lonjakan konsumsi pada Idulfitri, dan kebutuhan hewan kurban saat Iduladha, yang membuat keseimbangan harga tidak sepenuhnya mendukung posisi petani maupun peternak. Sebaliknya, di sektor perikanan dampaknya relatif lemah, sementara pada inflasi umum tidak terlihat pengaruh berarti, meski terdapat sensitivitas pada komoditas tertentu seperti beras dan minyak goreng. Dengan kata lain, MBG lebih berperan sebagai pendorong permintaan konsumsi dibanding penguat posisi produsen dalam jangka pendek.
- 3) Dari sisi kebijakan, temuan menegaskan bahwa ekspektasi dampak MBG terhadap perekonomian tidak cukup hanya dengan memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memerlukan integrasi yang lebih erat dengan rantai pasok lokal. Tanpa mekanisme yang menghubungkan kebutuhan konsumsi program dengan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, manfaat ekonomi daerah akan terbatas, bahkan berpotensi menekan nilai tukar produsen. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu menekankan pada kemitraan dengan koperasi, kelompok

tani, dan pelaku perikanan, disertai dukungan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Dengan pendekatan tersebut, MBG dapat berfungsi ganda: meningkatkan gizi masyarakat penerima manfaat sekaligus memperkuat kesejahteraan produsen lokal serta menjaga stabilitas harga di tingkat daerah.

- 4) Simpulan awal terhadap isu-isu strategis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat serta memberikan stimulus bagi perekonomian lokal, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan fundamental. Permasalahan yang muncul antara lain cakupan kebijakan yang terlalu luas, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, hingga hambatan operasional dan logistik. Selain itu, ketidakmerataan akses terutama di wilayah 3T serta keterbatasan dalam pemenuhan standar gizi yang beragam mengindikasikan perlunya penguatan strategi pelaksanaan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Di sisi lain, terdapat risiko yang harus dikelola dengan hati-hati, seperti kecenderungan penggunaan bahan pangan olahan secara berlebihan, keterbatasan rantai pasok lokal, serta tekanan terhadap keberlanjutan fiskal.

4.1.4 Analisis Ketahanan Energi: Potensi Kerja Sama Pembiayaan BPD LH Untuk Mendukung EBT Di Lampung

- 1) Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat beragam, mencakup panas bumi, tenaga surya, biomassa, serta hidro dan mikrohidro. Potensi besar ini, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat menempatkan Lampung sebagai pusat energi bersih di Sumatera dan mendukung pencapaian bauran energi nasional 31% pada 2050 serta visi pembangunan berkelanjutan Lampung 2045.
- 2) Namun demikian, pemanfaatan aktual masih terbatas, dengan kapasitas terpasang yang relatif kecil dibandingkan dengan potensi teknis yang tersedia, sehingga menimbulkan





kesenjangan yang cukup signifikan antara peluang dan realisasi pengembangan EBT.

- 3) Hambatan utama terletak pada aspek pembiayaan, karena proyek EBT memerlukan investasi awal yang besar, risiko yang tinggi, serta pengembalian jangka panjang yang membuat sektor perbankan konvensional cenderung berhati-hati. Dalam konteks ini, peran BPD LH menjadi strategis melalui instrumen seperti hibah, dana bergulir, blended finance, dan pembiayaan karbon yang dapat berfungsi sebagai katalis untuk menutup gap pendanaan.
- 4) Dukungan ini tidak hanya memperkuat kelayakan finansial proyek berskala kecil dan menengah, tetapi juga meningkatkan bankability proyek berskala besar. Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, BPD LH, pemerintah pusat, dan sektor swasta, serta didukung kebijakan fiskal adaptif dan tata kelola transparan, Lampung berpotensi menjadikan EBT sebagai motor pembangunan ekonomi hijau, penguatan ketahanan energi, dan kontribusi nyata terhadap agenda dekarbonisasi nasional.

4.2 REKOMENDASI

4.2.1 Rekomendasi terkait Makroekonomi dan Fiskal

- 1) Untuk memitigasi risiko dampak penerapan Tarif AS sebesar 19% terhadap Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Perdagangan Luar Negeri, serta Pemerintah Daerah Lampung perlu secara aktif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan tarif AS yang lebih tinggi, misalnya Brasil dan Vietnam. Upaya ini menjadi penting bagi komoditas unggulan ekspor Lampung seperti crude palm oil (CPO) dan turunannya, kopi, teh, kakao, serta olahan nanas. Strategi yang dapat ditempuh meliputi fasilitasi perjanjian dagang, promosi produk unggulan daerah, serta penguatan diplomasi ekonomi.
- 2) Untuk mitigasi penurunan Bea Keluar akibat melemahnya permintaan global terhadap batubara, Kementerian ESDM dan DJBC agar memperbaharui aturan pengenaan Bea Keluar bagi komoditas batu bara, dengan mitigasi risiko berupa selective adjustment saat harga batubara acuan menyentuh level tertentu.
- 3) Memitigasi penurunan Bea Impor akibat pembatasan impor jagung pakan ternak serta beras dan gula konsumsi, DJBC bersama dengan Badan Pangan Nasional dapat mengkaji kembali alternatif lain dari pembatasan yaitu melalui penerapan skema tarif terhadap komoditas strategis tersebut, dengan tetap memprioritaskan stabilitas harga dan menjaga perlindungan bagi petani.
- 4) Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi Pajak Asli Daerah (PAD) perlu diawali dengan peningkatan kualitas layanan dan pengendalian kebocoran penerimaan sebelum penyesuaian tarif. Publik cenderung menolak kenaikan mendadak, namun menerima inovasi digital yang meningkatkan transparansi dan standar pelayanan minimum yang terpenuhi dengan baik.
- 5) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dapat melakukan analisis *stress test* terhadap penerimaan bea masuk dan bea keluar yang terkait dengan kebijakan pembatasan impor beras dan gula. Pengujian ini dapat mencakup berbagai skenario, termasuk penurunan harga beras global, perubahan volume impor, dan dampak kebijakan perdagangan lainnya, guna memastikan kesiapan fiskal dan kebijakan mitigasi yang efektif secara regional.
- 6) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang terdiri dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung, OJK Lampung, Pemerintah Daerah, serta lembaga perbankan perlu terus mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis klaster dan pembiayaan Kredit Usaha Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Kedua skema pembiayaan ini diharapkan tidak hanya memperluas akses permodalan bagi petani dan





pelaku perkebunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, serta mempercepat transformasi sektor pertanian Lampung dari pola tradisional menuju sistem mekanisasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pasar.

- 7) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan strategis di Lampung melalui penerapan strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan stok yang memadai, memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat, menjamin kelancaran distribusi antarwilayah, serta meningkatkan komunikasi publik yang transparan dan efektif guna mengendalikan ekspektasi inflasi.
- 8) Tim Percepatan Pengelolaan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank Indonesia, DJPK, Kanwil DJPb Lampung, serta Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung perlu memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah dalam optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya pajak dan retribusi, melalui perluasan kanal pembayaran digital, pemutakhiran dan validasi basis data perpajakan, serta integrasi sistem transaksi keuangan daerah secara elektronik agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
- 9) Forum Investasi Lampung (FOILA) perlu diperkuat sebagai platform strategis yang mampu menyatukan fungsi promosi investasi, fasilitasi implementasi proyek prioritas, sekaligus penyelesaian hambatan investasi di daerah. Penguatan peran FOILA dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif pelaku usaha, asosiasi industri, BUMD, serta Special Mission Vehicles (SMV) pembiayaan pembangunan Kementerian Keuangan seperti PT SMI, PT PII, PT SMF, PT LPEI, dan PT GDE, sehingga tercipta ekosistem investasi yang lebih dinamis, inovatif, dan berdaya saing. Dengan sinergi tersebut, FOILA juga berpotensi menjadi katalis dalam mendorong skema Kerja Sama

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* untuk mempercepat pembangunan ekonomi Lampung.

- 10) Untuk memperkuat keselarasan pembangunan, diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan integrasi antara instrumen perencanaan fiskal daerah, yaitu KUA-PPAS, dengan dokumen perencanaan fiskal nasional, yaitu KEM-PPKF. Sinkronisasi ini bukan hanya penting untuk menjamin bahwa prioritas belanja daerah bergerak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, tetapi juga menjadi mekanisme agar target pembangunan dalam RKP dan APBN dapat diperkuat melalui dukungan APBD. Dengan demikian, harmonisasi kedua instrumen tersebut akan menciptakan kesinambungan fiskal yang lebih efektif, serta memastikan penggunaan sumber daya pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran.

4.2.2 Terkait Progres Program Makan Bergizi Gratis

- 11) Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Pendidikan agar secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap kriteria dan prioritas penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang penting untuk memastikan penyaluran semakin proporsional dan tepat sasaran, terutama dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil yang memiliki kebutuhan gizi paling kritis.
- 12) BGN, Kementerian Sosial, serta Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota diharapkan memperkuat koordinasi dan integrasi MBG dengan berbagai program kesehatan dan jaring pengaman sosial yang telah berjalan, seperti Program Percepatan Stunting (PPS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sinergi ini akan mendorong terciptanya efek berganda yang lebih kuat dalam meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memperbaiki kesejahteraan keluarga prasejahtera.





- 13) Pemerintah Desa bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM agar meningkatkan kerja sama strategis dalam memperkuat partisipasi BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, serta pelaku UMKM lokal agar berfungsi sebagai mitra utama penyedia bahan pangan bagi Program MBG.
- 14) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menerapkan standar gizi yang lebih terukur dan berbasis data dalam setiap porsi makanan, sekaligus meningkatkan keberagaman serta ketersediaan pangan lokal, khususnya susu dan sumber protein lainnya.
- 15) Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan membangun sistem logistik yang lebih efisien untuk menjamin ketepatan waktu distribusi makanan, terutama di wilayah 3T dengan akses terbatas, melalui kolaborasi yang lebih intensif dengan TNI/Polri maupun jaringan distribusi lokal.
- 16) Setiap SPPG di Provinsi Lampung dianjurkan memanfaatkan mekanisme *Virtual Account* sebagai instrumen penyelesaian keterlambatan pembayaran gaji dan reimbursement vendor, guna menjaga keberlanjutan arus kas operasional dapur.
- 17) BGN bersama Kementerian Sosial perlu merancang program literasi keuangan bagi rumah tangga penerima manfaat agar mampu mengoptimalkan realokasi anggaran rumah tangga yang dihemat dari pengeluaran pangan sebagai dampak program MBG.
- 18) SPPG wajib memperketat pengawasan atas kualitas bahan baku, prosedur pengolahan makanan, hingga standar pencucian baki saji, sehingga makanan yang disajikan senantiasa memenuhi aspek higienitas sekaligus menjaga kualitas nutrisi.
- 19) BGN perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis *real-time* yang mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga hasil yang dicapai,

untuk memperkuat akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang transparan dan dapat diakses publik.

4.2.3 Terkait Ketahanan Energi dan Potensi Kerja Sama Pembiayaan EBT Lampung

- 20) Sinergi antara BPDHLH dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat melalui kerangka kerja sama resmi, seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), disertai forum koordinasi rutin untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan program hijau di Lampung.
- 21) Pemanfaatan dana bergulir dan hibah BPDHLH harus dioptimalkan, misalnya melalui program kredit energi bagi UMKM atau hibah untuk proyek percontohan PLTS desa, dengan target serapan dana yang jelas setiap tahun.
- 22) Program EBT perlu diintegrasikan ke dalam RKPD, APBD, serta RPJMD agar sinergi APBN–APBD terwujud, sekaligus menjadikan transisi energi sebagai prioritas pembangunan daerah.
- 23) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pembebasan BPHTB, subsidi bunga pinjaman, atau tambahan *feed-in tariff* dari APBD, untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor EBT.
- 24) Lampung berpeluang menginisiasi Roadmap Keuangan Hijau Daerah dengan dukungan OJK dan Kemenkeu, misalnya melalui target penyaluran kredit hijau oleh bank daerah serta forum investor hijau yang melibatkan pelaku usaha lokal.
- 25) Untuk memastikan efektivitas kebijakan, diperlukan monitoring dan evaluasi berbasis indikator hijau yang lebih komprehensif, seperti kapasitas EBT terpasang, penurunan emisi, jumlah rumah tangga pengguna PLTS, dan tenaga kerja sektor EBT, yang dilaporkan secara berkala melalui KFR dan/atau laporan daerah atas capaian RPJMD tahunan.



Daftar Pustaka

- Aplikasi MONSAKTI, <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi OM-SPAN TKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd/#/home/login>
- Aplikasi SIKD *Next Generation*, <https://sikd.kemenkeu.go.id/tkd/alokasi/realisasi>
- Aplikasi SINTESA, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SATUDJA, <https://satudja.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id/login>
- Aplikasi SIKPUMi, <https://sikp.umi.kemenkeu.go.id/>
- Aplikasi Treasury Big Data, <https://digit.kemenkeu.go.id/treasurybigdata/>
- Agency, I. E. (2025, Juli). *Coal 2025 mid-year report*. <https://www.iea.org/reports/coal-mid-year-update-2025/trade>
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. (2023). *Laporan tahunan BPD LH tahun 2023*. Jakarta: BPD LH.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik*. <https://www.bps.go.id/>
- Bank Indonesia. (2025). *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS)*. <https://www.bi.go.id/hargapangan>
- Bonds, S. (2012). *Food for thought: Evaluating the impact of India's mid-day meal program on educational attainment*. University of California, Berkeley, 641.
- Cohen, J. F. (2021). *Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: a systematic review*. *Nutrients*, 13(3), 911.
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2024). *Laporan kinerja Ditjen EBTKE tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- HAISAWIT. (2025, Juni 13). *AS impor minyak sawit senilai USD 1,6 miliar pada 2024, Indonesia pemasok utama*. <https://haisawit.co.id/news/detail/as-impor-minyak-sawit-senilai-usd-16-miliar-pada-2024-indonesia-pemasok-utama>
- Indonesia, C. (2025, Agustus 17). *Harga CPO melejit, bos Sawit Merdeka di Agustus*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250817105816-128-658821/harga-cpo-melejit-bos-sawit-merdeka-di-agustus>
- International Energy Agency. (2023). *Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028*. <https://www.iea.org/reports/renewables-2023>
- Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. (Semester I 2025). *Data dan Realisasi Penerimaan Bea Cukai di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. (Semester I 2025). *Data dan Realisasi Penerimaan PNPB Kekayaan Negara di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.
- Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (Semester I 2025). *Data dan Realisasi Perpajakan di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kementerian Keuangan.



- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Semester I 2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kanwil DJPb Provinsi Lampung. (Triwulan II 2025). *Laporan ALCo Regional Lampung*. Bandar Lampung: Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
- Kementerian Dalam Negeri. (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). *Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021–2030*. Jakarta: Kementerian ESDM dan PLN.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Keuangan. (2025). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah: <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023, November 14). *Indonesia terima pendanaan dari Green Climate Fund untuk percepatan mitigasi perubahan iklim*. <https://kemenlh.go.id/news/detail>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Pembiayaan ramah lingkungan terhadap sub sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Nida, R. &. (2023). *School meals program and its impact towards student's cognitive achievement*. Journal of Economics Research and Social Sciences, 7(1), 69-80.
- Overseas Development Institute. (2023). *Nexus assessment of Indonesia's energy transition*. https://media.odi.org/documents/Nexus_assessment_of_Indonesias_energy_transition.pdf
- Paul, P. K. (2012). *Impact of mid-day meal programme on academic performance of students: Evidence from few upper primary schools of Burdwan District in West Bengal*. International Journal of Research in Social Sciences, 2(3), 391-406.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Keputusan Gubernur No. G/291/VI.03/HK/2025 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Atas Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2025). *Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Lampung tahun 2025–2045*. Bandar Lampung: Bappeda Provinsi Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2019). *Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019–2024*. Bandar Lampung: Bappeda Provinsi Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pertamina Geothermal Energy. (2025, Agustus 26). <https://www.pge.pertamina.com/en/own-operation/ulubelu>





Reuters. (2025a, Juli 15). *US planes, cars, drinks on EU list of potential tariffs*.
<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-planes-cars-drinks-eu-list-potential-tariffs-2025-07-15>

Reuters. (2025b, Mei 9). *Indonesia coal exports post rare decline so far in 2025*.
<https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-coal-exports-post-rare-decline-so-far-2025-maguire-2025-05-09>



Daftar Istilah

Anchor investor

Anchor investor adalah investor institusional utama yang berkomitmen berinvestasi pada tahap awal untuk meningkatkan kredibilitas dan menarik investor lain. Kehadiran anchor investor sering menjadi penentu keberhasilan pendanaan proyek.

Andil inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan undang-undang.

Bea

Pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos.

BI 7 Days Reverse Repo Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BMN

Barang Milik Negara. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan

belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BPP

Belanja Pemerintah Pusat. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan tugas pemerintah pusat.

Carbon credit pre-financing

Carbon credit pre-financing adalah skema pembiayaan di mana pengembang proyek menerima dana lebih awal dengan jaminan kredit karbon yang akan dihasilkan di masa depan. Mekanisme ini mendukung proyek hijau dengan keterbatasan modal awal.

Co-generation energy

Cogeneration atau Combined Heat and Power (CHP) adalah proses menghasilkan listrik dan panas secara bersamaan dari satu sumber energi. Sistem ini meningkatkan efisiensi energi hingga 80% dibandingkan pembangkit konvensional.

Cukai

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik berikut: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

DAK

Dana Alokasi Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.



Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

DAU

Dana Alokasi Umum. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DBH

Dana Bagi Hasil. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

DTK

Dana Transfer Khusus. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DTU

Dana Transfer Umum. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Escrow account

Escrow account adalah rekening penampungan dana yang dikelola pihak ketiga untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai perjanjian kontrak. Skema ini mengurangi risiko gagal bayar dalam proyek energi.

Feed-in tariff (FiT)

Feed-in tariff adalah skema harga tetap yang dijamin pemerintah untuk listrik yang dihasilkan dari EBT

dan dijual ke jaringan listrik. Mekanisme ini mendorong kepastian pendapatan bagi pengembang energi terbarukan.

First loss guarantee

First loss guarantee adalah mekanisme pembiayaan di mana lembaga tertentu menanggung kerugian pertama dari sebuah investasi untuk mengurangi risiko pihak lain. Skema ini mendorong partisipasi investor swasta pada proyek berisiko tinggi.

Grace period

Grace period adalah masa tenggang sebelum debitur mulai membayar pokok pinjaman, biasanya diberikan pada awal periode kredit proyek infrastruktur. Skema ini bertujuan memberi ruang waktu agar proyek menghasilkan pendapatan terlebih dahulu.

Incinerator

Incinerator adalah fasilitas pembakaran sampah pada suhu tinggi untuk mengurangi volume limbah, sekaligus menghasilkan energi panas atau listrik. Teknologi ini umum digunakan dalam skema Waste-to-Energy.

Insentif fiskal

Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai bersih sekarang (NPV) suatu investasi sama dengan nol. IRR digunakan untuk menilai kelayakan finansial proyek.

Junior equity

Junior equity adalah bentuk kepemilikan saham dengan prioritas klaim lebih rendah dibandingkan investor utama. Instrumen ini berisiko tinggi tetapi menawarkan imbal hasil lebih besar.



KPB

Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan program yang disalurkan oleh Provinsi Lampung untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Selain untuk penebusan pupuk, kartu ini juga dapat digunakan untuk: Informasi laporan keuangan usaha, Peminjaman KUR, Kepastian pemasaran hasil panen.

KPBU

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum.

KPPN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab menyalurkan dana dari kas negara ke berbagai satuan kerja.

LFG (landfill gas) recovery

Landfill gas recovery adalah pemanfaatan gas metana dari tempat pembuangan akhir (TPA) untuk dijadikan energi listrik atau panas. Teknologi ini sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

LKPD-TW

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah yang mencakup Laporan Keuangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

LKPK-TW

Laporan yang disusun dengan cara mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah (LKPD-TW).

Local Tax Rasio

Perbandingan antara total penerimaan pajak maupun retribusi daerah dengan angka Produk Regional Domestik Bruto.

Local Taxing Power

Salah satu pilar dalam penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang memberikan panduan bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Off-grid Energy Facility

Off-grid energy facility adalah sistem penyediaan listrik yang beroperasi secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan utama. Solusi ini banyak digunakan di daerah terpencil atau pedesaan.

Partial credit guarantee (PCG)

PCG adalah instrumen jaminan sebagian yang diberikan lembaga keuangan untuk meningkatkan kelayakan kredit suatu proyek. PCG memperluas akses pembiayaan terutama bagi proyek berisiko tinggi.

Partial risk guarantee (PRG)

PRG adalah jaminan parsial yang diberikan lembaga keuangan untuk melindungi investor dari risiko tertentu, seperti gagal bayar pemerintah atau risiko politik. PRG meningkatkan daya tarik investasi proyek EBT.

Payback period

Payback period adalah periode waktu yang dibutuhkan agar total investasi dapat kembali melalui arus kas bersih yang dihasilkan proyek. Semakin singkat periode ini, semakin rendah risiko investasi.

PBB

Pajak Bumi dan Bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.



Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Pembiayaan tranching

Pembiayaan tranching adalah mekanisme pembiayaan di mana pinjaman atau investasi dibagi ke dalam beberapa tahap (tranches) dengan profil risiko dan imbal hasil berbeda. Strategi ini memfasilitasi keterlibatan investor dengan preferensi risiko beragam.

PLTS skala utilitas (grid-connected)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala utilitas adalah sistem surya berkapasitas besar yang langsung terhubung ke jaringan listrik (grid) untuk menyuplai daya secara masif. Teknologi ini menjadi pilar transisi energi karena efisien dalam memenuhi kebutuhan listrik dalam skala regional.

Power Purchase Agreement (PPA)

PPA adalah kontrak jual-beli listrik jangka panjang antara produsen energi dengan offtaker (biasanya PLN atau utilitas). Perjanjian ini memberikan kepastian pendapatan bagi proyek EBT.

PPh

Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

PPN

Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

QTQ

Quarter to Quarter. Perbandingan antara data suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Result-Based Payment (RBP)

RBP adalah mekanisme pembiayaan di mana pembayaran dilakukan setelah hasil atau target tertentu dari proyek tercapai. Model ini meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana.

Safeguard lingkungan

Safeguard lingkungan adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk memastikan proyek pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan. Safeguard diterapkan sebagai syarat pembiayaan lembaga internasional.

SiKPA

Sisa Kurang Perhitungan Anggaran (SiKPA) adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiKPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

SiLPA

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya.

Socially Responsible Investment (SRI)

SRI adalah strategi investasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan



tata kelola (ESG) selain keuntungan finansial. Instrumen ini semakin populer untuk mendukung proyek hijau.

Subordinated debt

Subordinated debt adalah jenis utang dengan prioritas pembayaran di bawah utang senior, namun di atas ekuitas. Instrumen ini sering digunakan untuk menutup celah pembiayaan proyek infrastruktur.

TKD

Transfer ke Daerah. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal.

Viability Gap Fund (VGF)

VGF adalah dana dukungan pemerintah untuk menutup selisih antara biaya proyek dan kelayakan

finansialnya, sehingga proyek tetap dapat berjalan. Instrumen ini umum digunakan dalam proyek infrastruktur publik.

Voluntary Carbon Market (VCM)

VCM adalah pasar sukarela tempat entitas membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi mereka. Pasar ini melengkapi skema wajib (compliance market) dalam mitigasi perubahan iklim.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

YTD

Year to date. perbandingan antara data kumulatif dari awal tahun hingga tanggal tertentu pada tahun berjalan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.





Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Lampung dengan *scan barcode* di bawah ini:



Atau klik tautan dibawah ini:

<https://bit.ly/MasukanKFRLampung>





Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan II 2025

Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
<https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/lampung/id/>